

**EVALUASI PROGRAM *NEIGHBORHOOD
UPGRADING AND SHELTER PROJECT-2* DI
KECAMATAN KASEMEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik



Oleh:

Anna Novita Sari

NIM. 6661150002

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Serang, Mei 2019**

ABSTRAK

Anna Novita Sari. Nim. 6661150002. Skripsi. Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen. Pembimbing I: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si

Fokus penelitian adalah evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen. Permasalahan pada penelitian adalah masyarakat yang kurang memanfaatkan prasarana, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara belum menjalankan tugas dengan baik, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi oleh Dunn (2003:610), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen belum berjalan optimal dimana masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan prasarana yang telah disediakan, kelompok pemanfaat dan pemelihara belum dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menjaga prasarana, kemudian masyarakat kurang berpartisipasi dalam musyawarah yang diadakan dalam program. Saran yang menjadi rekomendasi adanya pengawasan dari dinas terkait setelah pembangunan prasarana selesai dan ada upaya dari dinas-dinas terkait untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, adanya subsidi silang untuk iuran prasarana bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan badan keswadayaan masyarakat memiliki strategi dalam melaksanakan musyawarah agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah.

Kata Kunci : Evaluasi, Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*

ABSTRACT

Anna Novita Sari. Nim. 6661150002. Research Paper. The Evaluation of Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 Program in Kasemen District. First Supervisor: Titi Stiawati, S.Sos., M.Si and Second Supervisor: Drs. Hasuri Waseh, SE., M,Si

This research was focused on evaluation of Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 Program in Kasemen District. The problems in this research were the community is not using infrastructure, the beneficiary and maintenance groups not yet doing the job properly and lack of community participation. This research was intended to evaluate of Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 Program in Kasemen District. Theory used was evaluation theory by Dunn (2003:610), namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. The research results was implemented of Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 Program in Kasemen District has not been optimally where the community has not fully utilized the infrastructure provided, the utilization and maintenance groups cannot mobilize community participation to maintain infrastructure, then the community did not participate in the deliberations held in the program. Suggestions are recommendations for supervision from related agencies after the construction of the infrastructure is complete and there is an effort from the relevant agencies to provide awareness to the public about the importance of protecting the environment, there is cross subsidies for infrastructure contributions for economically disadvantaged people and the community self-reliance agency have a strategy in implementing deliberations so that the community can participate in deliberations.

Keywords : Evaluation, Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 Program

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 12 November 1997
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *EVALUASI PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT-2* DI KECAMATAN KASEMEN adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, Mei 2019



Anna Novita Sari

NIM: 6661150002

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ANNA NOVITA SARI
NIM : 6661150002
JUDUL : EVALUASI PROGRAM *NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT-2* DI KECAMATAN KASEMEN

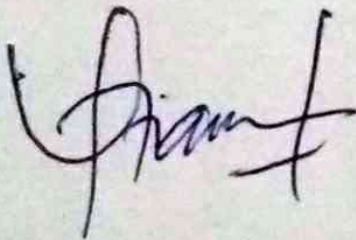
Serang, Mei 2019

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Disajikan

Menyetujui,

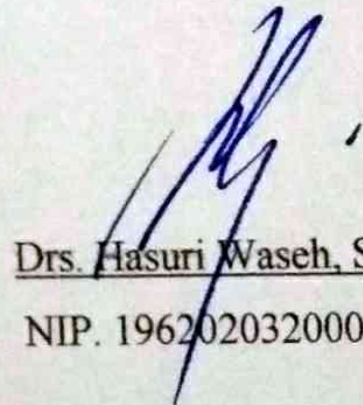
Pembimbing I

Pembimbing II



Titi Stiawati, S.Sos., M.Si

NIP. 197011252005012001



Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si

NIP. 196202032000121002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Sjaafari., M.Si

NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNA NOVITA SARI
NIM : 6661150002
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PROGRAM *NEIGHBORHOOD
UPGRADING AND SHELTER PROJECT-2* DI
KECAMATAN KASEMEN

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 13 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 13 Mei 2019

Ketua Penguji
Kandung Sapto Nugroho, M.Si
NIP. 197809182005011002

Anggota:
Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si
NIP. 197501312005012004

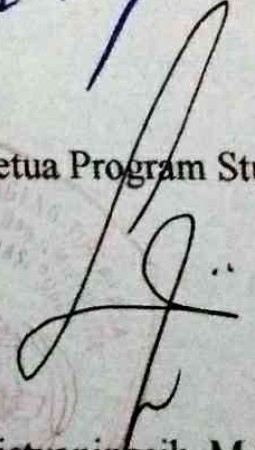
Anggota:
Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si
NIP. 196202032000121002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA


Dr. Agus Sjafan., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi


Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001



*Bila kau tak tahan lelahnya belajar,
maka kau harus tahan menanggung
perihnya kebodohan'*

-Imam Syafi'i-

*"Balas Dendam Terbaik Adalah
Menjadikan Dirimu Lebih Baik."*

-Ali Bin Abi Thalib-

"Skripsi ini aku persembahkan untuk
kedua orang tuaku,
Bapak Jarmin dan Ibu Suparti"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT kemudian sholawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunianya hingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen**. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik program studi Administrasi Publik.

Hingga terwujudnya penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yaitu Ibu Suparti dan Bapak Jarmin yang selalu memberikan doa tiada henti, semangat dan jerih payah yang tulus dan ikhlas. Tidak lupa juga kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjfari, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan ketua sidang yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.
6. Listyaningsih, M.Si. Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Dr. Arenawati, M.Si. Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Leo Agustino, S.Sos., Ph.D. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal perkuliahan.
9. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Dosen pembimbing I yang telah senantiasa selalu membantu dan memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si. Dosen pembimbing II yang telah senantiasa memberikan bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si. Dosen penguji sidang yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi peneliti.
12. Kepada seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

13. Para Staff Tata Usaha (TU) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan.
14. Dedi Cahyadi, SKM., M.Si., Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Lia Amalia, ST., dan seluruh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang yang telah memberikan informasi, data dan ketersediaan waktu untuk penulis.
15. BKM Kelurahan Margaluyu, Kilasah dan Warung Jaud, masyarakat Kasemen, dan seluruh pihak yang terlibat di Kecamatan Kasemen, yang telah memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data penelitian.
16. Kepada teman-teman administrasi publik angkatan 2015 yang memberikan kesan selama perkuliahan.
17. Kepada sahabat-sahabat nurul, ferina, erin (blay), dita, nila, nisa, hadil, faqih, yudi, irvan, raka, tama, ayi, deden, rizky (lulus duluan), ilma, dian, sahabat lama mawar, diyan, dan yuli, kakak-kakak maeza, iwaw, anggita, frences dan alipsyah yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada peneliti.
18. Kepada Keluarga Besar Rumbang, HIMANE 2016, HIMANE 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mengajarkan kebersamaan dan kekeluargaan.

19. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi dukungan, bantuan, saran dan doa.

Dengan ini penulisan skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. Maka dari itu, diharapkan kritikan dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan proposal penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	18
1.3 Batasan Masalah	18
1.4 Rumusan Masalah.....	19
1.5 Tujuan Penelitian	19
1.6 Manfaat Penelitian	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Kebijakan Publik	26
2.2 Evaluasi Kebijakan	31
2.3 Pengertian Permukiman Kumuh.....	44
2.4 Pengertian Program NUSP-2.....	45
2.5 Penelitian Terdahulu	47
2.6 Kerangka Pemikiran	49
2.7 Asumsi Dasar	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	53
3.2 Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian	54
3.3 Lokasi Penelitian	54
3.4 Variabel Penelitian	55
3.4.1 Definisi Konsep	55
3.4.2 Definisi Operasional	56
3.5 Instrumen Penelitian	57
3.6 Informan Penelitian	58
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	59
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	59
3.7.2 Uji Keabsahan Data.....	63
3.7.3 Analisis Data	65
3.8 Jadwal Penelitian	68

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	69
4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Serang	69
4.1.2. Deskripsi Kecamatan Kasemen.....	72
4.1.3. Deskripsi Program NUSP-2	74
4.2. Deskripsi Data Penelitian.....	89
4.3. Data Informan Penelitian	91
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian.....	93
4.4.1. Efektivitas	93
4.4.2. Efisiensi.....	105
4.4.3. Kecukupan.....	118
4.4.4. Pemerataan	126
4.4.5. Responsivitas	133
4.4.6. Ketepatan.....	145
4.5. Pembahasan.....	150

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	180
5.2 Saran	182

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Kota/Kabupaten Sasaran Program NUSP-2.....	7
1.2 Persebaran Luas dan Desa/Kelurahan di Kota Serang.....	8
1.3 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang.....	9
1.4 Lokasi Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Serang.....	11
1.5 Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Serang Tahun 2017.....	12
2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn.....	33
3.1 Deskripsi Informan.....	58
3.2 Pedoman Wawancara.....	61
4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang.....	70
4.2 Keluarga Miskin di Kota Serang Tahun 2017.....	71
4.3 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kasemen.....	73
4.4 Susunan Pengurus BKM Maju Bersama Kelurahan Kilasah.....	78
4.5 Susunan Pengurus BKM Anugrah Snetosa Kelurahan Margaluyu.....	78
4.6 Susunan Pengurus BKM Al-Ihlas Kelurahan Warung Jaud.....	80
4.7 Informan Penelitian.....	91
4.8 Anggaran Program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen.....	107
4.9 Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Serang.....	107
4.10 Kegunaan Iuran Masyarakat di Kelurahan Kilasah Setiap Bulan.....	113
4.11 Susunan KPP RW 001 Kelurahan Margaluyu.....	121
4.12 Susunan KPP RW 005 Kelurahan Margaluyu.....	121
4.13 Susunan KPP RW 001 Kelurahan Kilasah.....	122

4.14	Susunan KPP RW 002 Kelurahan Margaluyu.....	122
4.15	Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Serang Tahun 2017.....	128
4.16	Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Kasemen Tahun 2017.....	131
4.17	Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen.....	132
4.18	Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana di Kelurahan Kilasah Tahun 2017	142
4.19	Temuan Lapangan.....	175

DAFTAR GAMBAR

1.1	Motor Sampah.....	15
1.2	Tempat Sampah yang Rusak.....	16
2.1	Model Evaluasi Kebijakan Publik Leo Agustino.....	36
2.2	Kerangka Berfikir.....	51
3.1	Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.....	67
4.1	Peta Wilayah Kecamatan Kasemen	73
4.2	Struktur Organisasi BKM Maju Bersama Kelurahan Kilasah.....	76
4.3	Struktur Organisasi BKM Anugrah Sentosa Kelurahan Margaluyu.....	76
4.4	Struktur Organisasi BKM Al-Ikhlas Kelurahan Warung Jaud.....	77
4.5	Struktur Organisasi Program NUSP-2	80
4.6	Tahapan Kegiatan NUSP-2 Tingkat Masyarakat.....	87
4.7	Daftar Hadir Musyawarah Kelurahan Kilasah.....	111
4.8	Sampah yang Dibuang di Area Kebun.....	135
4.9	Tempat Pembuangan Sampah di Area Permukiman.....	137
4.10	Laporan Manajemen Proyek NUSP-2 Tahun 2017	142

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang
2. SK Nomor 400/Kep.223-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 di Kota Serang Tahun 2015-2017
3. Surat Pernyataan Informan
4. *Member Check*
5. Matriks Hasil Wawancara
6. Dokumentasi
7. Lembar Bimbingan Mahasiswa
8. *Curriculum Vitae*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketersediaan prasarana lingkungan merupakan salah satu hal penting untuk menunjang terselenggaranya kehidupan yang layak. Sudah menjadi salah satu tugas negara menjamin kelayakan kehidupan warga negaranya. Setiap negara pasti memiliki tujuan dalam mencapai negara yang maju dalam segala aspek. Salah satunya dengan memberikan kehidupan layak untuk masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dimana salah satu penunjang utama kehidupan yang layak untuk masyarakat yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal atau rumah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan kehidupannya. Dalam melaksanakan segala aktivitas diluar pada akhirnya masyarakat akan selalu membutuhkan rumah untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya. Namun tidak hanya tempat tinggal, prasarana lingkungan penunjang juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh. Maka dari itu, saat ini pemerintah sedang banyak melakukan pembangunan agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak.

Semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan Indonesia membuat pertambahan laju penduduk semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada

kawasan perkotaan yang akan bertambah padat, karena masyarakat di perdesaan akan berfikir bahwa di kota mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan fasilitas yang tidak mereka rasakan di desa. Dengan bertambahnya angka penduduk di kota, menyebabkan permasalahan baru salah satunya yaitu bertambahnya permukiman kumuh. Masyarakat yang baru datang dari desa berharap akan mendapatkan pekerjaan yang layak di kota namun nyatanya mereka tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Hal inilah yang akan membuat masyarakat menjadi pengangguran, sehingga di kota mereka menjadi masyarakat yang berekonomi rendah karena tidak memiliki pekerjaan atau berpenghasilan rendah. Kemudian dengan begitu karena masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka akan terjadi kemiskinan. Hal tersebutlah salah satu pemicu bertambahnya permukiman kumuh di kota-kota besar. Permukiman kumuh di kota-kota besar akan terus bertambah jika pemerintah tidak melakukan tindakan, maka dari itu dibutuhkan tindakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menangani permasalahan tersebut.

Salah satu tindakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menangani permasalahan permukiman kumuh yaitu dengan menyelenggarakan program pembangunan mengenai perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak. Adanya penyelenggaraan pembangunan di kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerataan untuk seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya angka pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan, maka semakin meningkat pula kebutuhan prasarana

pendukung untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat. Namun masih banyak di beberapa wilayah perkotaan yang prasarananya belum tercukupi, sehingga kapasitas daya dukung prasarana lingkungan permukiman mulai mengalami penurunan yang membuat terjadinya lingkungan permukiman kumuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif”.

Dengan begitu dibutuhkan upaya baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi permukiman kumuh. Dengan diadakannya program pembangunan ataupun bantuan untuk masyarakat. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembangunan dengan membuat program-program untuk mengurangi pemukiman kumuh khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu program yang dibuat yaitu program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* (NUSP-2). Pemerintah bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) atas dasar perjanjian pinjaman dana antara pemerintah dan ADB yang tertuang dalam perjanjian nomor 3122-INO tanggal 23 April 2014 mengenai *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*. Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* merupakan program penanganan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat

dan sektor swasta serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Pada pelaksanaan program NUSP-2 menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat kota. Konsep pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, karena didalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan, serta mengoperasikan dan memelihara hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan diharapkan masyarakat nantinya dapat saling menjaga prasarana yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat ini diharapkan mampu membuat masyarakat meningkatkan kepedulian dalam menjaga prasarana yang telah dibuat karena masyarakat juga yang akan menjamin keberlanjutan prasarana tersebut. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* dilaksanakan dengan pendekatan skala kawasan dan skala lingkungan. Pembangunan infrastruktur skala lingkungan akan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui rembuk warga di tingkat kelurahan, sedangkan pembangunan infrastruktur skala kawasan pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam mengadakan program ini pemerintah mengandalkan dana dari 4 sumber dana yaitu dengan dana APBN, APBD kota/kabupaten, dana pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) yang diperkuat dengan dana swadaya masyarakat. Pemanfaatan dana proyek NUSP-2 dari ketiga sumber tersebut dimanfaatkan dalam membiayai komponen proyek. Dana pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan program peningkatan kapasitas termasuk pelatihan dan program studi, serta pembiayaan untuk pengadaan jasa konsultan. Kemudian dana dari pemerintah (APBN) digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi program di tingkat pusat dan kegiatan *road show* di daerah, biaya operasional pengelolaan program tingkat pusat, kegiatan monitoring dan evaluasi program. Pemerintah kota/kabupaten wajib untuk menyediakan sharing dari APBD sebesar minimal 10% setiap tahunnya, yang diperuntukan Biaya Operasional Program (BOP) Pelaksanaan NUSP-2 ditingkat kota/kabupaten, biaya sosialisasi program ditingkat kota/kabupaten, biaya rapat-rapat, *Focus Group Discussion* (FGD), lokakarya penyusunan SIAP, dana sharing kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung, dan untuk kegiatan pengelolaan program tingkat kota/kabupaten, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan. Lalu dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan rembuk-rembug warga dan musyawarah kelurahan, pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan manfaat infrastruktur yang telah dibangun melalui NUSP-2.

Pelaksanaan program NUSP-2 ini dilaksanakan di tingkat kelurahan sehingga membuat pelaksanaannya dapat lebih berjalan optimal dan dapat lebih

mengetahui kebutuhan masyarakat. Pelaksana dalam program NUSP-2 di tingkat kelurahan terdapat pejabat kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), dan Kader Masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan organisasi yang dipilih dan dibentuk masyarakat untuk melaksanakan tahapan kegiatan program NUSP-2 di tingkat kelurahan. Kemudian Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) adalah kelompok yang dibentuk BKM pada lokasi kegiatan yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat yang berkepentingan selaku pengguna atau pemanfaat infrastruktur yang telah dibangun oleh masyarakat.

Peran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat penting yaitu melakukan sosialisasi mengenai informasi program NUSP-2 kepada masyarakat yang dimana juga BKM akan melaksanakan musyawarah dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan prasarana lingkungan termasuk penyebab kekumuhan yang terdapat di tingkat kelurahan tersebut. Kemudian dengan begitu akan diketahui prasarana apa saja dibutuhkan di kelurahan tersebut. Peran masyarakat dalam musyawarah sangat penting karena masyarakat yang akan merasakan sendiri hasil musyawarah tersebut. Badan keswadayaan masyarakat dengan masyarakat diharuskan membuat rencana aksi perbaikan lingkungan atau *Neighborhood Upgrading Action Plan* (NUAP) yang berisi perencanaan pembangunan prasarana yang menjadi prioritas di kelurahan tersebut. Adapun komponen yang dapat diusulkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan ADB (*Asian Development Bank*) mencakup 7 hal pokok yaitu jalan setapak, jalan lingkungan, drainase mikro, persampahan, sanitasi, air bersih, dan

lampu penerangan jalan. Setelah itu, Badan Keswadayaan Masyarakat juga harus memastikan proses perbaikan lingkungan sesuai dengan *Neighborhood Upgrading Action Plan* (NUAP) yang telah dibuat. Kemudian tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara membantu BKM dalam pengawasan pembangunan dan mendorong serta menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat didalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur.

Dalam upaya menangani permukiman kumuh di perkotaan maka dilaksanakanlah program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* yang dilaksanakan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria yang disepakati oleh tim interdepartemen yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kota/Kabupaten Sasaran Program NUSP-2

No	Kota/Kabupaten	Provinsi
1	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
2	Kota Batam	Kepulauan Riau
3	Kota Palembang	Sumatera Selatan
4	Kota Semarang	Jawa Tengah
5	Kota Bandar Lampung	Lampung
6	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
7	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
8	Kota Ambon	Maluku
9	Kab. Tanjung Jabung Barat	Jambi
10	Kota Bengkulu	Bengkulu
11	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
12	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
13	Kota Pasuruan	Jawa Timur
14	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah
15	Kab. Bone	Sulawesi Selatan
16	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
17	Kota Tanjungbalai	Sumatera Utara
18	Kota Serang	Banten
19	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
20	Kota Sukabumi	Jawa Barat

(Sumber: Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*)

20 kota/kabupaten tersebut merupakan sasaran pemerintah untuk melaksanakan program NUSP-2. Dimana Provinsi Banten juga mendapatkan program NUSP-2 ini salah satunya terdapat di Kota Serang. Kota Serang merupakan salah satu dari 8 kota/kabupaten yang terdapat di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Posisi Kota Serang secara geografis terletak diantara 5°99'-6°22' Lintang Selatan dan 106°07'-106°25' Bujur Timur. Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang, terbentuk secara resmi pada tanggal 10 Agustus 2007 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007. Kota Serang memiliki luas wilayah seluas 266,74 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan, 67 Desa/Kelurahan.

Tabel 1.2
Persebaran Luas dan Desa/Kelurahan di Kota Serang

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Serang	25,99	12
2.	Cipocok Jaya	31,54	8
3.	Curug	49,60	10
4.	Kasemen	63,36	10
5.	Taktakan	47,88	13
6.	Walantaka	48,48	14
Total		266,74	67

(Sumber: <http://dprd-serangkota.go.id/gambaran-umum-daerah-kota-serang/>)

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) angka kemiskinan di Provinsi Banten mengalami peningkatan pada bulan September 2017 sebesar 5.59 persen. Dimana pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin

sebanyak 675,04 ribu dan menjadi 699,83 ribu orang pada September 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa program-program yang telah disalurkan pemerintah belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten. Pada data yang telah dirilis Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan, pada Maret 2017 sebanyak 391,03 kemudian meningkat menjadi 415,67 pada September 2017. Angka kemiskinan di wilayah perkotaan ini yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kawasan kumuh di perkotaan salah satunya Kota Serang. Persebaran luas permukiman kumuh di Kota Serang sebesar 381,71 yang tersebar di 18 kelurahan yang ada di Kota Serang berdasarkan SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang .

Tabel 1.3

Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang

No	Nama Kelurahan	KP Kumuh	Luas Kumuh (Ha)
1.	Unyur	Kp Kelanggaran dan Pamindang, Kp Unyur dan Pabuaran, Kp Cilampang dan Cikepuh, Kp Kedaung dan Kp Gempol dan Lebak	41,79
2.	Lopang	Kp Lopang Cilik, Lopang Gede, Domba, Kaliwadas, Kebaharn Al Manar dan Al Amin	49,33
3.	Sukawana	Kp Kebanyakan Wetan, Kulon, Tegal Kalisalak, Kubang Kemiri, Sambi Gerowong dan Sentul	15,62
4.	Terondol	Kp Terondol, Kp Kubang Apu dan Kp Kesawon	13,59
5.	Sumur Pecung	Kp Ciwaktu Lor, Cipete dan Sumur Pecung, Kp Ciwaktu Kidul, Kp Kidang, Muncung, Cipete dan Pekojoan, Kp Hegar Alam, Ciloang dan Kasuren	30,93
6.	Drangong	Kp Ranca Sawah, Ranca Palupuh,	18,92

		Kosambi dan Legok Dalam	
7.	Taktakan	Kp Cigabus Dalem, Kp Kepandean Got dan Cigabus Dalem	10,29
8.	Kalanganyar	Kp Perumasan, Kp Cigabus dan Kebedilan	12,09
9.	Cilaku	Kp Jemaka, Cicae, Boru, Kp Pamupukan, Timbang dan Cibunyah	25,08
10.	Cipocok Jaya	Kp Tegalduren	8,31
11.	Cimuncang	Kp Warakas Secang	21,61
12.	Cipare	Kp Cijawamesjid	20,72
13.	Warung Jaud	Kp Warung Pasar, Kp Kijaud, Kp Sadiyah Satu, Kp Sadiyah Dua dan Kesaud	23,73
14.	Margaluyu	Kp Padek dan Kp Margaluyu	14,93
15.	Banten	Kp Pekapura dan Kp Kesatria	23,56
16.	Kilasa	Kp Tegal Dawe dan Kp Kilasa	7,82
17.	Masjid Priyayi	Kp Masigit Barat, Kp Priyaidukuh, Priyaitegal	29,54
18.	Penancangan	Kp Lebak Gempol, Kp Baru, Kp Susukan	13,85
		Luas Kawasan Kumuh	381,71

(Sumber: SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang)

Dari 18 kelurahan yang terdapat dalam tabel tersebut terlihat masih banyak titik lokasi permukiman kumuh yang ada di Kota Serang, maka perlu adanya tindakan dari pemerintah agar permukiman kumuh tidak semakin luas. Banyaknya lokasi permukiman kumuh yang ada maka pemerintah memberikan program NUSP-2 kepada beberapa kelurahan di Kota Serang agar dapat mengurangi permasalahan kawasan kumuh. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan semakin meningkatnya kawasan permukiman kumuh. Dari banyaknya lokasi kawasan pemukiman yang telah ditetapkan dalam SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang, pemerintah telah menetapkan kawasan yang mendapatkan program NUSP-2. Pelaksanaan NUSP-2 di Kota Serang terdapat di 4 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan yang dimana telah ditetapkan dalam SK Nomor 400/Kep.223-Huk/2015 Tentang Penetapan

Lokasi Kawasan Kumuh Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kota Serang Tahun 2015-2017.

Tabel 1.4
Lokasi Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Serang

No	Kecamatan	Kelurahan	Kampung	Luas Kumuh (Ha)
1.	Serang	Terondol	Kp. Kubang Apu	13,59
			Kp. Kesawon	2,12
2.	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya	Kp. Sumur Putat	5,80
			Kp. Kaong	5,47
		Penancangan	Lebak Gempol	4,92
			Kp. Susukan	3,35
			Kp. Turus	5,58
3.	Kasemen	Margaluyu	Kp. Ambon	3,61
			Kp. Padek	4,82
		Kilasah	Kp. Kilasah 3	4,66
			Kp. Kali Pampang	6,75
		Warung Jaud	Sa'diah 1	14,04
			Sa'diah 2	
4.	Curug	Cilaku	Kp. Jemaka	7,50
			Kp. Timbang	10,07
			Kp. Cibunyah	
			Luas Kumuh	92,28

(Sumber: SK Nomor 400/Kep.223-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kota Serang Tahun 2015-2017)

Dari SK Nomor 400/Kep.223-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kota Serang Tahun 2015-2017 terdapat 4 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan yang mendapatkan program NUSP-2. Dengan total luas kumuh untuk Kecamatan Serang seluas 15,71 Ha, Kecamatan Cipocok Jaya seluas 25,12 Ha, Kecamatan Kasemen seluas 33,88 Ha, dan Kecamatan Curug seluas 17, 57 Ha. Dari tabel 1.4 tersebut kita dapat mengetahui bahwa kecamatan yang memiliki luas kekumuhan paling tinggi yaitu Kecamatan Kasemen. Kecamatan Kasemen merupakan salah

satu kecamatan yang terdapat di Kota Serang. Kecamatan Kasemen ini terletak di Kota Kuno Banten yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Kecamatan Kasemen terdiri dari 10 kelurahan yang terdiri dari 70 RW dan 247 RT. Dengan melihat surat keputusan walikota tersebut terlihat bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Kasemen yang dapat dikatakan belum sejahtera kehidupannya. Dapat terlihat juga dari data Dinas Sosial Kota Serang yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat pada Kecamatan Kasemen. Data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa Kecamatan Kasemen menduduki peringkat pertama dalam angka kemiskinan yaitu sebesar 36463 jiwa, hal inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah agar angka tersebut tidak terus meningkat. Maka dari itu, untuk menangani semakin bertambahnya angka kemiskinan maupun luas kekumuhan di Kecamatan Kasemen pemerintah memberikan berbagai program agar permasalahan tersebut dapat teratasi, dimana salah satunya dengan memberikan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* tersebut.

Tabel 1.5

Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Serang Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Serang	9600	8529	18129
2	Cipocok Jaya	7836	6733	14569
3	Curug	4480	3910	8390
4	Walantaka	6182	5426	11608
5	Kasemen	19540	16923	36463
6	Taktakan	6006	5326	11332
	Jumlah	53644	46847	100491

(Sumber: Data Dinas Sosial Kota Serang)

Pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen dilakukan di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah. Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana permukiman kumuh dalam program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen dilaksanakan dengan pendekatan skala lingkungan, dimana pembangunan prasarana akan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kasemen telah dibangun beberapa prasarana seperti MCK, sarana air bersih, jalan paving blok dan jalan rabat beton, saluran drainase, tempat pembuangan sampah sementara, kemudian terdapat juga motor sampah dan gerobak sampah. Adanya pembangunan prasarana tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh dalam memenuhi prasarana lingkungannya untuk beraktivitas sehingga dapat membantu dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Masyarakat juga diharapkan mampu memelihara dan memanfaatkan prasarana yang telah dibangun. Pembangunan tersebut juga harus bisa digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Kasemen agar dapat terus bermanfaat.

Namun dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen masih banyak terdapat kendala. Saat peneliti melakukan observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen yaitu:

Pertama, bahwa prasarana yang telah disediakan atau dibangun kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini tidak seperti yang terdapat pada tujuan

dari program NUSP-2 yang tertera dalam buku pedoman umum NUSP-2 yaitu masyarakat harus memanfaatkan dan menjaga prasarana yang telah dibangun. Namun kenyataannya prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat di Kecamatan Kasemen. Salah satu contohnya yaitu tidak digunakannya motor sampah dari program NUSP-2 untuk mengangkut sampah tetapi digunakan untuk keperluan lain, sehingga masyarakat masih membuang sampah di area persawahan ataupun kebun. Hal tersebut berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Siti salah satu warga Kelurahan Warung Jaud di Kecamatan Kasemen pada Kamis, 18 Oktober 2018. Akibat motor sampah yang tidak pernah digunakan tersebut membuat banyak sampah berantakan disekitar area persawahan dan juga lingkungan warga. Padahal fungsi motor sampah yang diadakan dalam program ini agar motor sampah tersebut mengangkut sampah ke rumah-rumah warga kemudian membuangnya ke tempat pembuangan sampah sementara. Namun pada kenyataannya saat peneliti melakukan observasi masih banyak warga yang membuang sampah di lingkungan perkebunan dan persawahan yang kemudian biasanya sampah tersebut dibakar di area tersebut. Kondisi sampah di tempat pembuangan sampah sementara juga berantakan, sampah tersebut tidak masuk didalam wadah yang telah disediakan dan hanya berserakan disekitar tempat pembuangan sampah sementara tersebut yang letaknya dipinggir jalan sehingga dapat mengganggu aktivitas warga. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diadakannya program NUSP-2, adanya pembangunan prasarana persampahan bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungannya.

Gambar 1.1
Motor Sampah



(Sumber: Peneliti, 2018)

Kedua, yaitu tidak berjalannya tugas dari KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara). Salah satu tugas dan fungsi KPP yaitu untuk mendorong dan menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat didalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur. Namun kenyataannya KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) yang terdapat di Kelurahan Kilasah kurang menggerakkan masyarakat untuk dapat saling menjaga dan memelihara prasarana yang telah disediakan dan dibangun di Kelurahan Kilasah. Kelompok pemanfaat dan pemelihara perlu melakukan tindakan untuk memfungsikan kembali prasarana yang mengalami kerusakan. Kemudian juga terdapat tempat sampah yang tidak digunakan bahkan tidak ditangani untuk diperbaiki. Tempat sampah yang rusak ini perlu segera ditangani oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara untuk diperbaiki agar dapat digunakan kembali oleh warga. Saat peneliti melakukan observasi peneliti melihat bahwa tidak hanya satu tempat sampah saja yang dalam kondisi rusak namun terdapat beberapa tempat sampah dalam kondisi rusak tetapi sampai saat ini belum juga diperbaiki. Berdasarkan wawancara awal dengan

Bapak Hadirah selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Kilasah pada Sabtu, 27 Oktober 2018 bahwa tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan kurang berjalan karena dalam penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan membutuhkan dana yang bersumber dari iuran masyarakat namun masyarakat disana sangat sulit dalam membayar iuran. Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara awal peneliti dengan salah satu pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada Kamis, 16 Oktober 2018 bahwa masyarakat sangat sulit sekali ditagih uang untuk membayar iuran perawatan prasarana dengan berbagai alasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara belum dapat menggerakkan masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada. Padahal prasarana yang dibangun tersebut disediakan untuk masyarakat dan perlu dipelihara dan juga dimanfaatkan agar dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat terus bermanfaat untuk masyarakat.

Gambar 1.2

Tempat Sampah yang Rusak



(Sumber: Peneliti, 2018)

Ketiga, yaitu mengenai partisipasi warga yang kurang terhadap program NUSP-2. Program NUSP-2 dibuat yang dimana salah satu tujuannya yaitu untuk

memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan sebuah program. Program NUSP-2 ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat dan masyarakat tidak hanya menerima program dari pemerintah saja namun masyarakat juga terlibat dan berpartisipasi dalam program ini baik dari pembangunan maupun berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Salah satunya masyarakat diajak terlibat dalam musyawarah pra pembangunan agar masyarakat juga dapat mengusulkan prasarana apa yang dibutuhkan di daerahnya dan salah satunya juga musyawarah dalam pembuatan Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau *Neighborhood Upgrading Action Plan* (NUAP) bersama Badan Keswadayaan Masyarakat. Terdapat beberapa kali musyawarah sebelum adanya pelaksanaan pembangunan prasarana. Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Hadirah selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Kilasah pada Kamis, 16 Oktober 2018, bahwa setiap kali akan diadakan musyawarah, masyarakat selalu diundang untuk pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun dalam pelaksanaan musyawarah, masyarakat yang hadir tidak sesuai harapan yang diinginkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program NUSP-2 tersebut. Padahal peran masyarakat sangat penting dalam musyawarah tersebut yang dimana salah satunya untuk pembuatan Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau *Neighborhood Upgrading Action Plan* (NUAP). Dengan melibatkan masyarakat, masyarakat dapat turut berpendapat mengenai prasarana apa saja yang mereka butuhkan di kampung mereka. Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* ini membangun prasarana sesuai dengan survey

kebutuhan kampung sendiri, maka dari itu peran masyarakat dalam musyawarah sangat penting.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen harus dapat diatasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Maka berdasarkan latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* (NUSP-2) di Kecamatan Kasemen**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang memanfaatkan prasarana yang telah dibangun dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*
2. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*

1.3. Batasan Masalah

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang diteliti cukup luas, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan dimuka dan dengan memperhatikan fokus penelitian pada batasan masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan yaitu Bagaimana Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Kasemen?

1.5. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Mengembangkan keilmuan Administrasi Publik.
 - b. Mengembangkan teori yang telah diperoleh selama dalam perkuliahan.
 - c. Bahan pemahaman untuk penelitan selanjutnya.
2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun instansi terkait dalam evaluasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul skripsi. Sumber penjelasan dapat berasal dari penelitian sebelumnya, seminar ilmiah, pengamatan maupun pengalaman pribadi. Latar belakang masalah harus diuraikan secara jelas, faktual dan logis dengan didukung oleh data-data lapangan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul/ atau variabel penelitian.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah.

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk

definisi konsep dan definisi operasional. Kalimat yang digunakan yaitu kalimat pertanyaan.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.

1.6. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi sehingga peneliti memiliki konsep penelitian yang jelas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian.

2.3. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesisnya. Kerangka berpikir juga dapat dilengkapi dengan sebuah bagan.

2.4. Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan perkiraan awal peneliti terhadap suatu masalah yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang pendekatan penelitian atau metode yang digunakan dalam penelitian.

3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Bagian ini menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3. Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian serta alasan memilihnya.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur.

3.5. Instrumen Penelitian

Menjelaskan mengenai instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan dalam penelitian tersebut.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan pengamatan berpartisipatif, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan visual. Analisis data dilakukan melalui pengkodean dan pengkodean data, reduksi data, triangulasi, penulisan laporan hasil dan keabsahan data.

3.8. Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan.

4.3. Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan penelitian juga harus sejalan dengan permasalahan penelitian.

5.2. Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dimuat daftar-daftar referensi yang dipergunakan di dalam penelitian.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan lampiran-lampiran yang terkait selama proses penelitian dan tersusun secara berurutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam penelitian di ruang lingkup ilmu administrasi publik tidak terlepas dari studi kebijakan publik. Hal itu kemudian akan dijabarkan pengertiannya oleh beberapa tokoh atau para ahli yang memahami kebijakan publik.

Menurut Dye dalam Agustino (2016:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut “*What governments do, why they do it, and what difference it makes*”. Merujuk dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*).

Sementara itu Anderson dalam Agustino (2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*”. Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang

diperhatikan. Kemudian menurut Anderson dalam Winarno (2013:23) bahwa konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut William I. Jenkins dalam Agustino (2016:17) yaitu sebagai berikut:

“... a set interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”

William I. Jenkins dalam Agustino (2016:17) memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses tidak seperti Dye yang menilainya sebagai pilihan pemerintah. Jenkins menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai ‘serangkaian

keputusan yang saling berhubungan.’ Dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Kemudian Easton dalam Agustino (2016:16) memaknai kebijakan publik sebagai berikut “... *the impact of government activity*.” Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya.

Theodoulou dalam Agustino (2016:18) memberikan pendapatnya mengenai kebijakan publik yang dimana Theodoulou menyatakan bahwa kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti “... *resolving conflict over scarce resources, regulating behavior, motivating collective action, protecting rights, and directing benefits toward the public interest*. ”. Dalam kata lain, kebijakan mestinya dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya. Ini semua harus dilakukan oleh kebijakan publik, karena inilah tugas penting dari sebuah negara.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri, dkk (2016: 1.8) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato

dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Menurut Eystone dalam Wahab (2012:13) bahwa kebijakan publik ialah *“the relationship of governmental unit to its environment”* (antar hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Wilson dalam Wahab (2012:13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen).”

Kebijakan publik ialah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Udoji dalam Wahab (2012:15), mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.”*. Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kemudian menurut Lemiux dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut *“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are*

structured. The entire process evolves over time.”. Kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2010:44) berikut beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian kebijakan publik, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang dimana biasanya kebijakan itu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk

mengatur suatu hal. Dalam pembuatan kebijakan publik juga harus melihat dari berbagai macam aspek baik sosial, agama maupun kebudayaan agar kebijakan yang dibuat tidak bersinggungan dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Sehingga kebijakan yang dibuat juga dapat bermanfaat untuk publik. Kebijakan publik ini berlaku untuk seluruh masyarakat sehingga setiap kebijakan yang ada perlu dipatuhi oleh masyarakat.

2.2. Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Menurut Mulyadi dalam bukunya (2016:113), bahwa evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju.

Menurut Winarno (2013:228-229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam sebuah proses kebijakan. Menurut Lester dan Stewart dalam Mulyadi (2016:86) menyatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam Mulyadi (2016:85), yaitu berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Menurut Dunn (2003: 609) dalam bukunya terdapat tiga fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi para *decision-makers*. Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Kemudian ketiga yaitu evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun rekomendasi kebijakan. Kemudian Dunn dalam bukunya (2003:610)

juga menjelaskan kriteria-kriteria yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan.

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn (2003: 610)

Dunn dalam Abidin (2012:168) menjelaskan empat dimensi dari evaluasi akhir yaitu:

a. *Value Focus*

Evaluasi dimensi ini memusatkan perhatiannya pada nilai atau kepatutan dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan.

b. *Fact Value Interdependence*

Evaluasi dimensi ini menunjukkan di satu pihak evaluasi memberi tekanan yang sama antara fakta dan nilai. Di lain pihak tingkat keberhasilan suatu kebijakan dinilai tidak hanya dari manfaat bagi seseorang atau suatu masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya dalam memecahkan masalah tertentu.

c. *Present and Past Orientation*

Evaluasi dimensi ini tidak hanya berorientasi pada orientasi saat ini sekarang, namun pada nilai masa lampau pula. Dalam hal ini evaluasi tidak sama dengan rekomendasi yang berorientasi pada nilai yang akan datang.

d. *Value Duality*

Evaluasi dimensi mempunyai dua posisi, sebagai tujuan dan juga sebagai alat. Sebagai tujuan, evaluasi menghasilkan penilaian atas apa yang telah dicapai. Sebagai alat, evaluasi merupakan sarana untuk membuat rekomendasi. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit dibayangkan dapat dibuat rekomendasi yang tepat.

Model evaluasi kebijakan publik lain yaitu dikembangkan oleh Agustino (2016:180) yang terdiri dari lima kriteria, yaitu:

1. SDA (Sumber Daya Aparatur)

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudian dievaluasi hasilnya amat ditentukan oleh SDA. Ketika evaluator hendak melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejauhmana mereka mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan. Jika aparatur tidak mengerti dan memahami atas tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu tugas, maka dapat dipastikan hasil evlausi tidak akan berbuah positif.

2. Kelembagaan

Dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Keberhasilan suatu negara untuk berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang kaya, kecanggihan teknologi, iklim yang mendukung, atau lainnya, tetapi lebih dikarenakan oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit-elit politik (atau dalam hal ini oleh para pengambil keputusan).

3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Misalnya, mengapa Indonesia kurang berhasil menarik investor asing untuk menanamkan modalnya disini, boleh jadi ketika dilakukan evaluasi ada banyak sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan jalan dan jembatan guna mengangkut hasil produksi barang-barang industri mereka, kestabilan listrik, pelabuhan laut dan udara sesuai untuk digunakan bagi memasarkan barang-barang produksi mereka, dan banyak lagi.

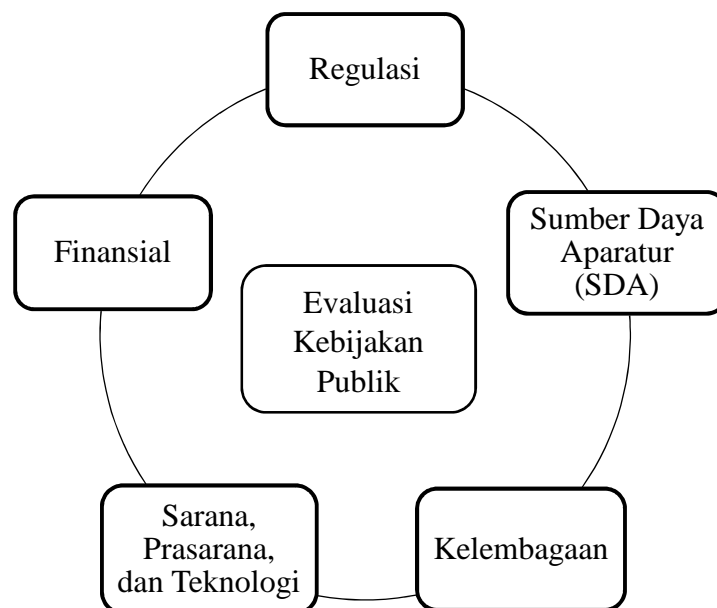
4. Finansial

Dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan.

5. Regulasi (Pendukung)

Suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Pada era Orde Baru, suatu kebijakan selalu didukung oleh Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subyek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut.

Gambar 2.1
Model Evaluasi Kebijakan Publik Leo Agustino



Sumber: Agustino (2016:180)

Model evaluasi selanjutnya yaitu model evaluasi responsif dikembangkan oleh Robert Stake. Menurut Stake dalam Wirawan (2011:89), evaluasi disebut responsif jika memenuhi tiga kriteria yaitu lebih berorientasi secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program, merespons kepada persyaratan

kebutuhan informasi dari audiens, dan perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program.

Proses model evaluasi responsif meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluator mengidentifikasi jenis dan jumlah setiap pemangku kepentingan. Jika jenisnya terlalu banyak, maka harus dirangking berdasarkan pentingnya setiap pemangku kepentingan bagi program.
2. Melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan. Evaluator dapat mengunjungi sampel pemangku kepentingan secara langsung dan berbincang-bincang dengan mereka atau mengumpulkan mereka di suatu tempat. Dengar pendapat merupakan bagian dari penelitian terdahulu.
3. Menyusun proposal evaluasi. Proposal evaluasi disusun dengan memperhatikan pendapat para pemangku kepentingan. Misalnya, pernyataan evaluasi dan jenis informasi yang akan dijaring memperhatikan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan mengenai program.
4. Melaksanakan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi disamping harus melakukan komunikasi dengan pimpinan dan staf program, evaluator harus juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
5. Membahas hasil evaluasi dengan para pemangku kepentingan. Draf hasil evaluasi dibahas dengan pimpinan dan staf proyek juga dibahas dengan pemangku kepentingan. Masukan, kritik, dan saran dari mereka sebanyak mungkin harus diperhatikan. Akan tetapi, dapat terjadi para pemangku kepentingan mempunyai pendapat yang bertentangan dan tak mungkin disatukan. Dalam keadaan seperti ini evaluator dapat menekankan pada salah satu pemangku kepentingan yang dominan jumlahnya, akan tetapi juga menguraikan pendapat yang lainnya.
6. Pemanfaatan hasil evaluasi. Evaluator mendorong para pemangku kepentingan untuk menerima dan memanfaatkan hasil evaluasi.

Menurut Stufflebeam dalam Wirawan (2011:92) bahwa evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan mengorganisasi

dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensistensikan informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi. Stufflebeam dalam Wirawan (2011:92) juga mengembangkan model evaluasi yang dikenal dengan evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP yaitu, model evaluasi *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP) mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model evaluasi CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi:

1. Evaluasi Konteks

Menurut Stufflebeam, evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan? Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

2. Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang harus dilakukan? Evaluasi ini mengidentifikasi dan problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi *cost effectiveness* untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para

pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas, dan penganggaran.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan? Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

4. Evaluasi Produk

Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: *did it succeed?* Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.

Jones dalam Agustino (2016:165) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

“.. evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of the recommendation.”

Pemahaman evaluasi kebijakan yang diutarakan oleh Jones menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk yang mencakup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya.

Menurut Parsons dalam Agustino (2016:168) menjelaskan definisi evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

“Evaluation and analysis covers a wide range of activities designed to support the ongoing decision making process. These activities include reviews known as program charting, budget examination, management analysis, planning, institutional research, program budgeting system analysis, engineering, economic analysis, program evaluation, policy analysis, cost benefit analysis, etc.”

Berdasarkan pendapat tersebut evaluasi dan analisis meliputi serangkaian kegiatan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kegiatan tersebut meliputi pengkajian pemetaan program, pengujian anggaran, analisis pengelolaan, riset kelembagaan, penganggaran program, analisis sistem, pemenuhan sarana dan prasarana, analisis ekonomi, evaluasi program dan kebijakan, analisis manfaat biaya dan sebagainya. Kemudian uraian yang telah dipaparkan Parsons tersebut dikembangkan oleh Holde dan Zimmerman, dimana evaluasi dimaknai sebagai berikut:

“... efforts often face an uphill battle, from gaining agreement to undertake the evaluation, through planning and conducting the evaluation, to using the results. Much can go wrong during the process of evaluation.”

Pandangan Holden dan Zimmerman menekankan bahwa upaya evaluasi kebijakan sering menghadapi suatu perjuangan yang cukup berat, dimulai dari

persetujuan untuk merencanakan evaluasi hingga menerapkan hasil evaluasi dimana banyak kesalahan yang diperbuat selama melakukan proses evaluasi tersebut.

Adapun menurut Nugroho dalam Agustino (2016:169) menjelaskan evaluasi sebagai proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Definisi yang dipaparkan oleh Riant Nugroho tersebut sebenarnya sudah dituangkan sebelumnya oleh Dye yang mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai berikut “... *is learning about the consequences of public policy.*” Definisi tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Dalam konteks ini adalah penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari tujuan yang diinginkannya. Dengan demikian evaluasi berkenaan dengan tujuan kebijakan meskipun tidak selalu diketahui tujuan-tujuan kebijakan tertentu atau beberapa program yang saling bertentangan tujuannya. Terkait dengan kemungkinan tidak stabilnya tujuan-tujuan kebijakan, Dye dalam Agustino (2016:169) mengajukan alternatif evaluasi dampak kebijakan yang mencakup pada:

1. *Impact on the target situation or group*
2. *Impact on situations or groups other than the target (spillover effects)*
3. *Impact on future as well as as immediate conditions*
4. *Direct cost, in terms of resources devoted to the program*
5. *Indirect cost, including loss of opportunities to do other things*

Menurut Muhadjir dalam Widodo (2006:112), evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh

dengan tujuan dan/atau terget kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*inpacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan.

Menurut Weiss dalam Agustino (2016:166), memandang evaluasi sebagai:

“...an elastic word that stretches to cover judgments of many kinds. What all the uses of the word have in common is the nation of judging merit. Someone is examining and weighing a phenomenon (a person, a thing, an idea) some explicit or implicit yardstick.”

Pandangan yang telah dikemukakan Weiss tersebut menekankan bahwa evaluasi merupakan istilah yang menggambarkan tindakan penilaian sebuah kemanfaatan atau keunggulan dari sebuah gagasan atau ide baik eksplisit maupun implisit. Kemudian kajian klasik Tripodi dalam Agustino (2016:166), mengartikan evaluasi kebijakan sebagai sebuah proses penilaian capaian dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Weiss dalam Widodo (2016:114) juga memberikan pendapatnya mengenai evaluasi kebijakan, dimana Weiss menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan sebagai berikut:

“The purpose of evaluation research is to measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming.”

Riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang. Bertumpu pada uraian

tersebut, evaluasi kebijakan publik menurut Weiss mengandung beberapa unsur penting, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
2. Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.

Menurut Anderson dalam Winarno (2013:234) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Kalimat “usaha untuk menentukan” digunakan karena evaluasi dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan, suatu tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit. Kemudian evaluasi tentang dampak kebijakan merupakan salah satu dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian evaluasi kebijakan, maka peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas untuk menilai manfaat dari adanya kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah dapat mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut berpengaruh dalam suatu keadaan. Adanya evaluasi kebijakan juga dapat terlihat apakah suatu kebijakan bermanfaat untuk masyarakat atau bahkan menimbulkan hal negatif di masyarakat. Evaluasi kebijakan sangat

diperlukan agar pemerintah dapat segera bertindak untuk menangani jika kebijakan yang diterapkan tidak berhasil. Dengan adanya evaluasi kebijakan ini juga dapat memperbaiki agar kebijakan yang dibuat dapat lebih baik untuk dapat diterapkan dalam masyarakat.

2.3. Pengertian Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdapat pada pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kemudian dalam peraturan yang sama pada ayat 15 juga menjelaskan bahwa Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari penjelasan tersebut maka permukiman kumuh merupakan suatu kawasan yang memiliki kepadatan cukup tinggi, rata-rata masyarakatnya berstatus ekonomi rendah, kemudian juga prasarana yang tersedia di lingkungan tersebut tidak memadai untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Suatu kawasan permukiman disebut sebagai permukiman kumuh jika mempunyai permasalahan yang ada didalam indikator kumuh sebagai berikut:

- a. Kondisi bangunan ditinjau dari keteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan persyaratan teknis bangunan
- b. Kondisi jalan lingkungan yang ditinjau dari cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur
- c. Kondisi drainase lingkungan yang ditinjau dari cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur

- d. Kondisi penyediaan air minum cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur
- e. Kondisi pengelolaan limbah cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur
- f. Kondisi pengelolaan sampah ditinjau dari cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur
- g. Kondisi pengaman kebakaran ditinjau dari cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur
- h. Ketersediaan ruang terbuka hijau ditinjau dari cakupan pelayanan dan kondisi/kualitas infrastruktur.

2.4. Pengertian *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* (NUSP-2)

Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2 merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Pelaksanaan NUSP-2 menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat kota. Konsep pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, karena didalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan, serta mengoperasikan dan memelihara hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, membutuhkan keterlibatan dan peran serta yang sangat besar dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam NUSP-2 merupakan serangkaian upaya terencana dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran kritis masyarakat didalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya

secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu, masyarakat perlu diberdayakan dan diorganisasikan, karena keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara terorganisasi akan memberikan suatu sumber daya atau kekuatan yang luar biasa.

Secara umum tujuan pelaksanaan NUSP-2 adalah untuk menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta kelompok peduli dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Secara khusus tujuan pelaksanaan NUSP-2 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mengurangi proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan
- b. Memfasilitasi kelompok masyarakat miskin didalam pengadaan hunian yang layak dan terjangkau melalui pemabangunan kawasan permukiman baru
- c. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat didalam menyusun perencanaan pembangunan kota secara partisipasif dengan penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat
- e. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif.

Berikut merupakan lokasi sasaran program NUSP-2 adalah kelurahan yang dinilai telah memenuhi beberapa syarat dan kriteria sebagai berikut:

- a. Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan SPPIP
- b. Memiliki kepadatan penduduk tinggi dan merupakan kawasan kumuh perkotaan
- c. Lokasi/kawasan kumuh sasaran ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota

- d. Pernyataan minat warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan NUSP-2
- e. Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik, termasuk kontribusi dalam bentuk *in-kind*
- f. Kesiediaan masyarakat untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun, termasuk kesiediaan membayar iuran/retribusi
- g. Kesiediaan membentuk lembaga keswadayaan masyarakat bilamana belum terbentuk BKM di lokasi tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi dan jurnal penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya, diantaranya:

Pertama, Muhammad Irfan Nawawi dalam bentuk skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2018 yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut ialah pembangunan prasarana dari program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Teori yang digunakan yaitu teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dengan ukuran efektivitas, diantaranya (1) Kejelasan tujuan yang dihendak dicapai,, (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, (4) Perencanaan yang matang, (5)

penyusunan program yang tepat, (6) tersedianya sarana dan prasarana, dan (7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu bahwa efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasaran program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* di Kelurahan Terondol sudah cukup efektif karena mencapai angka 68% melebihi angka yang dihipotesiskan yaitu sebesar 65%. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian mengenai program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2*. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian ini adalah perbedaan pada teori yang digunakan, dalam penelitian ini digunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson yang terdiri dari 7 indikator sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori model evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn yang terdiri dari 6 indikator. Kemudian perbedaan juga terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Emi Marta Sari dalam bentuk skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2016 yang berjudul Implementasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2)* di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu mengenai pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2*

dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu bahwa sumber dalam program NUSP-2 belum dapat berjalan efektif karena masih kurangnya sumber daya yang membantu dalam program ini, namun aparat yang terlibat sudah dapat dikatakan efektif karena sudah tanggap dalam menangani situasi di lapangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitian mengenai program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* dan juga kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu teori yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu teori model implementasi kebijakan publik George C. Edwards II yang terdiri dari 4 indikator yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur organisasi.

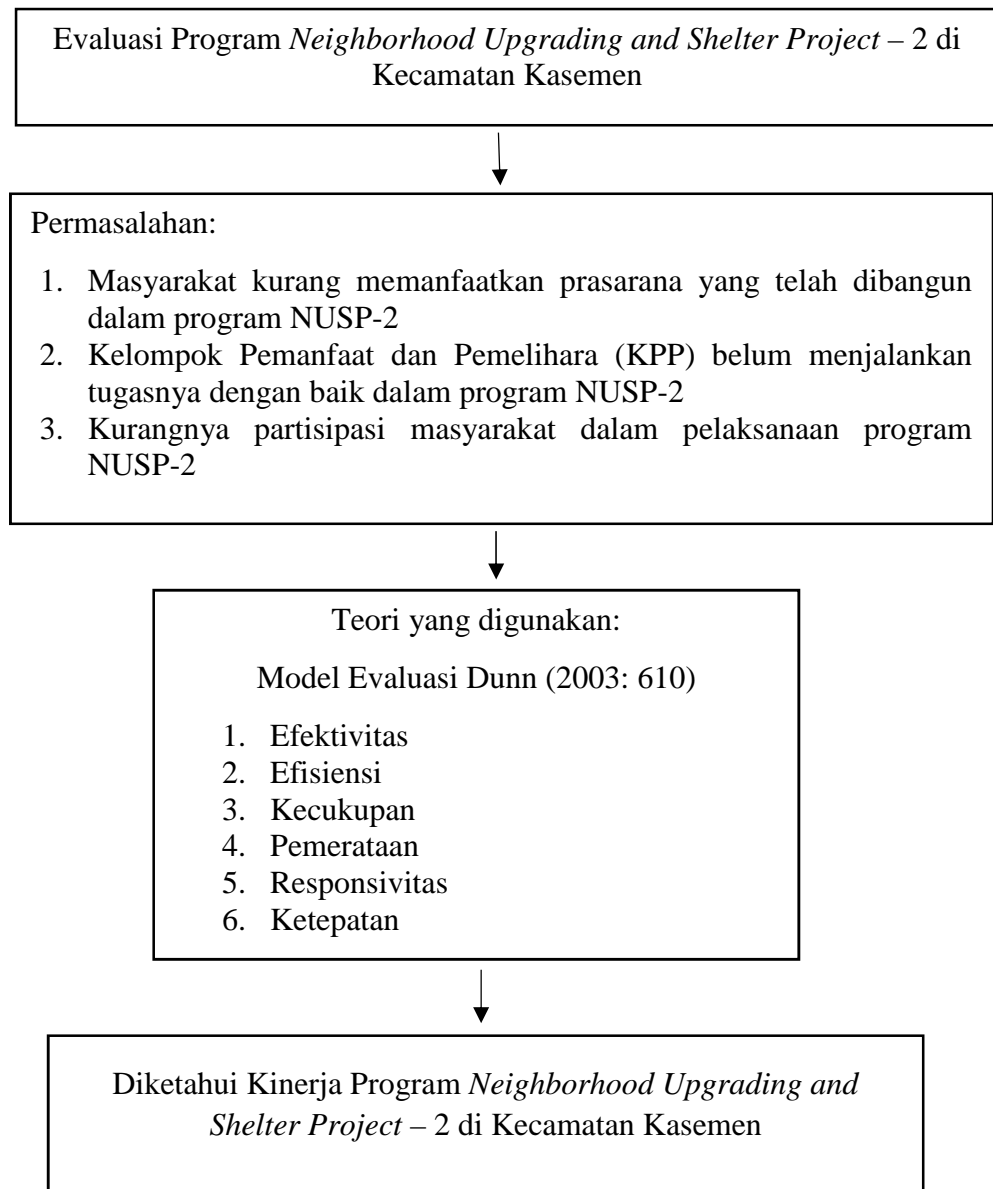
2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur berfikir dalam sebuah penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Berdasarkan dari permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi dan wawancara langsung maka teori yang digunakan sebagai pijakan peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul *Evaluasi Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen, maka peneliti menggunakan teori dari model evaluasi yang

dikemukakan oleh Dunn (2003: 610) yaitu, (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan.

Penulis menggunakan teori model evaluasi Dunn tersebut karena teori tersebut dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen. Dimana dalam teori model evaluasi Dunn ini terdapat 6 indikator yang dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* baik dari saat program dilaksanakan maupun saat program selesai dilaksanakan. Sehingga teori tersebut dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen. Maka kerangka berfikir yang dibuat oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti, 2019)

2. 7 Asumsi Dasar

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada wawancara awal, dokumentasi dan observasi awal terhadap objek penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project- 2* di Kecamatan Kasemen adalah belum berjalan optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian “Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen” adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:1) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif dalam sisi lain didefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Menurut Meleong (2016:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2016:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kemudian menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

3.2. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah terhadap Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Dimana dilakukan usaha untuk menangani permasalahan kawasan permukiman kumuh di perkotaan salah satunya yang terjadi di Kota Serang maka dilaksanakan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*. *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* merupakan program penanganan kawasan permukiman kumuh

di perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat miskin. Terdapat 7 kelurahan di Kota Serang yang menjadi sasaran program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2* yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Serang. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terdapat di Kecamatan Kasemen Kota Serang yang terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi konsep ini sebagai penegasan dalam konsep-konsep yang akan digunakan oleh peneliti agar tidak menjadi bias atau memiliki makna yang berbeda antara pembaca dan penulis. Maka, konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016:85) bahwa evaluasi kebijakan yaitu benm rkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran
2. Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan

yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Pelaksanaan NUSP-2 menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat kota.

3.4.2. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini yaitu evaluasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project- 2* di Kecamatan Kasemen. Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengevaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen maka teori yang digunakan untuk mengevaluasi program tersebut yaitu teori model evaluasi yang dikemukakan Dunn (2003: 610) yaitu (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan.

1. Efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan telah dicapai.
2. Efisiensi, yaitu mengenai seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, yaitu mengenai apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, yaitu mengenai apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

6. Ketepatan, yaitu mengenai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan benar-benar berguna atau bernilai.

3.5. Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedudukan peneliti sebagai instrumen penelitian yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Sebagai instrumen penelitian maka peneliti harus memiliki beberapa ciri berikut yaitu, responsif dimana seorang peneliti harus peka terhadap suatu fenomena yang terjadi di sekitarnya dan seorang peneliti harus memahami secara dalam mengenai fenomena yang terjadi. Kemudian peneliti harus mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan yang dimana seorang peneliti itu melakukan fungsinya sebagai pengumpul data dengan menggunakan berbagai metode yang sebelumnya telah dibekali pengetahuan dan latihan-latihan yang diperlukan. Dalam hal-hal tertentu peneliti sebagai instrumen penelitian harus memiliki kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.

Lalu sebagai peneliti harus dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, dimana peneliti sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden. Kemampuan lainnya yang ada peneliti adalah kemampuan mengikhtisarkan informasi yang begitu banyak diceritakan oleh responden dalam wawancara. Peneliti hendaknya memiliki kualitas pribadi sebagai berikut: toleran,

sabar, menunjukkan sikap empati, menjadi pendengar yang baik, manusiawi, bersikap terbuka, jujur, objektif, penampilan yang menarik, mencintai pekerja wawancara, senang berbicara, dan lain sebagainya. Seorang peneliti hendaknya selalu pergi kepada situasi baru untuk memperoleh pengalaman kemudian berusaha mencatat apa saja yang terjadi dan mewawancarai beberapa orang serta mencatat apa saja yang menjadi hasil pembicaraan (Moleong, 2016:163).

3.6. Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi hal yang sangat penting karena informan merupakan sumber data kualitatif. Teknik pengumpulan informan yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengumpulan informan yang dimana peneliti telah dapat mengetahui informan yang akan menjadi narasumber untuk melengkapi data terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menilai informan tersebut layak untuk menjadi sumber data karena peneliti menganggap bahwa informan tersebut berkaitan dan mengetahui hal-hal mengenai masalah tersebut. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Deskripsi Informan

No	Informan	Fungsi dan Peran	Keterangan
	Status/Jabatan		
1.	Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Warung Jaud	Pelaksana Tingkat Kelurahan	<i>Key Informan</i>
2.	Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kilasah	Pelaksana Tingkat Kelurahan	<i>Key Informan</i>

3.	Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Margaluyu	Pelaksana Tingkat Kelurahan	<i>Key Informan</i>
4.	Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kelurahan Warung Jaud	Pemelihara Prasarana	<i>Key Informan</i>
5.	Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kelurahan Kilasah	Pemelihara Prasarana	<i>Key Informan</i>
6.	Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kelurahan Margaluyu	Pemelihara Prasarana	<i>Key Informan</i>
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Serang	Pelaksana Tingkat Kota	<i>Secondary Informan</i>
8.	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang	Penanggung Jawab Administrasi dan Pelaksana Tingkat Kota	<i>Secondary Informan</i>
9.	Lurah Warung Jaud	Penanggung Jawab Administrasi Tingkat Kelurahan	<i>Secondary Informan</i>
10.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah	Penanggung Jawab Administrasi Tingkat Kelurahan	<i>Secondary Informan</i>
11.	Staff Kesejahteraan Sosial Kelurahan Margaluyu	Penanggung Jawab Administrasi Tingkat Kelurahan	<i>Secondary Informan</i>
12..	Tokoh Masyarakat Kelurahan Warung Jaud	Pengguna Prasarana	<i>Secondary Informan</i>
13.	Tokoh Masyarakat Kelurahan Kilasah	Pengguna Prasarana	<i>Secondary Informan</i>
14.	Tokoh Masyarakat Kelurahan Margaluyu	Pengguna Prasarana	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, tahun 2019)

3.7. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

3.7.1. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data

yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audiovisual, misalnya teleskop dan handycam. Namun yang terakhir ini dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesungguhnya observasi adalah pengamatan langsung pada “*natural setting*” bukan setting yang sudah direkayasa. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian (Satori dan Komariah, 2010:105).

2. Wawancara

Wawancara dalam Moleong (2016: 186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain,

baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Adapun pedoman wawancara pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pedomana Wawancara

No.	Indikator Teori	Kisi-Kisi Perntanyaan	Informan
1.	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kecamatan Kasemen sesuai tujuan 2. Pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen sesuai dengan pedoman umum 3. Waktu pelaksanaan pembangunan prasarana program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen sesuai dengan ketentuan 4. Hambatan dalam pelaksanaan program NUSP-2 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Serang
2.	Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen 2. Masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah prapembangunan yang dilakukan oleh badan keswadayaan masyarakat 3. Iuran prasarana masyarakat sesuai dengan kesepakatan saat musyawarah 4. Badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara Kecamatan Kasemen mengikuti pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> c. Pihak Kelurahan d. Badan Keswadayaan Masyarakat e. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara f. Masyarakat
3.	Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara Kecamatan Kasemen berkompetensi dalam pelaksanaan program NUSP-2 2. Pemilihan pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara Kecamatan Kasemen sesuai dengan pedoman umum 3. Terdapat dokumen untuk tata cara 	

		pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana 4. Pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara Kecamatan Kasemen memiliki dokumen terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan program NUSP-2	
4.	Pemerataan	1. Pelaksanaan program NUSP-2 tepat di lingkungan tersebut (Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu) 2. Kondisi masyarakat di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu 3. Masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah disediakan	
5.	Responsivitas	1. Masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2 2. Prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri 3. Pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara Kecamatan Kasemen menjalankan tugasnya sesuai pedoman umum 4. Kerusakan prasarana program NUSP-2 cepat ditangani	
6.	Ketepatan	1. Manfaat adanya program NUSP-2 2. Program NUSP-2 merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu	

(Sumber: Peneliti, tahun 2019)

3. Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir. Studi dokumentasi dalam penelitian

kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen terkait dengan fokus penelitian (Satori dan Komariah, 2010: 148).

3.7.2. Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2016: 330). Triangulasi dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif (Moleong, 2016: 330) .
- b. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Satori dan Komariah, 2010: 171).

- c. Triangulasi waktu, menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Misalnya peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa mengulanginya di pagi hari dan mengeceknya kembali di siang hari atau sebaliknya dimulai pagi dicek siang dan dikontrol lagi sore atau malam (Satori dan Komariah, 2010: 171).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dimana peneliti dalam menggunakan triangulasi sumber, peneliti akan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian dalam triangulasi teknik, peneliti akan mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah menyepakati data yang diberikan berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. *Member check* dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. Hal tersebut dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Dalam diskusi peneliti menyampaikan temuan kepada pemberi data. Data yang disampaikan

peneliti mungkin ada yang dikurangi, ditambah, disepakati, atau ditolak. Untuk kelengkapan bukti kepercayaan, peneliti perlu mendokumentasikan moment ini dan membuat *formal administrative* sebagai kelengkapan administratif penelitian (Satori dan Komariah, 2010: 172).

3.7.3. Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2016: 280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Kemudian Bogdan dan Taylor juga mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu (Moleong, 2016: 280). Menurut Miles dan Huberman (2009:16) aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pertama dalam analisis data. Tahapan pertama pengumpulan data ini meliputi pengkodean, pembuatan memo, dan berbagai macam teknik ringkasan data.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Alur penting selanjutnya dari kegiatan analisis yaitu penyajian data. Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Seperti yang akan kita lihat misalnya terdapat banyak lembar catatan lapangan, hal tersebut menunjukkan tidak praktis. Dalam kondisi tersebut, peneliti

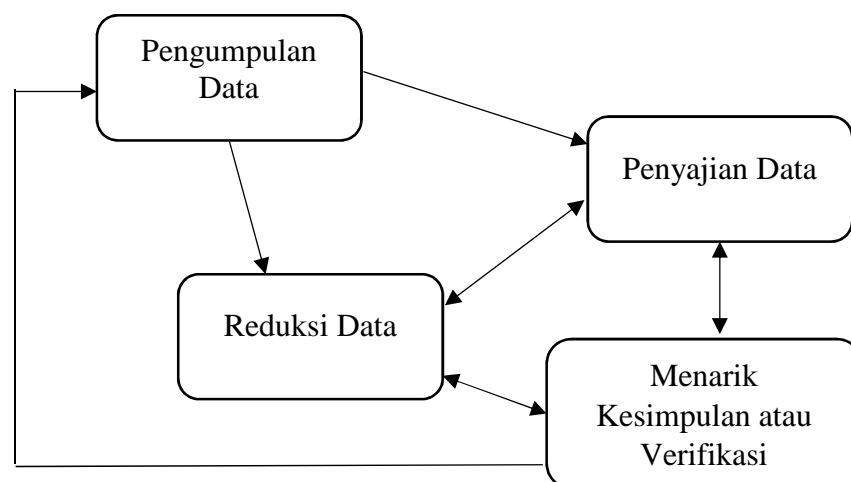
mudah tergelincir untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah mengambil kesimpulan yang memihak dan tersekat-sekat. Hal seperti itulah yang harus dihindari oleh peneliti agar suatu penelitian memiliki informasi yang valid.

d. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kegiatan analisis yang ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif.

Gambar 3.1

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman (2009:20)

3.8. Jadwal Penelitian

No	Waktu Kegiatan	2018				2019				
		Septem ber	Oktober	Nove mber	Desem ber	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pengumuman judul penelitian									
2	Observasi awal									
3	Bimbingan BAB I – BAB III									
4	Seminar Proposal									
5	Revisi Proposal									
6	Penelitian Lapangan									
7	Bimbingan BAB IV – BAB V									
8	Sidang Skripsi									
9	Revisi Skripsi									

(Sumber: Peneliti, tahun 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Serang, khususnya lokasi penyelenggaraan Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2* di Kecamatan Kasemen. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Serang

Kota Serang merupakan salah satu kota dari 8 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Banten. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Kota Serang terletak di sebelah utara Provinsi Banten. Posisi Kota Serang secara geografis terletak diantara 5°99'-6°22' Lintang Selatan dan 106°07'-106°25' Bujur Timur. Pembentukan Kota Serang tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi banten. Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang, terbentuk secara resmi pada tanggal 2 November 2007 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007

kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748 tanggal 10 Agustus 2007.

Berdasarkan posisi geografisnya di sebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang. Kota Serang sebagai daerah alternatif dan penyangga ibukota negara karena jarak Kota Serang dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. Ibu kota dari Kota Serang yaitu Kecamatan Serang. Kecamatan terbesar dengan luas wilayah sebesar 63,36 km² yaitu Kecamatan Kasemen dan untuk kecamatan terkecil dengan luas wilayah sebesar 25,88 km² yaitu Kecamatan Serang. Luas wilayah Kota Serang seluas 266,74 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan, 67 Desa/Kelurahan. Berikut tabel dari luas masing-masing kecamatan yang terdapat di Kota Serang.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Kelurahan
1	Curug	49.60	10
2	Walantaka	48.48	14
3	Cipocok Jaya	31.54	8
4	Serang	25.88	12
5	Taktakan	47.88	13
6	Kasemen	63.36	10
Kota Serang		266,74	67

(Sumber: Kota Serang Dalam Angka 2018)

Kota Serang memiliki Visi “Terwujudnya Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya”. Dengan Misi yaitu: 1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-

Nilai Kemanusiaan, 2. Meningkatkan sarana prasarana daerah yang Berwawasan Lingkungan, 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing, dan 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tabel 4.2
Keluarga Miskin di Kota Serang Tahun 2017

No	Kecamatan	Fakir Miskin/ Keluarga Miskin
1	Curug	1.858
2	Walantaka	1.830
3	Cipocok Jaya	1.994
4	Serang	2.847
5	Taktakan	1.637
6	Kasemen	6.224
Kota Serang		16.390

(Sumber: Kota Serang Dalam Angka 2018)

Dari tabel diatas mengenai keluarga miskin yang terdapat di Kota Serang juga dapat terlihat bahwa jumlah fakir miskin atau keluarga miskin tertinggi terdapat di Kecamatan Kasemen dengan jumlah mencapai 6.224. kemudian untuk jumlah keluarga miskin terendah terdapat di Kecamatan Taktakan dengan jumlah 1.637. Dari tabel diatas juga kita dapat mengetahui bahwa Kecamatan Kasemen merupakan Kecamatan yang memerlukan perhatian lebih karena angka keluarga miskin yang sangat tinggi. Angka kemiskinan juga hampir selaras dengan kondisi permukiman di Kecamatan Kasemen maka tidak heran banyak program yang masuk ke Kecamatan Kasemen untuk dapat menangani permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kasemen. Dimana salah satunya yaitu program NUSP-2 agar masyarakat di

Kecamatan Kasemen dapat bertempat tinggal di wilayah yang terdukung dengan prasarana yang memadai.

4.1.2. Deskripsi Kecamatan Kasemen

Kecamatan Kasemen merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Serang. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan terluas yang ada di Kota Serang. Kecamatan Kasemen terletak pada jarak ± 9 Km dari ibukota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata 500-700 m dari permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan $\pm 7,52$ mm/tahun. Secara administratif wilayah Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 161 kampung/lingkungan, 70 Rukun warga (RW), 247 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 94.062 jiwa, yang terdiri dari 48.844 jiwa laki-laki, dan 45.218 jiwa perempuan. Pada Kecamatan Kasemen terdapat Cagar Budaya Banten Lama dan Cagar Alam Pulau Dua. Cagar Budaya Banten Lama ini merupakan tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari daerah Banten sendiri maupun dari luar daerah Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Kasemen sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Kecamatan Serang
- c. Barat : Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
- d. Timur : Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Kasemen



(Sumber: Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2018)

Kecamatan Kasemen memiliki luas wilayah 63,36 Km². Ibukota Kecamatan Kasemen yaitu Kelurahan Kasemen. Kecamatan Kasemen terdiri dari 10 kelurahan dengan kelurahan paling luas yaitu Kelurahan Sawah Luhur dan kelurahan paling sempit yaitu Kelurahan Mesjid Priyayi. Dimana hal tersebut sesuai dengan tabel 4.3 dibawah yang bersumber dari profil Kota Serang.

Tabel 4.3
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kasemen

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kasemen	8,48
2	Warung Jaud	3,83
3	Mesjid Priyayi	3,81
4	Bendung	5,43
5	Terumbu	7,48
6	Sawah Luhur	15,28
7	Kilasah	4,04
8	Margaluyu	5,31
9	Kasunyatan	5,80
10	Banten	7,06
Kecamatan Kasemen		63,36

(Sumber: Profil Kota Serang Tahun 2017)

4.1.3. Deskripsi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*

Neighborhood Upgrading and Shelter Project – 2 merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Pelaksanaan NUSP-2 menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat kota. Konsep pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, karena didalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan, serta mengoperasikan dan memelihara hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project– 2* memiliki visi dan misi dalam menjalankan program. Dengan visi yaitu “Terwujudnya pemerintah daerah yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.”. Untuk mencapai visi tersebut, maka didukung oleh misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan (*Slum Improvement Action Plan/SIAP*) yang visioner dan berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan.

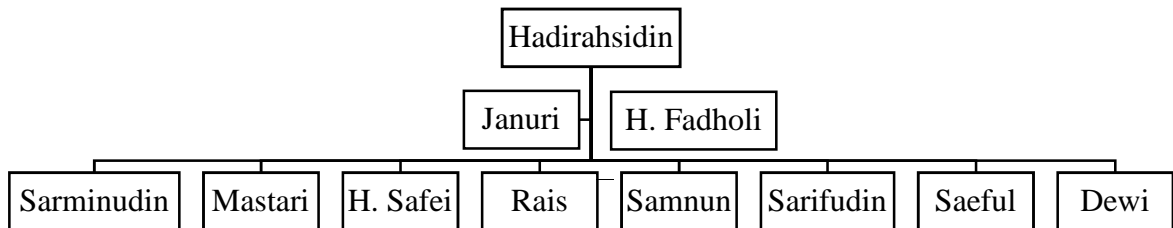
2. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bekerjasama secara sinergi memperbaiki lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapat perumahan dalam lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan produktif.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat pemeliharaan keberlanjutan infrastruktur dasar lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya.

Tujuan dari adanya program NUSP-2 secara umum adalah untuk menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta kelompok peduli dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Secara khusus tujuan pelaksanaan NUSP-2 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mengurangi proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan
- b. Memfasilitasi kelompok masyarakat miskin didalam pengadaan hunian yang layak dan terjangkau melalui pemabangunan kawasan permukiman baru
- c. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat didalam menyusun perencanaan pembangunan kota secara partisipasif dengan penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat
- e. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif.

Dalam pelaksanaan program NUSP-2 ini masyarakat dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan keswadayaan masyarakat merupakan organisasi keswadayaan yang dipilih dan dibentuk masyarakat untuk melaksanakan tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan.

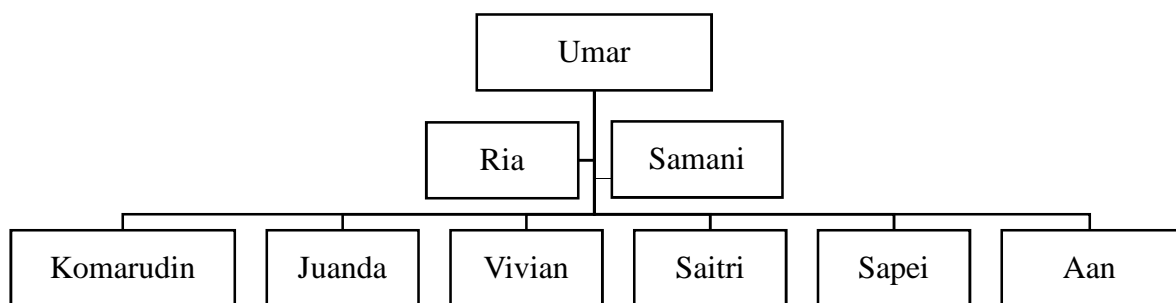
Gambar 4.2
Struktur Organisasi BKM Maju Bersama Kelurahan Kilasah



(Sumber: *Neighborhood Upgrading Action Plan* Kelurahan Kilasah tahun 2015)

Gambar 4.2 diatas merupakan struktur organisasi dari BKM Maju Bersama Kelurahan Kilasah yang dimana terdiri dari koordinator, sekretaris, bendahara, dan 8 anggota. Struktur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berjumlah ganjil. Kemudian berikut struktur organisasi BKM Anugrah Sentosa, yaitu:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi BKM Anugrah Sentosa Kelurahan Margaluyu

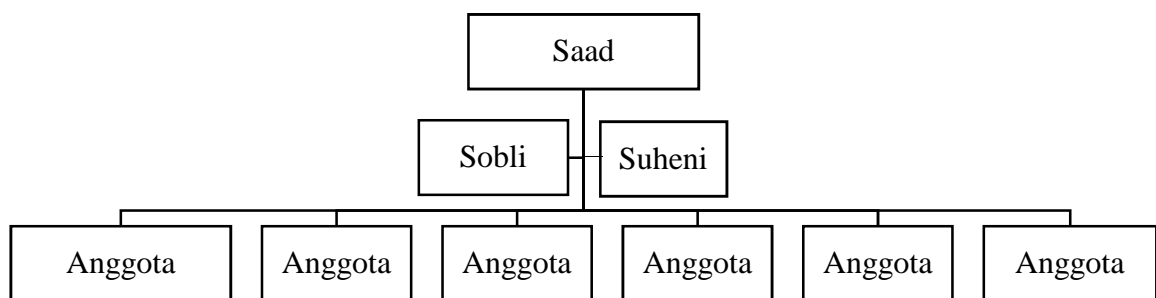


(Sumber: *Neighborhood Upgrading Action Plan* Kelurahan Margaluyu tahun 2015)

Gambar 4.3 diatas merupakan struktur organisasi dari BKM Anugrah Sentosa Kelurahan Margaluyu yang dimana terdiri dari koordinator,

sekretaris, bendahara, dan 6 anggota. Dalam BKM Anugrah Sentosa terdapat 3 perempuan. Struktur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berjumlah ganjil. Kemudian berikut struktur organisasi BKM Al-Ikhlas Kelurahan Warung Jaud, yaitu:

Gambar 4.4
Struktur Organisasi BKM Al-Ikhlas Kelurahan Warung Jaud



(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana NUSP-2 Kelurahan Warung Jaud tahun 2017)

Gambar 4.4 diatas merupakan struktur organisasi dari BKM Al-Ikhlas Kelurahan Warung Jaud yang dimana terdiri dari koordinator, sekretaris, bendahara, dan anggota. Keanggotaan BKM berjumlah ganjil yang terdiri antara 9 sampai 13 orang. BKM dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat di kelurahan tersebut dan diresmikan melalui pencatatan pada notaris dalam bentuk akta notaris.

Adanya BKM ini berfungsi untuk sebagai pusat pengambilan keputusan, yang adil dan demokratis, pusat pengendalian pembangunan, sarana informasi dan komunikasi, pusat advokasi integrasi kebutuhan program masyarakat dengan kebijakan atau program pemerintah setempat.

Dalam BKM tidak mengenal hirarki, tiap anggota memiliki hak yang sama, oleh karena itu semua keputusan dilakukan secara kolektif dan koordinator BKM tidak dapat mengambil keputusan sendiri dengan mengatas namakan BKM. Adanya koordinator BKM agar dapat mengkoordinir para anggotanya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Berikut BKM yang terdapat di Kelurahan Kilasah bernama BKM Maju Bersama yang dibentuk pada tanggal 30 November 2009. BKM Maju Bersama ini beranggotakan 11 orang dan telah disahkan pada notaris H.M. Islamsyah Arifin, SH dengan tanggal dan nomor pengesahan notaris 056/Leg/Not/XI/2009. Adapun susunan dari anggota BKM Maju Bersama Kelurahan Kilasah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Susunan Pengurus BKM Maju Bersama Kelurahan Kilasah

No	Nama Anggota Pimpinan Kolektif BKM	Jenis kelamin	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Jabatan dalam BKM
1	Hadirahsidin	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Koordinator
2	H. Fadholi	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Bendahara
3	Januri	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Sekretaris
4	M. Sarminudin	Laki-laki	SMP	Wiraswasta	Anggota
5	H. Mastari	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Anggota
6	H. Safei	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Anggota
7	Rais	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Anggota
8	Samnun	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Anggota
9	Sarifudin	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Anggota
10	Saeful Huda	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Anggota
11	Dewi Arifah	Perempuan	SMP	Ibu rumah tangga	Anggota

(Sumber: *Neighborhood Upgrading Action Plan* Kelurahan Kilasah tahun 2015)

BKM di Kelurahan Kilasah terdiri dari 11 anggota dimana terdapat koordinator, sekretaris, bendahara dan anggota. Masing-masing anggota

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Keanggotaan dalam BKM terdiri dari 10 laki-laki dan terdapat satu perempuan. Pada Kelurahan Margaluyu juga terdapat BKM yang dimana BKM tersebut bernama BKM Anugrah Sentosa disahkan pada notaris H.M. Islamsyah Arifin, SH. Adapun susunan pengurus BKM Anugrah Sentosa sebagai berikut:

Tabel 4.5
Susunan Pengurus BKM Anugrah Sentosa Kelurahan Margaluyu

No	Nama Anggota Pimpinan Kolektif BKM	Jenis kelamin	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Jabatan dalam BKM
1	Umar	Laki-laki	SLTA	Petani	Koordinator
2	Samani	Laki-laki	SLTP	Buruh	Bendahara
3	Ria Prihatin	Perempuan	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sekretaris
4	Komarudin	Laki-laki	SLTP	Buruh	Anggota
5	Juanda	Laki-laki	SLTA	Buruh	Anggota
6	Vivian Fandini	Perempuan	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Anggota
7	Satiri	Laki-laki	SD	Petani	Anggota
8	Sapei	Laki-laki	SLTA	Wiraswasta	Anggota
9	Aan.N	Perempuan	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Anggota

(Sumber: *Neighborhood Upgrading Action Plan* Kelurahan Margaluyu tahun 2015)

Pada susunan pengurus BKM Kelurahan Margaluyu terdapat kordinator dan anggota. Dalam kepengurusan BKM Anugrah Sentosa hanya beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Pengurus memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda paling tinggi yaitu SMA dan paling rendah SD. Pada Kelurahan Warung Jaud juga terdapat BKM yang dimana BKM tersebut bernama BKM Al- Ikhlas. Adapun susunan pengurus BKM Al- Ikhlas Kelurahan Warung Jaud sebagai berikut:

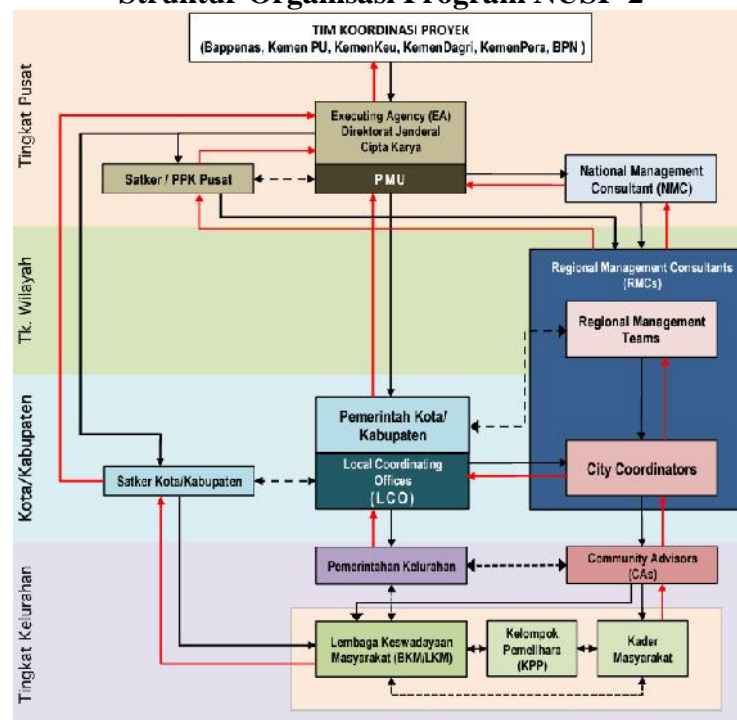
Tabel 4.6
Susunan Pengurus BKM Al-Ikhlas Kelurahan Warung Jaud

No	Nama Anggota Pimpinan Kolektif BKM	Jenis kelamin	Jabatan dalam BKM
1	Saad	Laki-laki	Koordinator
2	Suheni	Laki-laki	Bendahara
3	Sobli	Laki-laki	Sekretaris

(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana NUSP-2 Kelurahan Warung Jaud tahun 2017)

Pada susunan pengurus BKM Kelurahan Warung Jaud terdapat koordinator dan anggota. Dalam kepengurusan BKM Al-Ikhlas terdapat koordinator, bendahara dan juga sekretaris. Dalam pelaksanaan program NUSP-2 ini juga melibatkan berbagai instansi baik dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan. Berikut merupakan struktur organisasi program NUSP-2.

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Program NUSP-2



(Sumber: Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* Tahun 2013)

Berdasarkan struktur organisasi tersebut bahwa organisasi pelaksana yang terdapat pada tingkat pusat yaitu Tim Koordinasi Proyek yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perumahan Rakyat dan Badan Pembangunan Nasional, kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai *Executing Agency* (EA) yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan proyek, dan satuan kerja pusat yang bertugas untuk membantu PMU dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administratifnya. Pada tingkat kota/kabupaten terdapat pemerintah kota/kabupaten, *Local Coordinating Office* (LCO), dan satuan kerja tingkat kota/kabupaten. Kemudian pelaksana pada tingkat kelurahan yaitu pemerintah kelurahan, badan keswadayaan masyarakat, kelompok pemanfaat dan pemelihara, dan kader masyarakat. Dimana kader masyarakat merupakan para pekerja yang ikut melaksanakan pembangunan prasarana tersebut, dan unit pengelola lingkungan. Pelaksana pada tingkat kelurahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam program NUSP-2, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan

Pengelolaan pelaksanaan di tingkat kelurahan melibatkan lurah dan pemerintah kelurahan, yang memiliki peran dan fungsi untuk memberikan dukungan legalitas dan jaminan atas kelancaran penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan sosialisasi tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan dan tingkat RW/RT.
- b. Menjamin kesiapan warga terhadap pelaksanaan NUSP-2 yang dibuktikan dengan surat pernyataan minat untuk melaksanakan program NUSP-2 secara partisipatif yang ditandatangani oleh kepala kelurahan dan tingkat RW/RT.
- c. Memfasilitasi kegiatan pengorganisasian masyarakat dan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan tingkat RW/RT.
- d. Menjamin keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan proyek.
- e. Memfasilitasi proses pembentukan dan/atau penguatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat setempat secara demokratis dan partisipatif, melalui forum musyawarah tingkat kelurahan.
- f. Mendorong peran serta seluruh warga masyarakat dan membantu fasilitasi proses penyusunan NUP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- g. Mensinergikan kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan serta meminimalkan resiko dan dampak negatif yang mungkin timbul.
- h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan proyek.

- i. Memproses serah terima infrastruktur yang telah dibangun oleh masyarakat dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.
 - j. Membina pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat serta turut menjaga keberlanjutannya.
2. Badan Keswadayaan Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksanan kegiatan NUSP-2 merupakan organisasi keswadayaan yang dipilih dan dibentuk masyarakat untuk melaksanakan tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan.

Berikut peran dan tanggung jawab BKM yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program NUSP-2 secara terus menerus di tingkat masyarakat.
- b. Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan sarana lingkungan permukiman termasuk faktor penyebab kekumuhan di tingkat kelurahan.
- c. Menyelenggarakan musyawarah warga tingkat kelurahan dan rembuk warga khusus perempuan.
- d. Menjamin dan fasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan.
- e. Menyusun Rencana Perbaikan Lingkungan (Neighborhood Upgrading Plan/NUP) secara partisipatif berdasarkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat.

- f. Mengajukan usulan NUP ke LCO untuk diverifikasi dan dikonsolidasikan dengan usulan SIAP di tingkat kota.
- g. Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sesuai hasil verifikasi NUP dan menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan (surat pernyataan kesiapan dan kontribusi warga, rekening BKM, dan lain-lain).
- h. Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Infrastruktur dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) prasarana-sarana yang akan dibangun.
- i. Menyusun desain teknis dan rencana anggaran biaya proyek dengan melibatkan TPPI dan KPP.
- j. Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 di kelurahan/desa secara berkala kepada masyarakat.
- k. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 dengan lembaga- lembaga pelaksana lainnya di tingkat kelurahan.
- l. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan.
- m. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilengkapi dengan foto kondisi fisik 0%, 50% dan 100%.
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban dana pembangunan infrastruktur untuk disampaikan ke LCO dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

- o. Melakukan serah terima hasil pekerjaan fisik dan melakukan pembinaan kepada KPP didalam pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun.

3. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) infrastruktur adalah kelompok warga masyarakat yang dibentuk BKM pada lokasi program yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat insfrastruktur yang telah dibangun oleh masyarakat.

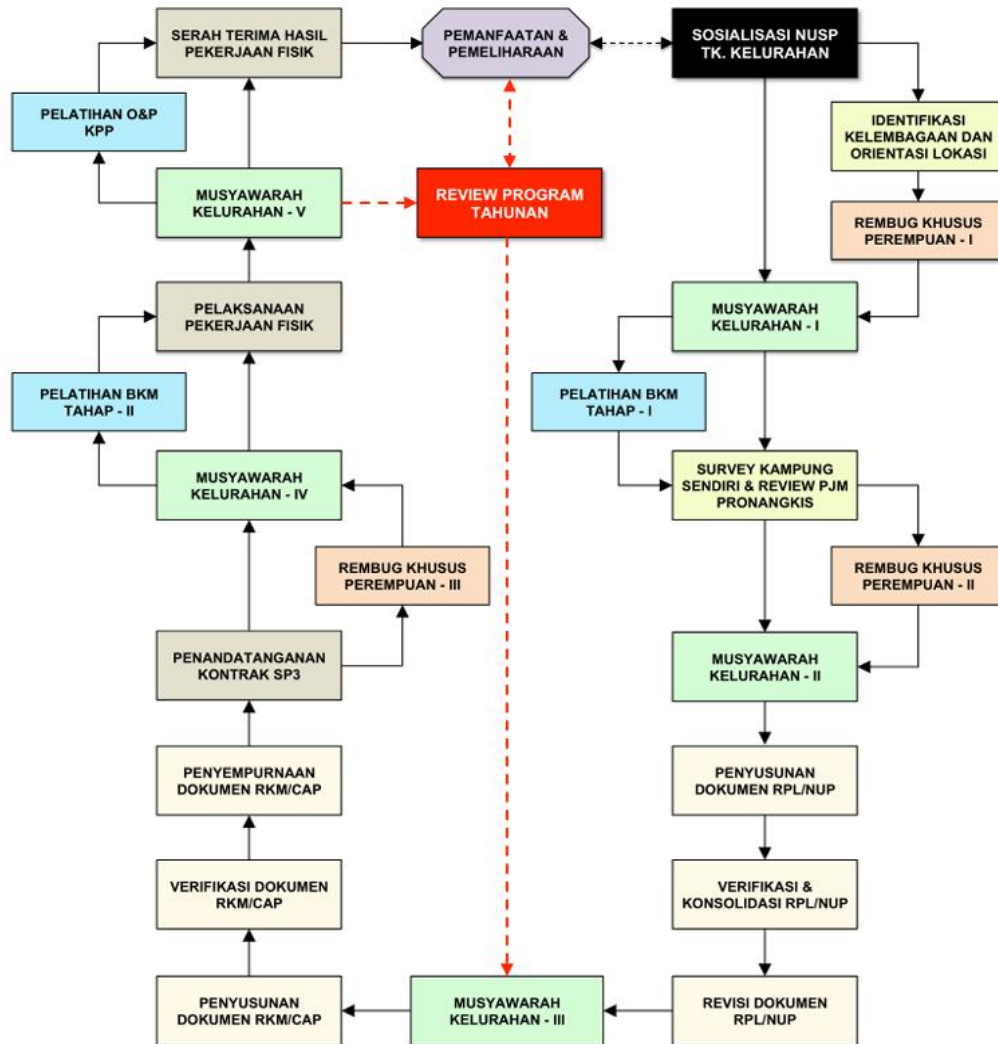
Tugas dan fungsi KPP yaitu:

- a. Terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
- b. Mengawal proses perencanaan teknis dan penyusunan RAB untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil SKS dan kebutuhan masyarakat.
- c. Melakukan koordinasi dengan TPPI dan BKM terkait dengan rencana pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.
- d. Membantu BKM dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- e. Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan yang mencakup mekanisme pelaksanaan operasional dan pemeliharaan serta pendanaanya sesuai usulan NUP dan RKM.

- f. Menyusun aturan main dan tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, serta menggalang dukungan masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur.
- g. Menyusun besaran kontribusi dari masyarakat serta pemanfaatannya.
- h. Memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, terkait pemanfaatan dana untuk pemeliharaan infrastruktur.
- i. Mendorong dan menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat didalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur.
- j. Mengembangkan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan.

4.1.3.1 Tahapan Kegiatan NUSP-2 di tingkat masyarakat

Gambar 4.6
Tahapan Kegiatan NUSP-2 Tingkat Masyarakat



(Sumber: Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* Tahun 2013)

Pada perencanaan untuk melaksanakan program NUSP-2 diawali dengan dilakukannya sosialisasi di tingkat kelurahan kepada masyarakat di lingkungannya. Kemudian dilanjutkan dengan dengan musyawarah dan juga terdapat rembug perempuan. Terdapat 5 kali musyawarah dalam program NUSP-2 ini yang dimana musyawarah dipimpin oleh lurah dan beragendakan penetapan lembaga pelaksana

kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan dan juga pembentukan tim survey kampung sendiri untuk mengidentifikasi penyebab kekumuhan yang ada di lingkungannya. Setelah pelaksanaan survey kampung sendiri maka dilanjutkan kepada musyawarah kelurahan 2 yang beragendakan merumuskan masalah sesuai dengan survey kampung sendiri dan dilanjutkan dengan menyusun dokumen yang berisi rencana kegiatan pembangunan prasarana di lingkungan kumuh tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kelurahan 3 yang beragendakan pemaparan hasil dokumen *Neighborhood Upgrading Plan*, penyepakatan rencana kegiatan tahunan dan penyusunan rencana kerja masyarakat. Setelah rencana kerja masyarakat selesai dibuat dilanjutkan pada musyawarah kelurahan 4 yang dimana beragendakan penyepakatan rencana pelaksanaan pembangunan seperti pengadaan bahan dan dana, kemudian kegiatan membahas mengenai lahan dan pekerja untuk mendukung pembangunan prasarana tersebut, dan terbentuknya kelompok pemanfaat dan pemelihara. Setelah musyawarah kelurahan 4 akan dilaksanakan pembangunan prasarana, dan dilanjutkan kepada musyawarah kelurahan 5 yang beragendakan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan dan persiapan serah terima prasarana kepada kelompok pemanfaat dan pemelihara.

Evaluasi yang dilakukan dalam Program NUSP-2 dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dimana evaluasi tersebut dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga perwakilan dari pusat yang menangani program NUSP-2 yaitu dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam setahun evaluasi dilakukan setiap 4 kali dimana

evaluasi tersebut terdapat pada tahap perencanaan yaitu sebelum musyawarah kelurahan 3, persiapan pelaksanaan yaitu sebelum musyawarah kelurahan 4, pelaksanaan yang dimana terdapat sebelum musyawarah kelurahan 5, dan hasil yang dimana terdapat setelah setelah serah terima hasil prasarana. Kemudian untuk dan laporan pertanggung jawaban dana dan laporan kemajuan pelaksanaan dibuat oleh BKM dimana dilaporkan perkembangan pembangunan prasarana saat dalam kondisi pembangunan 0%, 50%, dan 100%.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik data kualitatif. Dalam penelitian mengenai *Evaluasi Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project– 2* di Kecamatan Kasemen, peneliti menggunakan konsep teori menurut Dunn (2003: 610) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif yang dimana berbentuk kalimat hasil wawancara, hasil observasi di lapangan dan hasil dokumentasi di lapangan. Sumber data yang didapatkan dari informan oleh peneliti dicatat dan dibantu juga dengan alat perekam. Segala kata dan perilaku informan penelitian yang diwawancarai oleh peneliti menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan baik melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif yang kemudian akan dilakukan reduksi data untuk mendapatkan tema yang berkaitan berdasarkan jawaban yang sama yang telah dijawab oleh informan dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian serta dilakukan juga kategorisasi data. Sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumentasi yang dimana hasil dokumentasi tersebut berkaitan juga dengan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu yaitu:

- a. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan
- b. Kode Q₁, Q₂, Q₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan
- c. Kode I menunjukkan informan
- d. Kode I₁₋₁, I₁₋₂ dan seterusnya menunjukkan daftar urutan informan dari pihak utama atau *key informan*
- e. Kode I₂₋₁, I₂₋₂ dan seterusnya menunjukkan daftar urutan informan dari *secondary informan*

Setelah reduksi selesai dilanjutkan dengan data yang telah dipilah akan masuk dalam penyajian data agar peneliti dapat dengan mudah melihat gambaran data penelitian. Data yang ada akan dipilah kembali dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk disajikan agar sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, data yang telah diperoleh akan diuji kembali dengan teknik triangulasi dan *member*

check , yaitu proses mengecek kembali data yang telah didapatkan. Setelah semua proses analisis dilakukan maka peneliti dapat membuat kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan akhir dapat diambil setelah peneliti merasa bahwa data yang diperoleh peneliti sudah bersifah jenuh.

4.3 Data Informan Penelitian

Penelitian yang berjudul Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* – 2 di Kecamatan Kasemen menggunakan beberapa informan yang mengetahui mengenai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini yang dimana informan tersebut diklasifikasikan menjadi *key informan* dan *secondary informan*. Informan dalam penelitian ini memiliki informasi mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian yang sedang peneliti teliti. Jumlah ifnorman dalam penelitian ini yaitu 14 informan, adapun informan tersebut yaitu:

Tabel 4.7
Informan Penelitian

NO	informan	Status Informan	Keterangan	Usia	Kode Informan
1	Saad	Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud	<i>Key Informan</i>	43 tahun	I ₁₋₁
2	Marsaid	Ketua KPP Kelurahan Warung Jaud	<i>Key Informan</i>	35 tahun	I ₁₋₂
3	H. Saifulloh, S.Ap., M.Si	Lurah Warung Jaud	<i>Secondary informan</i>	51 tahun	I ₂₋₁
4	Umar	Ketua BKM Kelurahan	<i>Key Informan</i>	47 tahun	I ₁₋₃

		Margaluyu			
5	Jamhadi	Ketua KPP Kelurahan Margaluyu	<i>Key Informan</i>	43 tahun	I ₁₋₄
6	Yuyu Sutisna	Staf Kelurahan Margaluyu	<i>Secondary informan</i>	39 tahun	I ₂₋₂
7	Hadirahsidin	Ketua BKM Kelurahan Kilasah	<i>Key Informan</i>	48 tahun	I ₁₋₅
8	Samnun	Ketua KPP Kelurahan Kilasah	<i>Key Informan</i>	43 tahun	I ₁₋₆
9	Samsudin	Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah	<i>Secondary informan</i>	47 tahun	I ₂₋₃
10	Lia Amalia, ST	Kasi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang	<i>Secondary informan</i>	41 tahun	I ₂₋₄
11	Dedi Cahyadi, SKM., M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Serang	<i>Secondary informan</i>	38 tahun	I ₂₋₅
12	Mamruhah	Tokoh Masyarakat Kelurahan Warung Jaud	<i>Secondary informan</i>	27 tahun	I ₂₋₆
13	Janim	Tokoh Masyarakat Kelurahan	<i>Secondary informan</i>	52 tahun	I ₂₋₇

		Margaluyu			
14	Jumaroh	Tokoh Masyarakat Kelurahan Kilasah	<i>Secondary informan</i>	42 tahun	I ₂₋₈

(Sumber: Peneliti, 2019)

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian mengenai Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project- 2* di Kecamatan Kasemen, teori yang digunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Dunn (2003:610) yaitu (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan yaitu sebagai berikut:

4.4.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi yang terdapat dalam teori William Dunn. Dimensi efektivitas berkenaan dengan apakah suatu program telah mencapai hasil yang diharapkan. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project - 2* di Kecamatan Kasemen telah mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. Tujuan dari adanya program NUSP-2 yaitu untuk menangani permukiman kumuh yang terdapat di wilayah perkotaan. Sudah banyak prasarana yang dibangun dalam program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen seperti sanitasi, persampahan dan juga jalan lingkungan. Dimana dengan pembangunan tersebut diharapkan 3 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen yaitu Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu yang mendapatkan program NUSP-2 telah

berhasil tertangani namun dari beberapa wawancara peneliti dengan informan tujuan dan juga hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tertangani, seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“Hasil yang diharapkan yaitu penuntasan kawasan kumuh yang sesuai dengan SK permukiman kumuh program NUSP-2 ini, dimana terdapat 7 kriteria. Kita berharap dengan adanya program ini wilayah yang mendapatkan program dapat menuntaskan kekumuhan di wilayahnya baik dari infrastruktur maupun bangunan. Dimana infrastruktur dapat berupa jalan lingkungan, sanitasi, air bersih, drainase. Untuk kecamatan kasemen sendiri jika melihat dari kriteria selesai namun kalau dilihat dari tingkat kebiasaan atau perilaku itu masih jauh, kalau dilihat dari program untuk menangani permukiman kumuh selesai tapi untuk kumuhnya belum ada perubahan karena perilaku manusia yang masih sulit diubah.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Tanggapan yang hampir serupa juga dikemukakan oleh informan berikut:

“Kalau penanganan permukiman kumuh dari segi infrastrukturnya sendiri sudah jelas berkurang, katakanlah jalan, jalan yang tadinya berlubang dan bercampur lumpur sekarang sudah tidak ada, kemudian air genangan yang tadinya menggenang kemudian diarahkan untuk membuat drainase sehingga tidak lagi. Memang upaya itu terlihat namun hanya sebatas penanganan infrastruktur saja, tidak ada penanganan lain contohnya PHBS dari dinkes harus turun.” (Wawancara dengan Dedi Cahyadi, SKM., M.Si, Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 10:24 WIB)

Dari pendapat informan tersebut mereka berpandangan bahwa secara infrastruktur untuk permukiman kumuh berkurang. Namun secara pola pikir dan kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungannya belum juga muncul. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari salah satu ketua BKM berikut yang dimana ketua BKM yang melihat jelas

bagaimana keadaan lingkungannya. Berikut pernyataan dari salah satu

Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud:

“Kalau berkurang iya tetapi tidak menuntaskan karena yang perlu dibangun sumber daya manusiannya karena pembangunan fisik juga harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia karena sikap dan perilaku hidup itu yang langsung menciptakan kumuh.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Adapun jawaban yang serupa juga disampaikan oleh informan

.berikut yaitu ketua KPP Kelurahan Margaluyu:

“Belum sesuai tujuan karena pola pikir masyarakat belum berubah karena tempat sampah sudah dibuatkan tetapi buang sampah masih sembarangan.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Kemudian Kasi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Kilasah juga mengatakan bahwa program NUSP-2 telah mampu mengurangi permukiman kumuh yang terdapat di wilayahnya, berikut jawaban dari informan tersebut:

“Kalau mengurangi dengan sendirinya otomatis mengurangi, dengan adanya program tersebut masyarakat dengan sendirinya mencontoh yang sudah ada seperti membuat MCK walaupun mencicil membuatnya. Sekitar 70% sudah mengurangi permukiman kumuh.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Berdasarkan pada pedoman umum NUSP-2 bahwa terdapat 7 indikator permukiman kumuh yaitu jalan setapak, jalan lingkungan, drainase mikro, persampahan, sanitasi, air bersih, dan lampu penerangan jalan. Dari pernyataan informan yang telah disajikan maka terlihat bahwa program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen secara infrastruktur sudah

mampu menangani dan mengurangi permukiman kumuh dilokasi program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen yaitu Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Kilasah, dan Kelurahan Warung Jaud. Berdasarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor 663/Kep110-Huk/2018 bahwa luas lokasi permukiman kumuh terdapat di 135 titik seluas 538,75 Ha. Kemudian pada tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor 663 bahwa luas permukiman kumuh sebesar 384,508 Ha. Bahkan dengan adanya pembangunan prasarana dari program NUSP-2 dapat membuat masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kamar mandi sendiri sekarang mulai mencontoh dengan membangun kamar mandi dirumahnya masing-masing walaupun belum semua masyarakat menerapkan hal tersebut. Namun perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan lingkungan juga agar prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan.

Pelaksanaan program NUSP-2 ini juga harus sesuai dengan pedoman umum yang ada agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dimana peneliti juga telah mewawancarai beberapa informan mengenai pelaksanaan program NUSP-2 yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kasemen. Dalam melaksanakan segala sesuatu dalam program NUSP-2 ini harus mengacu pada pedoman yang ada, terlebih lagi untuk pelaksanaan pembangunan prasarana juga harus mengacu pada pedoman karena jika dalam pembangunan prasarana tidak sesuai dengan pedoman yang ada maka pihak terkait tidak akan menandatangani laporan

pembangunan dan tidak akan mencairkan dana tersebut. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kasi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman yang terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, yaitu sebagai berikut:

“Kalau pelaksanaan itu harus sesuai dengan pedoman yang ada karena jika tidak memperhatikan hal tersebut tidak dapat juga dilakukan pencairan dana. Kemudian saat pemeriksaan akhir juga jika ada yang tidak sesuai kita tidak mau tanda tangan sebelum diperbaiki terlebih dahulu baru kita memantau lagi kalau sudah sesuai baru kita tanda tangani.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Dalam pelaksanaan program NUSP-2 di 3 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen juga telah sesuai dengan pedoman yang ada seperti yang telah disampaikan oleh informan berikut dari Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu:

“Pelaksanaan sudah sesuai dengan teknis dan prosedur karena kalau tidak mengikuti akan menimbulkan masalah yang lain dan dinas terkait juga tidak bersedia tanda tangan.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ketua KPP Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan yang ada sudah sesuai dengan pedomannya.” (Wawancara dengan Marsaid, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 19:21 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Margaluyu, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan sudah sesuai pedoman yang ada karena kalau tidak mereka tidak akan mau tanda tangan.” (Wawancara dengan Umar,

Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16:19 WIB)

Pihak Kelurahan Margaluyu juga menyatakan hal yang serupa mengenai pelaksanaan program NUSP-2, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan sudah sesuai pedoman yang ada karena sudah diaudit.” (Wawancara dengan Yuyu Sutisna, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 15:25 WIB)

Kemudian jawaban dari BKM Kelurahan Kilasah juga menurutnya pelaksanaan di Kelurahan Kilasah telah sesuai dengan pedoman yang ada. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan tersebut yaitu sebagai berikut:

“Sudah sesuai dengan pedoman karena kita mengikuti saran dan arahan yang diberikan.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Dalam pelaksanaan program NUSP-2 harus sesuai dengan prosedur yang ada semua pihak juga harus melaksanakan sesuai dengan pedoman. Pentingnya memperhatikan pedoman karena segala sesuatu yang dikerjakan akan diperiksa kembali dan jika terdapat ketidaksesuaian maka laporan yang ada tidak akan ditandatangani dan bahkan hal tersebut juga terhambat pada pencairan dana. Berdasarkan pedoman umum NUSP-2 bahwa pencairan dana akan dicairkan apabila melampirkan laporan kemajuan fisik, dimana dengan adanya hal tersebut laporan kemajuan fisik tersebut akan melaporkan bagaimana keadaan prasarana yang dibangun jika tidak sesuai maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan melakukan pencairan dana. Dimana terdapat salah satu kesalahpahaman saat pengecekan prasarana di akhir pembangunan yang

terjadi di Kelurahan Kilasah. Berikut pernyataan dari Kasi Kesejahteraan Soial Kelurahan Kilasah yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau Kelurahan Kilasah sudah memenuhi syarat pedoman, namun kemarin terjadi ada kendala masalah drainase. Saat drainasenya diukur terdapat komplain dari pihak kota jadi saat itu kami dipanggil namun sudah selesai karena saat itu panjang drainase kurang 11 meter namun ternyata kesalahannya bukan di kita ataupun di pihak kota namun terdapat di meterannya, ternyata meteran yang digunakan salah namun saat ini sudah selesai.”
(Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Kesalahan yang terjadi di Kecamatan Kilasah merupakan kesalahan yang terdapat pada meteran yang digunakan untuk mengukur. Meteran yang digunakan merupakan meteran yang rusak sehingga menimbulkan kesalahan saat pengukuran. Seluruh hasil dari prasarana dari program NUSP-2 akan melalui proses pengecekan setelah selesai dilaksanakan, maka dari itu jika terjadi kesalahan dalam pembangunan maka harus dilakukan perbaikan dahulu sesuai dengan pedoman. Kemudian proses pelaporan dapat berjalan lancar dan dapat diterima.

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana juga terdapat jangka waktu yang ditetapkan untuk proses pelaksanaan prasarana program NUSP-2. Jangka waktu yang ditetapkan yaitu 3 bulan atau 90 hari. Namun tidak ada sanksi jika pelaksanaan pembangunan melebihi 90 hari. Adapun jawaban dari informan Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang terkait waktu pelaksanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

“Kalau melihat kontrak itu 3 bulan, tetapi yang namanya pembangunan oleh masyarakatnya walaupun kontrak 3 bulan namun pelaksanaan pembangunan lebih itu tidak masalah dan tidak ada sanksi karena tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi tidak masalah jika pelaksanaan pembangunan melebihi kontrak asal tidak melebihi tahun anggaran. Sebenarnya melebihi tahun anggaran juga tidak masalah kalau hanya untuk finishingnya saja.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Adapun jawaban serupa dari Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Serang, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan 3 bulan dan selama ini tepat 3 bulan karna selalu dipantau pekerjaannya dari perkim dan Bappeda.” (Wawancara dengan Dedi Cahyadi, SKM., M.Si, Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 10:24 WIB)

Pelaksanaan pembangunan dalam program NUSP-2 ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat tidak hanya selalu menerima program sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat dilibatkan. Sehingga sebagaimana menurut informan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang menyatakan bahwa tidak terdapat sanksi jika adanya keterlambatan. Tidak adanya sanksi ini membuat para pihak seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda harus memantau pekerjaan pembangunannya. Pernyataan dari pihak Bappeda Kota Serang tersebut juga selaras dengan jawaban badan keswadayaan masyarakat yang terdapat di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kasemen. Sebagaimana jawaban yang telah

dipaparkan oleh informan salah satunya oleh Ketua BKM Kelurahan Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan 90 hari kerja. Namun kilasah tidak pernah terlambat sesuai ketentuan. Kalau terlambat biasanya karena kondisinya musim hujan.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Adapun jawaban serupa juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Margaluyu, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan 90 hari kerja tapi disini tidak pernah telat hanya kalau ada yang telat itu karena kendala cuaca.” (Wawancara dengan Umar, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16:19 WIB)

Begitu juga jawaban yang disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Total 90 hari kerja tetapi disini tidak pernah lebih dari 90 hari.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Berdasarkan pada ketentuan dalam pedoman umum program NUSP-2 pelaksanaan kerja bahwa pelaksanaan pembangunan prasarana dilakukan 90 hari kerja. Pelaksanaan di 3 kelurahan tersebut tidak ada yang melewati jangka waktu karena sesuai dengan pemaparan dari pihak Bappeda mereka memantau pelaksanaan agar tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan. Jika terdapat keterlambatan, hal tersebut biasanya dikarenakan oleh keadaan cuaca saat pembangunan dilaksanakan. Namun kalau ada keterlambatan terkadang hanya diberi surat teguran saja agar pelaksanaan pembangunan bisa segera diselesaikan.

Hambatan dalam pelaksanaan sebuah program itu merupakan hal biasa. Dimana dalam pelaksanaan program NUSP-2 ini juga terdapat kelurahan yang mengalami hambatan namun juga ada yang tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Dimana salah satu hambatan yang dialami yaitu mengenai lahan untuk pembangunan prasarana. Berikut pernyataan dari informan pihak Kelurahan Margaluyu mengenai hal tersebut:

“Hambatannya susah mencari lahan yang dihibahkan.”
(Wawancara dengan Yuyu Sutisna, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 15:25 WIB)

Adapun jawaban serupa yang disampaikan oleh informan Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Kendalanya waktu itu lahan karena lahanya hibah, karena namanya juga tanah kalau dijual juga laku dan terkadang terkendala kondisi seperti hujan.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Pernyataan dari pihak kelurahan Kilasah juga didukung oleh pernyataan dari Ketua KPP Kelurahan Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Kalau hambatan tidak ada, kalau masalah lahan juga susah cari lahan dan kebetulan saya ada jadi yaudah digunakan saja gitu lahan saya karena saya juga membutuhkan.” (Wawancara dengan Samnun, Kelurahan Kilasah, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 13:05 WIB)

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana di Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu sempat mengalami kendala dengan lahan karena lahan yang digunakan merupakan lahan hibah bukan lahan yang dibeli oleh pemerintah. Namun untuk Kelurahan Warung Jaud sendiri menyatakan bahwa mereka tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan

program NUSP-2, seperti yang disampaikan oleh Lurah Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Kalau hambatan tidak ada karena masyarakat sangat mendukung.”
(Wawancara dengan H. Saifulloh, S.Ap., M.Si, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 11:19 WIB)

Adapun jawaban serupa yang disampaikan oleh masyarakat Warung Jaud selaku yang memberi hibah tanah dan juga merasakan manfaat terhadap prasarana yang dibangun, yaitu sebagai berikut:

“Kendala tidak ada karena kalau lahan yaudah lahan ini milik ibu daripada tidak dipakai jadi digunakan saja karena memang kita memerlukan MCK.” (Wawancara dengan Mamruhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Dimana pernyataan dari pihak kelurahan dan masyarakat tersebut juga didukung oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Kalau hambatan tidak ada hanya kendala lahan saja karena lahan tersebut lahan hibah, hanya hambatan kecil kecil saja karena semua berjalan sesuai rencana, karena sebelumnya yang memiliki tanah itu kita kumpulkan dulu karena ini merupakan tanah masyarakat kalau memang ada tanah masyarakat yang digunakan maka masyarakat yang memiliki tanah kita adakan musyawarah.”
(Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Pelaksanaan program NUSP-2 ini dalam membangun prasarananya seperti MCK dan sarana air bersih membutuhkan lahan. Dimana dalam program ini lahan yang akan digunakan adalah lahan hibah dari masyarakat setempat. Sehingga membutuhkan masyarakat yang bersedia untuk menghibahkan tanahnya untuk dibangun prasarana tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki tanah bersedia untuk

menghibahkan lahan yang mereka miliki. Itu menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Kilasah. Kemudian untuk Kelurahan Warung Jaud mengenai lahan bukan hambatan karena masyarakat yang memiliki lahan memberikan lahanya untuk digunakan untuk pembangunan prasarana program NUSP-2. Mereka juga berpikir bahwa mereka membutuhkan prasarana tersebut jadi tidak masalah kalau tanah mereka digunakan untuk keperluan bersama.

Pada dimensi efektivitas ini yang sangat diunggulkan yaitu pelaksanaan program NUSP-2 telah mampu mengurangi permasalahan permukiman kumuh. Masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya program ini dalam melaksanakan aktivitasnya. Namun yang disesalkan yaitu mengenai kesadaran masyarakat yang belum timbul akan menjaga dan juga merawat prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian untuk waktu pelaksanaan pembangunan prasarana juga tidak dikenakan sanksi bagi wilayah yang melakukan pekerjaan pembangunan melewati batas kontrak. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa karena dalam program NUSP-2 ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam program yang diberikan pemerintah sehingga tidak ada sanksi jika terdapat keterlambatan.

4.4.2. Efisiensi

Efisiensi merupakan dimensi selanjutnya dalam evaluasi yang terdapat pada teori Willian Dunn. Efisiensi ini berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu hal yang berkaitan dengan dimensi ini yaitu mengenai anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan prasarana agar pelaksanaan pembangunan prasarana dapat berjalan. Dalam program NUSP-2 ini bahkan pemerintah meminjam dana dari *Asian Development Bank* untuk dapat mendanai pelaksanaan program NUSP-2. Dalam dimensi ini akan membahas mengenai pendanaan yang ada sudah cukup memadai untuk menjalankan pelaksanaan program NUSP-2. Berikut informasi mengenai dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program NUSP-2 di Kota Serang menurut pernyataan dari Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Serang, yaitu sebagai berikut:

“Total 36 miliar, namun hanya 23 miliar yang terserap. Sisa itu dikembalikan ke ADB. Dari 92 Ha masih terdapat sisa yang belum tertangani 14 Ha yang belum tertangani.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Informasi terkait dengan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan program disampaikan salah satunya dengan informan yaitu Ketua BKM Kelurahan Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Anggaran tersebut untuk satu kelurahan ini masih kurang karena masih banyak RW lain yang belum tertangani. Namun kalau untuk 2 RW sesuai dengan surat keputusan itu cukuplah.” (Wawancara

dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Namun juga hal lain disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Kurang tau soal dana, kita hanya memantau pekerjaannya saja” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Informasi terkait dengan apakah anggaran yang ada memadai untuk pelaksanaan program NUSP-2 disampaikan oleh pihak kelurahan Margaluyu, yaitu sebagai berikut:

“Anggaran segitu tidak cukup karena masih banyak yang belum dibangun hanya cukup mengurangi permukiman kumuh.” (Wawancara dengan Yuyu Sutisna, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 15:25 WIB)

Pendapat lainnya diutarakan oleh Ketua BKM Kelurahan Margaluyu yang menyatakan:

“Kalau menurut saya cukup karena prasarana yang dibangun udah membantu warga, lalu juga sudah mengurangi permukiman kumuh.” (Wawancara dengan Umar, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16:19 WIB)

Informasi mengenai pendanaan di Kelurahan Warung Jaud juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan:

“Anggaran segitu kurang cukup sehingga ada yang digabung dengan program dari perkim.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Tanggapan berbeda juga disampaikan oleh Lurah Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan:

“Kurang mengetahui mengenai anggaran. karena tidak tahu jadi kurang tahu cukup atau tidaknya.” (Wawancara dengan H.

Saifulloh, S.Ap., M.Si, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 11:19 WIB)

Tabel 4.8

Anggaran Program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen

NO	Kelurahan	2017	2018
1	Margaluyu	845.000.000	-
2	Kilasah	845.000.000	-
3	Warung Jaud	845.000.000	900.000.000

(Sumber: Kegiatan APBN Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Serang tahun 2017-2018)

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa anggaran yang dibutuhkan di Kecamatan Kasemen pada pelaksanaan program tahun 2017-2018 yaitu yaitu Rp. 3.435.000.000 untuk total kegiatan pelaksanaan program NUSP-2 di 3 kelurahan pada Kecamatan Kasemen. Dimana anggaran tersebut berasal dari dana pinjaman ADB dan untuk kekurangan dana pembangunan prasarana menggunakan dana swadaya masyarakat.

Tabel 4.9

Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Serang

Tahun	NUSP	Tertangani
2015	5 lokasi	12 Ha
2016	7 lokasi	27,9 Ha
2017	7 lokasi	22,3 Ha
2018	4 lokasi	15,8 Ha
Total		78 Ha

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang)

Berdasarkan tabel 4.9 bahwa pelaksanaan NUSP-2 di Kota Serang telah dilaksanakan di seluruh 7 titik lokasi sesuai surat keputusan walikota nomor 400/Kep.223-Huk/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kota Serang tahun 2015-2017 dengan total penanganan 92,28 Ha. Dengan

begitu sesuai dari total dana NUSP-2 untuk Kota Serang sebesar 32 M dan terealisasi 9 M dikatakan sudah tercukupi, terlihat dari sisa penanganan program seluas 14 Ha dan anggaran yang ada sisa 9 M. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pendanaan di program NUSP-2 ini, terdapat beberapa informan yang menyatakan bahwa anggaran yang diberikan cukup karena telah mampu mengurani permukiman kumuh. Namun juga terdapat informan yang menyatakan bahwa anggaran yang diberikan kurang karena prasarana yang dibangun belum seluruhnya. Bahkan di Kelurahan Kilasah terdapat beberapa prasarana yang didapatkan dari program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Informasi berikutnya yaitu berkenaan dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah pelaksanaan program NUSP-2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BKM Kelurahan Kilasah yang menyatakan:

“Musyawarahnya ada yang datang ada yang tidak, kadang-kadang hanya 60% saja yang datang padahal peran mereka sangat penting. Alasan masyarakat yang tidak datang alasannya sibuk.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Kemudian juga hal tersebut didukung oleh pernyataan dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa:

“Kalau rapat diberi tahu dan diberi undangan tetapi banyak yang tidak datang karena jauh juga kalau musyawarah di balai desa. Tetapi kalau disuruh mengambil beras gitu ke balai desa jauh juga

pasti pada datang, tapi kalau buat rapat susah tidak dapat amplop kalau dapat lagi sibuk juga pasti pada ditunda.” (Wawancara dengan Jumaroh, Kelurahan Kilasah, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 14:37 WIB)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ketua KPP Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa:

“Musyawarah banyak yang tidak datang bilangnya pada sibuk.” (Wawancara dengan Samnun, Kelurahan Kilasah, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 13:05 WIB)

Namun juga untuk menurut Ketua KPP Kelurahan Margalyu menyatakan masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah program NUSP-2 juga tidak banyak, berikut pernyataan informan tersebut:

“BKM mengundang musyawarah hanya 30% yang diundang karena kalau untuk semua hadir itu susah padahal partisipasi masyarakat dalam musyawarah itu sangat penting. Tapi warga ikut berpendapat di musyawarah tersebut karena sebelumnya saya sudah menyampaikan ke warga yang butuh apa-apa disampaikan saja.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Pernyataan dari informan diatas juga didukung oleh pernyataan dari informan berikut yaitu masyarakat Kelurahan Margaluyu:

“Musyawarah hanya perwakilan saja yang diundang untuk pengajuan.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Namun pernyataan berbeda dikemukakan oleh pihak Kelurahan Margaluyu yang menyatakan sebagai berikut:

“Banyak yang berpartisipasi banyak yang datang dan masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat. Namun masih banyak yang belum dapat program jadi masih banyak masyarakat yang menanyakan.” (Wawancara dengan Yuyu Sutisna, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 15:25 WIB)

Pelaksanaan musyawarah di Kelurahan Warung Jaud banyak masyarakat yang hadir dimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Kita undang semua masyarakat disana terjadi dialog jadi disana masyarakat menyampaikan kebutuhannya apa saja yang dibutuhkan.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Pernyataan dari informan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ketua KPP Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan:

“Masyarakat banyak yang datang di musyawarah, diundang sama BKM dan sama saya kumpul di aula masjid.” (Wawancara dengan Marsaid, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 19:21 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat setempat Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Warga dikasih tahu ada pembangunan. Saat musyawarah warga dikumpulkan di aula masjid. Masyarakat diundang untuk musyawarah, namanya juga mau dibantu kita seneng saja makanya dateng aja. Masyarakat yang dateng juga banyaklah.” (Wawancara dengan Mamruhhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Gambar 4.7
Daftar Hadir Musyawarah Kelurahan Kilasah

Nama	Alamat Lengkap	L/P	Organisasi/Wakil Warga	Tanda Tangan
	Kilasah	L	Lurah	
	Kilasah	L	RT 20	
	Kilasah	L	RT 20	
	Kilasah	L	RT 05	
	Kilasah	L	RT 12	
	Kilasah	L	BEM	
	"	L	Siswa Baru	
	Sering	L	CA	
	Sering	L	CA	
	Cedana Kilasah	L	RT 21	

Kilasah, 23 Maret 2017
Dede Kuswanto

(Sumber: Neighborhood Upgrading Action Plan Kelurahan Kilasah tahun 2017)

Pada gambar 4.7 memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Kilasah kurang dalam musyawarah. Dimana sesuai dengan pedoman umum NUSP-2 bahwa peserta musyawarah yang hadir minimal diikuti oleh 50 peserta. Peran masyarakat dalam musyawarah sangat penting karena masyarakat yang akan mengetahui kebutuhan prasarana apa saja yang dibutuhkan di wilayahnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut yaitu Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

“Peran masyarakat sangat penting karena mereka yang akan mengusulkan prasarana yang akan dibangun karena mereka yang mengetahui kebutuhan di wilayahnya sendiri. Fungsinya masyarakat diundang karena masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan memelihara nantinya maka dari itu masyarakat harus selalu dilibatkan agar rasa memiliki masyarakat tinggi terhadap prasarana yang dibangun.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Dalam musyawarah juga didiskusikan mengenai iuran yang digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan. Dimana iuran tersebut dimusyawarahkan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar karena sesuai kesepakatan masyarakat. Berikut informasi terkait dengan iuran yang sesuai dengan kesepakatan saat musyawarah. Berikut pernyataan dari Ketua BKM Kelurahan Kilasah yang menyatakan:

“Iuran sesuai dengan kemampuan masyarakat karena melalui musyawarah kalau disini 10 ribu satu rumah. Terkadang masih sulit ditagih uang iuran karena kondisi masyarakat disini kan rata-rata kurang mampu sehingga pendapatannya tidak menentu karena disini kebanyakan buruh tani.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Hal tersebut didukung oleh informan berikut selaku Ketua KPP

Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Kalau untuk iuran disini sudah melalui musyawarah tapi gitu tetap aja pada susah kalau ditagih.” (Wawancara dengan Samnun, Kelurahan Kilasah, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 13:05 WIB)

Kemudian untuk kondisi di Kelurahan Margaluyu berikut pernyataan dari Ketua KPP Kelurahan Margaluyu mengenai iuran untuk pemanfaatan dan pemeliharaan, yang menyatakan:

“Iuran disini 5 ribu satu rumah dan udah sesuai dengan kesepakatan masyarakat karena sebelumnya dimusyawarahkan dulu.

Sebenarnya 5 ribu itu kurang makanya kalau ada yang mau nyalur kerumah saya bedakan iurannya utuk menutupi kekuarangan yang tadi. Iurannya pada jalan semua kalau sedikit sedikit nombok sudah biasa karena kalau warga kalau lagi tidak ada uang juga kita tidak bisa memaksa, paling kalau bulan ini lagi tidak ada uang mereka di dobel sama bulan depan.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari masyarakat

Kelurahan Margaluyu, yaitu sebagai berikut:

“Iuran itu 5 ribu perbulan, sebelumnya musyawarah dulu dan sudah sesuai dengan kesepakatan.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Kemudian pernyataan mengenai iuran juga disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Saat musyawarah ditentukan sama warga sebulan 15 ribu. Itu sudah sesuai kemampuan masyarakat juga sudah lewat musyawarah” (Wawancara dengan Mamruhhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua KPP Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan:

“Iuran itu 15 ribu satu rumah dulu banyak yang bayar tetapi sekarang kurang.” (Wawancara dengan Marsaid, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 19:21 WIB)

Tabel 4.10

Kegunaan Iuran Masyarakat di Kelurahan Kilasah Setiap Bulan

No	Alat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Air Bersih	-	-	-	-
2	Pembersih Closet 450 ml	4	Botol	10.300	41.200
3	Pewangi WC Wipol 450 ml	4	Bungkus	5.500	22.000

4	Obat WC Degra Simba	1	Botol	40.000	40.000
5	Sabun Krim Ekonomi 500K	1	Karton	52.000	52.000
6	Pembelian Token Listrik	1	-	100.000	100.000
7	Pembelian ATK Pengelola	1	-	50.000	50.000
8	Honor Petugas Teknis Lapangan	2	Rupiah	250.000	500.000
Jumlah					805.200

(Sumber: Rencana Kegiatan Masyarakat Kelurahan Kilasah tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas yang diambil rencana kegiatan masyarakat bahwa dengan total biasaya tersebut iuran disepakati oleh masyarakat sebesar Rp. 10.000 ribu rupiah saat awal kemudian setelah itu diubah menjadi Rp.8.000 ribu rupiah. Besaran iuran setiap kelurahan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang pada kelurahan tersebut. Peran masyarakat sangat penting dalam musyawarah apalagi untuk penentuan prasarana apa saja yang akan dibangun. Kemudian dalam musyawarah juga dibahas mengenai iuran untuk biaya perawatan dan pemeliharaan prasarana yang ada. Jika banyak masyarakat yang tidak datang dalam musyawarah tersebut maka bisa saja menimbulkan ketidaksanggupan atas ketetapan iuran tersebut.

Informasi selanjutnya berkenaan dengan pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara mengikuti latihan yang diadakan dalam program NUSP-2. Pelatihan ini sangat penting bagi para BKM dan KPP karena mereka yang akan melaksanakan program NUSP-2 dan juga memelihara prasarana yang akan dibangun sehingga dibutuhkan pelatihan agar mereka dapat memiliki

pengetahuan dalam pelaksanaan di lapangan. Berikut pernyataan dari Ketua BKM Kelurahan Margaluyu, yang menyatakan:

“Saya ikut pelatihannya waktu itu, materinya biasanya seperti pembukuan, pembuatan LPJ, dan cara membuat proposal.” (Wawancara dengan Umar, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16:19 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua KPP Kelurahan Margaluyu, yaitu sebagai berikut:

“Ikut pelatihan saya waktu itu pelatihannya 3 hari di Hotel Grand Krakatau. Materi yang disampaikan terutama tentang kekumuhan, kemudian masalah sanitasi” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Kemudian dari Kelurahan Warung Jaud juga menyatakan hal yang serupa yang dipaparkan oleh Ketua KPP yaitu sebagai berikut:

“Saya ikut pelatihan, waktu itu ada materi yang dikasih itu seperti tata cara pemanfaatan.” (Wawancara dengan Marsaid, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 19:21 WIB)

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Waktu itu saya ikut pelatihannya di Hotel Grand Krakatau 3 hari, materinya kaya peran BKM, peran KPP sama peran masyarakat.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa seluruh BKM dan KPP di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud mengikuti pelatihan yang ada. Pelatihan ini dianggap penting untuk melatih mereka dan memberikan mereka pengetahuan mengenai tanggung jawab yang harus mereka laksanakan

dalam program NUSP-2. Sesuai dengan alur tanahapn kegiatan NUSP bahwa pelatihan tersebut diadakan 2 kali untuk BKM dan satu kali untuk KPP.

Informasi selanjutnya yaitu terkait monitoring yang dilakukan oleh pihak terkait, dimana informasi ini disampaikan oleh informan dari Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang yang menyatakan:

“Pemantauan dilakukan setiap termin, dan juga jika ada kegiatan lain di lokasi pelaksanaan program NUSP-2 kita juga pasti sekalian memantau pelaksanaanya.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Kemudian mengenai pemantauan juga dipaparkan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah yang menyatakan:

“Kalau monitoring itu baru 50% saja sudah dipantau sebelum selesai itu selalu dipantau dan akhir pembangunan juga dipantau. Pemantauan bisanya yang ikut dari dinas terkait dan juga kelurahan.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Pemantauan serupa juga dilakukan di Kelurahan Margaluyu yang dipaparkan oleh Ketua BKM yang menyatakan:

“Ada pemantauan dari dinas terkait dengan kelurahan, waktu itu pemantauan saat 50% pelaksanaan dan selesai pembangunan juga ada ” (Wawancara dengan Umar, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16:19 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat di Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan:

“Ada yang mantau saat dibangun pertengahan dan saat selesai, tidak tahu darimana tapi ada yang mantau saja.” (Wawancara dengan Mamruhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam dimensi efisiensi, peneliti menemukan temuan yaitu mengenai pendanaan menurut beberapa informan bahwa pendanaan yang ada dirasa telah cukup namun adapula informan lain yang menyatakan bahwa pendanaan kurang cukup karena prasarana yang dibangun belum tercukupi. Dalam pelaksanaan program NUSP-2 ini belum seluruhnya tertangani, masih terdapat 14 Ha yang belum tertangani dari total luas penanganan permukiman kumuh program NUSP-2 seluas 92,28 Ha. Lalu untuk anggaran seluruhnya sudah mencukupi karena sebelumnya melalui proses perencanaan, kalau terdapat kekurangan dana menggunakan dana swadaya masyarakat. Kemudian juga dalam program NUSP-2 terdapat musyawarah yang dimana peran masyarakat dalam musyawarah sangat penting karena masyarakat yang akan menyampaikan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di wilayahnya. Namun partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang terdapat di beberapa kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen ada yang masyarakatnya banyak berpartisipasi adapula masyarakat yang kurang berpartisipasi. Dimana di Kelurahan Warung Jaud partisipasi masyarakat sangat tinggi karena dirasa mereka membutuhkan sekali program tersebut namun di kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Kilasah masyarakat yang berpartisipasi dapat dikatakan kurang karena hanya sebagian saja yang hadir dalam pelaksanaan musyawarah. Dalam

musyawarah juga dibahas mengenai iuran untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur namun masih banyak warga di beberapa kelurahan yang sulit untuk membayar tagihan iuran tersebut padahal iuran tersebut sudah sesuai kesepakatan dalam musyawarah. Terkait dengan pelatihan yang terdapat di program NUSP-2 ini 3 kelurahan di Kecamatan Kasemen yang mendapatkan program NUSP-2 mengikuti pelatihan yang terdapat dalam program NUSP-2 sehingga mereka sudah dibekali mengenai pengetahuan dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Pemantauan untuk pelaksanaan program NUSP-2 juga dilakukan oleh pihak terkait, dimana pemantauan dilakukan saat 50% pembangunan dan setelah pembangunan selesai untuk dilakukan pengecekan prasarana yang telah ada.

4.4.3. Kecukupan

Kecukupan merupakan dimensi selanjutnya dalam evaluasi yang terdapat pada teori William Dunn. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauhnya pencapaian dari hasil yang diinginkan. Dalam dimensi kecukupan ini akan dibahas Informasi terkait pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan program NUSP-2. Dimana informasi terkait apakah pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara yang telah ada memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan program NUSP-2. Hasil wawancara

peneliti dengan salah satu masyarakat Warung Jaud mengatakan sebagai berikut:

“Sangat tepat karena sangat membantu dalam program. Bapak saad sangat berjasa disini selalu mebantu warga disini untuk mendapatkan bantuan.” (Wawancara dengan Mamruhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Kemudian untuk keahlian KPP di Kelurahan Warung Jaud dipaparkan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan:

“Melihat dari perawatan bagus karena kalau tidak dirawat berarti KPP tidak bekerja namun ini prasarananya dirawat. Ini MCK sudah dijadikan pameran di tingkat polres menang kemudian MCK kita dijadikan lomba ditingkat kecamatan menang juga.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Hal serupa juga dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Margaluyu bahwa KPP yang terdapat di Kelurahan Margaluyu memiliki kompetensi dan memadai, yang menyatakan sebagai berikut:

“KPP sangat bagus karena kalau ada yang rusak langsung lapor ditangani tapikan KPP juga punya kesibukan lain jadi menunggu 1 jam atau 2 jam.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Kemudian pernyataan dari staff Kelurahan Margaluyu juga memaparkan mengenai kinerja dari BKM, yang menyatakan:

“Kinerjanya bagus karena koordinasinya bagus dengan KPP. BKM dan KPP melaksanakan tugas sesuai pedoman.” (Wawancara dengan Yuyu Sutisna, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 15:25 WIB)

Pernyataan terkait kompetensi yang dimiliki BKM Kelurahan Kilasah juga dipaparkan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Kilasah, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau BKM sudah memadai karena sudah senior dan kalau ada apa-apa koordinasi, kalau untuk KPP kurang mengetahui.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Pernyataan terkait kinerja KPP Kelurahan Kilasah disampaikan oleh masyarakat Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Puas dengan kinerja BKM dan KPP, tapi ada kerusakan tempat sampah itu sudah lapor tapi biasanya lama diperbaikinya. Disini perawatannya awal awal saja setelah itu yasudah dibiarkan karena masyarakatnya susah.” (Wawancara dengan Jumaroh, Kelurahan Kilasah, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 14:37 WIB)

Pihak Bappeda juga menyatakan hal berikut terkait dengan kompetensi BKM dan KPP, yaitu mengatakan:

“Sudah menjalani dengan baik kalau BKM, kalau KPP itu masih terkendala dengan iuran yang suka telat karena kita juga tidak dapat memaksakan masyarakat untuk membayar.” (Wawancara dengan Dedi Cahyadi, SKM., M.Si, Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 10:24 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan kinerja BKM dikatakan berkompetensi dan melakukan tanggung jawabnya. Namun untuk KPP terkhusus KPP di Kelurahan Kilasah kurang tanggap dengan prasarana yang rusak karena kendala biaya perawatannya. Dimana masyarakat sulit untuk ditagih iuran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan prasarana. Sehingga prasarana yang rusak yaitu tempat sampah tidak dapat secepatnya ditindak untuk dirapihkan kembali.

Tabel 4.11
Susunan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), RW 001
Kelurahan Margaluyu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	H. Ajang	Ketua	SLTA	Buruh
2	Entis. S	Sekretaris	SLTP	Buruh
3	Enti. R	Bendahara	SLTP	IRT
4	Apen	Anggota	SD	Buruh
5	Mahdar	Anggota	SD	Buruh
6	Trisno	Anggota	SLTP	Buruh
7	Dodo	Anggota	SLTP	Buruh

(Sumber: Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Margaluyu Tahun 2016)

Tabel 4.12
Susunan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), RW 005
Kelurahan Margaluyu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Omon	Ketua	SLTA	Buruh
2	Ade Sahari	Sekretaris	SLTP	Buruh
3	M. Muhidin	Bendahara	SLTP	Wiraswasta
4	Maman	Anggota	SD	Buruh
5	Suhudin	Anggota	SD	Buruh
6	Nandang	Anggota	SLTP	Buruh
7	Otang	Anggota	SD	Buruh

(Sumber: Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Margaluyu Tahun 2016)

Tabel diatas merupakan susunan pengurus kelompok pemanfaat dan pemelihara yang terdapat di Kelurahan Margaluyu. Dimana terdapat 2 KPP karena pelaksanaan program NUSP-2 ini dilaksanakan di 2 RW sehingga dibutuhkan 2 KPP untuk dapat mendorong partisipasi warga agar dapat menjaga dan memelihara prasarana yang ada. Kemudian berikut susunan pengurus KPP di Kelurahan Kilasah:

Tabel 4.13**Susunan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), RW 001
Kelurahan Kilasah**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	H. Sarpan	Ketua	SLTP	Buruh
2	Muhdori	Sekretaris	SLTP	Wiraswasta
3	Rohayah	Bendahara	SLTA	IRT
4	Samnun	Anggota	SD	Buruh
5	Sakum	Anggota	SD	Buruh
6	Jajuli	Anggota	SD	Buruh
7	Hariri	Anggota	SLTP	Wiraswasta

(Sumber: Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Kilasah Tahun 2016)

Tabel 4.14**Susunan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), RW 002
Kelurahan Kilasah**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Holani	Ketua	SLTP	Buruh
2	Satibi	Sekretaris	SLTP	Wiraswasta
3	Madlari	Bendahara	SLTA	IRT
4	Damin	Anggota	SD	Buruh
5	Hamami	Anggota	SD	Buruh
6	Muklis	Anggota	SD	Buruh
7	Musa	Anggota	SD	Wiraswasta

(Sumber: Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Kilasah Tahun 2016)

Pada kelurahan Kilasah juga terdapat 2 kelompok pemanfaat dan pemelihara karena pelaksanaan program NUSP-2 yang dilaksanakan di 2 lingkungan yaitu di Kampung Kilasah dan Kampung Kalipang-pang. Namun untuk keahlian KPP juga bisa dilihat dari pendidikan terakhirnya, dimana pendidikan terakhir untuk ketua rata-rata SLTA dan SLTP namun pendidikan terakhir bukan penentu sepenuhnya kompetensi yang dimiliki oleh KPP. Pembentukan KPP tersebut berdasarkan keputusan masyarakat jadi masyarakat yang lebih mengetahui mengenai keahlian dari masing-

masing pengurus. Maka kinerja dari pengurus badan keswadayaan masyarakat dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang bagus tidak terlepas dari penentuan atau pemilihan pengurus yang sesuai prosedur pula. Informasi selanjutnya berkenaan dengan apakah pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut jawaban terkait hal tersebut dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyatakan:

“Pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan pedoman karena sudah melalui musyawarah dengan masyarakat. Kita tidak bisa mengintervensi masyarakat karena masyarakat yang dapat menentukan siapa ketua siapa anggotanya.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Pihak Kelurahan Kilasah juga memaparkan jawabannya terkait pemilihan BKM dan KPP, yaitu sebagai berikut:

“Caranya itu dulu masyarakat dikumpulkan dan diadakan musyawarah. Pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan prosedurnya juga.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ketua BKM Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Iya sesuai prosedur yang ada karena dilakukan dengan musyawarah.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Terkait pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu juga dipaparkan oleh pihak kelurahan, yang menyatakan:

“Kalau BKM sudah lama dari program sebelumnya, kalau KPP pemilihannya juga musyawarah dari tingkat RT kemudian RW lalu

dibawa ke kelurahan.” (Wawancara dengan Yuyu Sutisna, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 15:25 WIB)

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Masyarakat Kelurahan Margaluyu, yang mengatakan:

“Waktu itu kurang tahu, BKM itu katanya tahun 2012. Kalau KPP waktu itu hanya yang dikumpulin tokoh masyarakat karena disini susah untuk mengumpulkan masyarakat jadi langsung saja musyawarah yang ada disetujui misal si A yang mampu bertanggung jawab.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Kemudian terkait informasi tersebut di Kelurahan Warung Jaud juga dilakukan dengan musyawarah yang dipaparkan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud:

“Sebelum ada program NUSP-2 sudah ada BKM, awalnya dari tingkat RT RW lalu dibawa ke kelurahan. Kalau KPP itu dibentuk di musyawarah kelurahan dibentuk KPP sebagai perawat dari bangunan itu, dan tetap melibatkan masyarakat siapa saja kandidatnya kemudian dipilihlah saat musyawarah. Pemilihan sesuai dengan petunjuk teknis karena kita langsung melihat dari petunjuk teknis itu.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa seluruh kelurahan telah melakukan pemilihan pengurus badan keswadayaan dan kelompok pemanfaat dan pemelihara sesuai dengan ketentuannya yaitu melewati musyawarah. Kemudian juga dalam informasi selanjutnya berkenaan dengan apakah pengurus BKM dan KPP memiliki pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Dimana yang dikatakan oleh Ketua KPP Kilasah, yang menyatakan bahwa:

“Ada pedomannya hanya saya tidak dikasih jadi tidak ada.”
(Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7
Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Kemudian dari Ketua KPP Kelurahan Margaluyu juga menyampaikan jawabannya, yaitu sebagai berikut:

“Dapat dokumen tatacara pemanfaatan saat pelatihan.”
(Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4
Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Lalu Ketua BKM dari Kelurahan Warung Jaud juga memaparkan jawaban yang sama, yaitu sebagai berikut:

“Kita juga ada dokumen karena kita nanti ada laporannya.”
(Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7
Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara terkait dimensi kecukupan bahwa pengurus badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara sudah memiliki kompetensi yang bagus dalam melaksanakan program NUSP-2. Berdasarkan pedoman umum program NUSP-2 dimana tugas BKM yang sangat banyak dan dituntut harus sangat bertanggung jawab dengan program dikarenakan tugas BKM yang menentukan program NUSP-2 berjalan lancar atau tidak. Para pengurus sangat memadai dan bertanggung jawab akan tugasnya, hanya saja memang di Kelurahan Kilasah Kinerja KPP dirasa masih kurang karena KPP belum dapat meggerakkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan memelihara prasarana yang ada. Bahkan kerusakan tempat sampah disana juga membuat salah satu permasalahan untuk KPP, dimana warga sudah lapor akan hal tersebut namun belum ada tanggapan untuk diperbaiki. Bagusnya

kinerja BKM dan KPP juga tidak terlepas dari pemilihan dan pedoman yang menjadi acuan keraja mereka. Pemilihan BKM dan KPP di 3 kelurahan tersebut yang terdapat di Kecamatan Kasemen sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana pemilihannya melalui musyawarah sehingga masyarakat dapat memilih orang yang dapat dipercaya dalam mengurus pelaksanaan program NUSP-2. BKM dan KPP juga mendapatkan dokumen untuk pelaksanaan program NUSP-2 sehingga pelaksanaannya juga telah sesuai dengan prosedur yang ada. BKM dan KPP yang ada dapat dikatakan telah memadai kompetensinya, walaupun memang terdapat KPP di Kelurahan Kilasah yang kurang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat agar merawat prasarana yang ada.

4.4.4. Pemerataan

Pemerataan merupakan dimensi selanjutnya dalam evaluasi yang terdapat pada teori William Dunn. Pemerataan berkenaan dengan bagaimana suatu manfaat dari sebuah program yang telah dilaksanakan dapat terdistribusikan dengan merata. Informasi terkait dengan ketepatan pelaksanaan program NUSP-2 terdapat di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Warung Jaud dan Kelurahan Margaluyu. Dimana menurut Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda menyatakan bahwa sudah tepat, yang dipaparkan sebagai berikut:

“Kalau untuk ketepatan sudah karena sudah sesuai dengan SK, kita juga menyesuaikan dengan SK yang telah ada, karena SK itu hanya

bukan sebatas kemauan namun juga identifikasi terlebih dahulu.” (1 Maret 2019, Pukul 10:24 WIB di Ruang Badan Perencanaan Wawancara dengan Dedi Cahyadi, SKM., M.Si, Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 10:24 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial

Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Kelurahan Kilasah sangat tepat menerima program NUSP-2 karena dengan adanya pembangunan prasarana seakan akan masyarakat diberi contoh untuk membangun juga salah satunya mck. Sekarang masyarakat banyak yang gali bikin sepiteng dulu tapi kamar mandinya belum, dengan sendirinya masyarakat mengikuti walaupun dicicil.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Terkait informasi tersebut di Kelurahan Margaluyu juga masyarakat merasa program NUSP-2 sangat tepat seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“Program NUSP-2 sangat tepat karena banyak yang tidak punya MCK juga.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Kemudian Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud juga memaparkan mengenai ketepatan, yaitu sebagai berikut:

“Sangat tepat sekali karena jika tidak dihantam dengan program NUSP-2 khususnya wilayah Sadiyah sangat kumuh sekali tapi dari program NUSP-2 juga kurang makanya itu kolaborasi dengan kotaku dan perkim.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Tabel 4.15
Rekapitulasi Data Kemiskinan Kota Serang Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Serang	9600	8529	18129
2	Cipocok Jaya	7836	6733	14569
3	Curug	4480	3910	8390
4	Walantaka	6182	5426	11608
5	Kasemen	19540	16923	36463
6	Taktakan	6006	5326	11332
	Jumlah	53644	46847	100491

(Sumber: Data Dinas Sosial Kota Serang)

Dari tabel 4.15 mengenai angka kemiskinan di Kota Serang kita dapat mengetahui bahwa angka kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Kasemen sebesar 36.463 jiwa. Dimana kemiskinan merupakan salah satu penyebab adanya permukiman kumuh karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari data tabel 4.7 tersebut bahwa program NUSP-2 ini sangat tepat diberikan kepada Kecamatan Kasemen. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan ketepatan pelaksanaan program NUSP-2 di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kasemen dirasa sangat tepat karena telah mampu membantu warga dalam beraktivitas. Ketepatan tersebut juga berdasarkan surat keputusan yang ada untuk pelaksanaan program NUSP-2. Walaupun menurut pihak Bappeda saat peneliti melakukan wawancara mengatakan bahwa seluruh kelurahan di Kecamatan Kasemen berstatus miskin karena kemiskinan dan kekumuhan itu dapat dikatakan hampir sama, namun tidak semua kelurahan mendapatkan program NUSP-2 ini karena 3 kelurahan tersebut dianggap menjadi kelurahan yang lebih memerlukan penanganan segera dari

kelurahan lainnya. Dengan adanya program NUSP-2 ini sangat membantu menangani permukiman kumuh di wilayah kelurahan tersebut walaupun belum sepenuhnya tuntas.

Ketepatan program NUSP-2 tersebut juga sesuai dengan kondisi di wilayah kelurahan yang mendapatkan program. Berikut informasi selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud. Mengenai kondisi tersebut dipaparkan jawaban dari Kasi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, yang menyatakan:

“Kondisi masyarakat disana pertama kurang peduli akan kondisi lingkungan, kurang peduli akan wilayah sekitarnya mereka beranggapan bahwa program yang dibangun itu pemerintah juga yang harus memeliharanya, mereka menerima saja diberi program namun untuk merubah kesadaran masyarakat itu sangat sulit karena kurang peduli akan lingkungannya. Tugas beratnya yaitu merubah kebiasaan dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan itu sulit karena melibatkan dari dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan, dinas pendidikan karena sedini mungkin anak-anak itu harus diberikan pengetahuan mengenai lingkungan.” (Wawancara dengan Lia Amalia, ST, Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Senin, 25 Februari 2019, Pukul 10:15 WIB)

Hal serupa terkait kondisi juga dibenarkan oleh Ketua KPP Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Masyarakat disini pada kurang peduli sama lingkungan, masih ada saja yang ke sungai kalau untuk buang sampah padahal sudah disediakan.” (Wawancara dengan Samnun, Kelurahan Kilasah, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 13:05 WIB)

Hal lain juga disampaikan oleh Ketua KPP Kelurahan Margaluyu, yaitu sebagai berikut:

“Secara ekonomi masyarakat disini buruh tani dan buruh lepas. Saya pikir bantuan pemerintah ini setelah masyarakat dibantu masyarakat selalu mengharapkan terus.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Kemudian Lurah dari Kelurahan Warung Jaud juga menyampaikan jawaban terkait dengan kondisi Kelurahan Jaud, yang menyatakan bahwa:

“Ya kalau disini masyarakat kesadarannya kurang, pemerintah membangunnya infrastruktur harusnya SDM nya dulu ya, karena kesadarannya belum nampak. Kalau ekonomi kalau dilihat dari permintaan dari SKTM banyak.” (Wawancara dengan H. Saifulloh, S.Ap., M.Si, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 11:19 WIB)

Tabel 4.16

Mata Pencaharian Sebagian Besar Penduduk di Kecamatan Kasemen Tahun 2017

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk per Km ²	Mata Pencaharian
1	Kasemen	2440,45	Perdagangan
2	Warung Jaud	2342,44	Pertanian
3	Mesjid Priyayi	2551,06	Pertanian
4	Bendung	1512,33	Pertanian
5	Terumbu	1593,27	Pertanian
6	Sawah Luhur	681,30	Pertanian
7	Kilasah	11126,64	Pertanian
8	Margaluyu	1467,86	Pertanian/ Nelayan
9	Kasunyatan	2670,28	Pertanian
10	Banten	2566,14	Pertanian/ Nelayan
Kasemen		1703,19	-

(Sumber: Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara terkait kondisi masyarakat di 3 kelurahan tersebut memang terlihat bahwa keadaan ekonomi mereka

masih dapat dikatakan kurang karena rata-rata pekerjaan dari masyarakat disana tidak tetap hanya sebagai buruh tani yang dimana sawah tersebut bukan miliknya, kemudian pekerja serabutan jadi penghasilan mereka tidak pasti. Hal tersebut juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Kasemen khususnya Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Warungg Jaud dan Kelurahan Kilasah bermata pencaharian sebagai petani. Seperti yang telah diungkapkan pihak Bappeda bahwa kemiskinan dan kekumuhan itu hampir sama. Kemudian juga dengan kondisi tersebut masyarakat juga kurang memiliki kepedulian akan lingkungannya. Walaupun sudah diberi program oleh pemerintah mereka kurang kesadaran untuk dapat ikut menjaganya.

Informasi selanjutnya berkenaan dengan keadilan yang dirasakan masyarakat dengan prasarana yang telah disediakan. Dimana menurut pendapat masyarakat Kelurahan Kilasah mengenai keadilan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya yang banyak menggunakan RT 4 namun diletakkan disana MCK, tidak ada protes dari warga karena memang lahannya adanya disana, sebenarnya kadang suka mengeluh tetapi bagaimana lagi ada lahannya disini.” (Wawancara dengan Jumaroh, Kelurahan Kilasah, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 14:37 WIB)

Kemudian kalau jawaban dari masyarakat Kelurahan Margaluyu akan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

“Merasa adil saja dan tidak ada protes dari warga lain juga, soalnya sudah tepat disitu karena kalau MCK yang banyak tidak punya di wilayah sana kalau bak sampah setiap rumah dapat.” (Wawancara

dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Selanjutnya berikut jawaban dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Merasa adil aja dan tidak ada yang protes karena sekarang kebanyakan sudah punya WC yang tidak punya pada kesini gitu saja tidak ada yang masalah.” (Wawancara dengan Mamruhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Tabel 4.17

Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen

No	Kelurahan	Kampung	Luas Kumuh
1	Margaluyu	Kp. Ambon	3.61
		Kp. Padek	4.82
2	Kilasah	Kp. Kilasah 3	4.66
		Kp. Kali Pampang	6.75
3	Warung Jaud	Kp. Sa'diah 1	14.04
		Kp. Sa'diah 2	
Jumlah			33,88

(Sumber: SK Walikota Serang Nomor 400/Ke.223-Huk/2015 tentang Penetapan Lokasi Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 di Kota Serang Tahun 2015-2017)

Berdasarkan tabel 4.17 tersebut bahwa pelaksanaan NUSP-2 sudah secara merata dilaksanakan di 6 titik kampung tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan keadilan prasarana yang ada, masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apalagi mengenai letak mck, mereka menerima saja diletakkan di wilayah tersebut karena memang ketersediaan lahan yang ada. Dalam program NUSP-2 ini dalam membangun prasarana seperti MCK dan sarana air bersih menggunakan lahan hibah, jadi dalam membangun prasarana tersebut harus dengan kesediaan pemilik lahan

untuk memberikannya. Mereka juga sudah puas karena telah disediakan prasaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dimensi pemerataan ini yang dimana masyarakat merasa sudah adil dengan prasarana yang diberikan. Dimana keadilan tersebut dirasakan masyarakat juga karena sesuai dengan kondisi yang terdapat di kelurahan tersebut. Kondisi di kelurahan tersebut juga masih banyak yang belum memiliki kamar mandi seperti yang sudah diungkapkan pihak Kelurahan Kilasah. Kemudian penghasilan dari masyarakat disana juga kurang karena rata-rata pekerjaan mereka buruh tani dan pegawai serabutan jadi penghasilannya tidak menentu. Hal tersebut diperparah dengan kesadaran mereka akan lingkungan yang masih kurang. Sehingga menurut informan yang telah peneliti wawancarai bahwa program NUSP-2 ini sangat tepat didapatkan oleh Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud.

4.4.5. Responsivitas

Responsivitas merupakan dimensi selanjutnya dalam evaluasi yang terdapat pada teori William Dunn. Dimana responsivitas berkenaan dengan bagaimana hasil dari dilaksanakannya suatu program dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok masyarakat. Tujuan dari adanya program NUSP-2 untuk menangani permukiman kumuh yang terdapat di wilayah perkotaan dengan menyediakan prasarana lingkungan seperti mck, sarana air bersih, persampahan, dan jalan lingkungan. Dimana

masyarakat juga harus memanfaatkan prasarana yang telah diberikan. Jika prasarana tersebut tidak digunakan maka hasil prasarana dari program NUSP-2 ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu berikut akan dibahas informasi mengenai apakah masyarakat memanfaatkan prasarana dari hasil program NUSP-2. Berikut tanggapan dari masyarakat Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Masyarakat memanfaatkan prasarana yang ada, tetapi motor sampah tidak digunakan. Jadi kita kalau buang sampah ya di kali kalau tidak ke kebun kalau tidak ya langsung buang ke TPS sendiri aja.” (Wawancara dengan Mamruhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Pernyataan dari masyarakat tersebut juga didukung oleh pernyataan dari informan berikut yaitu Ketua KPP Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Masyarakat memanfaatkan seperti MCK sama sarana air bersih, tapi kalau sampah terus terang itu motor diberikan ke mantan RW jadi tidak digunakan untuk mengangkut sampah hanya kalau ada kegiatan masyarakat saya meminjam tapi setelah itu digunakan pribadi. Kalau untuk sampah jadi sekarang sendiri-sendiri, itu saja ada bak sampah tidak digunakan.” (Wawancara dengan Marsaid, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 19:21 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Kalau yang sudah maksimal itu jalan, MCK, sarana air bersih itu sudah maksimal, yang sampah sudah dimanfaatkan tetapi karena memang kurang keterampilan mengenai mesin yang memegang motor jadi kalau rusak bingung karna enggak punya pemahaman tentang mesin karena kalau bekas sampah terkena air yang asin jadi suka mengalami kerusakan.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa prasarna program NUSP-2 ini masih ada yang belum dimanfaatkan. Walaupun mck, jalan dan sarana air bersih sudah cukup dimanfaatkan namun mengenai motor sampah belum juga dimanfaatkan. Terlihat juga dari pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa karena motor sampah tidak dimanfaatkan maka mereka membuang sampah di kali atau area persawahan atau terkadang langsung di TPS. Padahal salah satu tujuan diadakannya prasarana persampahan ini agar mengurangi aktivitas masyarakat dalam pembakaran sampah dan juga membuang sampah sembarangan seperti di kali ataupun di area perumahan.

Gambar 4.8

Sampah yang Dibuang di Area kebun



(Sumber: Peneliti, 2019)

Peneliti juga mewawancarai masyarakat mengenai pemanfaatan prasarana hasil program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat memanfaatkan prasarana yang dibangun karena dulu sebelum ada bantuan masyarakat kerepotan. Sementara ini karena tempat pembuangan sampah sementara tidak ada jadi masih ada kendala jadi biasanya masyarakat buang sampah sembarangan dan kadang juga buang dikali. Jadi tempat sampahnya itu kurang digunakan.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ketua KPP Kelurahan Margaluyu, yang menyatakan:

“Kalau untuk MCK sama sarana air bersih digunakan sama masyarakat karena kebanyakan pada belum memiliki kamar mandi, tapi gerobak sama motor sampah belum digunakan karena memang tidak ada TPS nya, harapannya memang adanya TPS itu namun kendalanya TPS nya tidak ada. Setiap ada program suka mengajukan hanya lahannya tidak ada.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa menurut observasi peneliti saat melihat prasarana yang telah dibangun dalam program NUSP-2 untuk MCK dan sarana air bersih memang digunakan oleh masyarakat. Namun permasalahan yang sama dengan Kelurahan Warung Jaud juga terjadi di Kelurahan Margaluyu yaitu prasarana persampahan yang tidak digunakan. Masyarakat masih membuang sampah sembarangan seperti area kali dan tanah kosong sekitar rumah. Kendala tidak digunakannya prasarana persampahan yang ada di Kelurahan Margaluyu ini karena mereka tidak memiliki TPS sehingga setelah dibuang di tempat sampah mereka kebingungan harus mengangkut kemana. Berikut keadaan di lapangan yang memperlihatkan

bahwa masyarakat masih memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan tempat pembuangan sampah.

Gambar 4.9

Tempat Pembuangan Sampah di Permukiman Kelurahan Margaluyu



(Sumber: Peneliti, 2019)

Berikut hasil wawancara di Kelurahan Kilasah mengenai pemanfaatan prasarana hasil program NUSP-2, dimana masyarakat menyatakan bahwa:

“Semua prasarana yang ada dimanfaatkan kaya MCK, sarana air bersih, gerobak sampah gitu digunakan.” (Wawancara dengan Jumaroh, Kelurahan Kilasah, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 14:37 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Kilasah yang menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat sudah memanfaatkan prasarana terutama sarana air bersih karena biasanya masyarakat sini kalau mencuci di kali kalau kali tersebut tidak air dan dalam masa perbaikan baru sarana air bersih itu sangat digunakan. Tapi memang tempat sampahnya juga pada rusak itu belum diperbaiki tapi masih bisa dipakai saja sama warga karena itumah kendala uang karena sulit masyarakat

ditagih.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Pernyataan tersebut juga serupa dengan yang dikatakan oleh Ketua KPP Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Kalau disini semuanya dimanfaatkan apalagi motor sampah juga dipakai karena kita tidak memiliki TPS jadi sampah kita dibuangnya di Kaligandu sana.” (Wawancara dengan Samnun, Kelurahan Kilasah, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 13:05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terdapat di 3 kelurahan tersebut terlihat bahwa Kelurahan Warung Jaud dan Kelurahan Margaluyu belum maksimal dalam memanfaatkan prasarana persampahan dan untuk Kelurahan Kilasah walaupun tempat sampah rusak juga saat peneliti melakukan observasi ada yang digunakan ada pula yang tidak. Namun untuk prasarana lain sudah maksimal digunakan oleh masyarakat. Seperti mck dan sarana air bersih sudah dimanfaatkan secara maksimal karena prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Namun mengenai prasarana persampahan yang tidak digunakan tersebut belum menyelesaikan permasalahan persampahan, dimana yang awalnya tujuan adanya prasarana persampahan ini agar masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah dan tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti di kali dan di area permukiman. Jadi sampai saat ini masyarakat masih melakukan hal tersebut sehingga prasarana yang ada belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun untuk Kelurahan Kilasah sudah maksimal digunakan prasarana yang ada hasil program NUSP-2. Hanya saja kendalanya di Kelurahan Kilasah ini tidak memiliki TPS

sehingga kalau membuang sampah harus dibuang di TPS Kaligandu. Kemudian juga tempat sampah yang sampai saat ini masih banyak yang rusak sehingga banyak tempat sampah juga yang tidak digunakan.

Dengan tidak dimanfaatkannya prasarana hasil program NUSP-2 tersebut maka terdapat usaha yang dilakukan oleh BKM, KPP ataupun pihak kelurahan agar prasarana tersebut digunakan lagi. Terkait dengan usaha yang dilakukan oleh para pengurus di Kelurahan Warung Jaud disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Sudah ada usaha agar dimanfaatkan hanya itu motornya hanya satu sehingga tidak maksimal karena RTnya banyak sedangkan motornya hanya satu. Kebingunagannya dari motor itu karena kurang, kalau dimanfaatkan nanti yang lain iri.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Lurah dari Kelurahan Warung Jaud yang menyatakan bahwa:

“Setiap ada kumpulan saya selalu mengingatkan kepada masyarakat agar dimanfaatkan prasarana yang sudah dibangun. Kalau untuk motor sampah saya paling koordinasi sama BKM nya untuk bisa dipakai.” (Wawancara dengan H. Saifulloh, S.Ap., M.Si, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 11:19 WIB)

Kemudian yang terjadi di Kelurahan Margaluyu inis prasarana persampahan tidak digunakan karena mereka tidak memiliki TPS sehingga mereka kebingungan harus membuang kemana. Maka dari itu terdapat usaha juga dilakukan di Kelurahan Margaluyu agar dapat digunakan

kembali prasarana yang ada, berikut pernyataan dari Ketua KPP Kelurahan Margaluyu yang menyatakan:

“Saya juga ingin sudah dikasih dimanfaatkan tapi kita tidak punya TPS jadi bingung mau dibuang kemana. Kalau ada program-program suka mengajukan kita tapi kalau mengajukan gitu biasanya tanahnya harus hibah. Sedangkan TPS itu hanya bisa dibuat di pinggir jalan tetapi itu tanah PU jadi sulit.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Kemudian berikut usaha yang dilakukan dari Kelurahan Kilasah terkait dengan banyaknya tempat sampah yang rusak. Berikut pernyataan dari Ketua BKM Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa:

“Sempat saya kumpulkan masyarakat jadi yang tidak mau ikut iuran silahkan saja daripada mengacak acak pembukuan yang mau daftar silahkan daftar yang tidak juga tidak apa-apa. Pada saat itu banyak yang daftar namun kalau melihat tagihanya begitu lagi pada macet lagi. Maka dari itu mulai dari sekarang kalau misalnya bulan ini tidak bayar yasudah tidak usah dipedulikan dan sampahnya juga tidak diambil agar mereka berpikir.” (Wawancara dengan Hadirah, Selasa, Kelurahan Kilasah, 26 Februari 2019, Pukul 11:22 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut baik pengurus maupun pihak kelurahan juga sudah mencoba untuk melakukan usaha agar prasarana yang ada dapat digunakan kembali. Seperti yang terdapat di Kelurahan Warung Jaud juga mengenai motor sampah yang tidak digunakan dilakukan usaha agar dapat dimanfaatkan motor sampah tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu saat ada kesempatan lurah selalu menyampaikan agar masyarakat selalu memanfaatkan prasarana yang telah disediakan dan dari BKM juga berusaha untuk mencari orang pengganti yang dapat bertanggung jawab dengan motor sampah tersebut. Kemudian juga usaha dilakukan oleh pengurus di Kelurahan Margaluyu yang dimana

setiap terdapat program mengajukan dibuatkan TPS namun kendala disana yaitu tidak tersedianya lahan. Lalu di Kelurahan Kilasah juga Ketua BKM telah mencoba mengumpulkan masyarakat agar dapat lancar kembali membayar iuran dan dapat memperbaiki prasarana yang rusak.

Terkait dengan tidak dimanfaatkannya prasarana yang ada itu juga berhubungan dengan prasarana yang dibangun harus sesuai dengan survey kampung sendiri. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah, yang menyatakan bahwa:

“Disini prasarana yang dibangun sudah sesuai dengan survey kampung sendiri.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Margaluyu yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembangunan prasarana sesuai dengan survey kampung sendiri karena dilihat juga sama apa yang diajukan.” (Wawancara dengan Umar, Kelurahan Margaluyu, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16:19 WIB)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Prasarana yang dibangun sesuai survey kampung sendiri, dari survey kampung sendiri kan melihat apakah kampung kita ini perlu dibangun, nantikan muncul permasalahan apa saja yang muncul kemudian dipelajari apa saja yang harus dibangun setelah survey itu.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Tabel 4.18
Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana di Kelurahan Kilasah Tahun 2017

No	Jenis Prasarana	Volume Kegiatan
1	Drainase	L = 30 cm dan L= 70 cm
2	Sarana Air Bersih	3 unit
3	MCK	1 unit
4	Gerobak Sampah	4 unit
5	Tutup Saluran	76 m ²

(Sumber: Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Kilasah Tahun 2017)

Gambar 4.10

Laporan Manajemen Proyek NUSP-2 Tahun 2017

15 Juni 2017	12 September 2017	Pembangunan saluran Drainase	L= 30 cm , T = 30 cm	41,00	m'
		Pembangunan saluran Drainase	L= 70 cm , T = 70 cm	186,00	m'
		Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	P= 3 m L= 2 m , T = 5 m	3,00	Unit
		Pembangunan MCK	P= 8 m L= 6 m	1,00	Unit
		Pengadaan Gerobak Sampah	P = 140 cm, L = 60 cm T = 100 cm	4,00	Unit

(Sumber: Laporan Manajemen Proyek NUSP-2 Tahun 2017)

Tabel 4.18 merupakan hasil perencanaan prasarana berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam survey kampung sendiri pada Kelurahan Kilasah. Dimana pembangunan yang saat ini berada di Kelurahan Kilasah terdapat 5 hasil prasarana. Kemudian gambar 4.8 merupakan laporan manajemen proyek NUSP-2 tahun 2017. Dimana jika kita lihat bahwa dalam perencanaan teknis terdapat pengusulan prasarana yang dibangun terdapat 5 poin. Namun dalam laporan manajemen proyek hanya terdapat 4 poin saja yang teralisasi. Satu poin yaitu tutup saluran drainase tidak terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pembangunan prasarana yang berada di Kelurahan Kilasah dan Warung Jaud telah sesuai dengan survey kampung sendiri. Dimana menurut informan yang sudah peneliti wawancara, menyatakan bahwa prasarana yang dibangun sudah sesuai dengan survey kampung sendiri. Prasarana seperti MCK dan SAB yang disediakan digunakan seperti di wawancara yang sudah peneliti paparkan di pembahasan halaman 134 walaupun memang masih ada yang belum digunakan akibat kendala lainnya. Dengan adanya kesesuaian tersebut dianggap masyarakat merasa prasarana yang sudah dibangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Informasi selanjutnya yaitu berkenaan dengan kerusakan prasarana hasil program NUSP-2. Peneliti akan menyajikan pembahasan terkait dengan apakah kerusakan prasarana hasil program NUSP-2 ditangani dengan cepat. Berikut salah satu pemaparan informan yaitu masyarakat dari Kelurahan Margaluyu:

“Kalau ada prasarana yang rusak biasanya langsung lapor saja nanti akan ditanganin KPP, hanya KPP punya kesibukan lain jadi harus menunggu 1 atau 2 jam saja.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Kemudian mengenai hal tersebut juga dipaparkan jawabannya oleh Masyarakat Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Kalau ada kerusakan biasanya cepat ditangani, tapi kalau tempat sampah ini memang sudah lama hanya katanya ini karena tidak ada uang soalnya banyak yang susah ditagih iuran jadi itu juga rusak masih bisa dipakai jadi dipakai saja.” (Wawancara dengan Jumaroh, Kelurahan Kilasah, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 14:37 WIB)

Pernyataan serupa mengenai penanganan kerusakan prasarana disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Warung Jaud, yaitu sebagai berikut:

“Kalau ada kerusakan disini cepat diperbaiki kalau lapor kaya MCK kerannya suka rusak lapor saja misal lapor pagi kadang besoknya juga sudah bisa dipakai lagi.” (Wawancara dengan Mamruhhah, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 13:02 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa penanganan prasarana yang rusak cepat ditangani. Asal para masyarakat lapor ke KPP karena KPP yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Namun memang kendalanya iuran masyarakat ini sulit jadi terkadang menunggu iuran masyarakat dulu untuk dapat memperbaiki prasarana yang rusak. Bahkan Ketua KPP Kelurahan Margaluyu juga terkadang harus menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan bahwa dalam dimensi Responsivitas, yang terkait dengan pemanfaatan prasarana hasil program NUSP-2 bahwa masyarakat secara keseluruhan sudah memanfaatkan prasara nakarena prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Walaupun terdapat prasarana persampahan yang tidak digunakan di Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud, namun prasarana lainnya seperti mck dan sarana air bersih sangat digunakan oleh masyarakat disana. Kemudian prasarana yang dibangun juga sesuai dengan survey kampung sendiri maka tidak heran secara keseluruhan masyarakat di 3 kelurahan tersebut memanfaatkan prasarana yang ada.

Kerusakan prasarana juga dengan cepat ditangani menurut pernyataan dari masyarakat. Namun terkait dengan tempat sampah yang rusak di Kelurahan Kilasah itu membutuhkan dana yang besar tetapi masyarakat sulit untuk membayar iuran jadi saat ini perbaikan didahului dengan prasarana yang sangat dibutuhkan sekali.

4.4.6. Ketepatan

Ketepatan merupakan dimensi terakhir dalam evaluasi yang terdapat pada teori William Dunn. Dimana ketepatan berkenaan dengan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bermanfaat. Informasi yang akan dipaparkan terkait dengan dimensi ketepatan yaitu mengenai bagaimana manfaat dari adanya program NUSP-2 ini di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud. Dengan adanya program NUSP-2 diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam menjalankan aktivitasnya. Berikut jawaban dari informan mengenai manfaat dari adanya program NUSP-2 ini yang dikatakan oleh masyarakat di Kelurahan Margaluyu yaitu sebagai berikut:

“Sangat besar manfaat walaupun belum 100%, biasanya yang mandinya pada di kali sekarang di MCK tetapi kalau masalah sampah belum bisa mengatasi sih.” (Wawancara dengan Janim, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14:35 WIB)

Kemudian pernyataan serupa juga disampaikan oleh masyarakat dari Kelurahan Kilasah, yaitu sebagai berikut:

“Manfaat untuk warga sini enak jalannya juga sudah tidak becek dulu becek karena tanah, selokan-selokan juga sudah bagus karena dulu disini banjir sekarang sudah tidak.” (Wawancara dengan Jumaroh, Kelurahan Kilasah, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 14:37 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Banyak manfaatnya kalau hujan bingung jalannya rusak sekarang sudah bagus, secara sosial dulu pada ribut tentang pembuangan air itu sekarang ketika sudah disediakan drainase sekarang sudah pada rukun, anak sekolah dulu suka jatuh termasuk saya mengantar anak sekolah pernah jatuh karena licin dan banjir, saya ukur 25 cm bahkan anak-anak main di jalan itu. Maka dari itu saat banjir itu kita foto kita sampaikan ke pemerintah.” (Wawancara dengan Saad, Kelurahan Warung Jaud, Kamis, 7 Maret 2019, Pukul 11:17 WIB)

Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Serang juga memaparkan terkait manfaat dari adanya program NUSP-2, beliau menyatakan bahwa:

“Sangat banyak, peningkatan infrastruktur permukiman sangat terlihat bagaimana infrastuktur tersebut terbangun dimana yang tadinya jelek sekarang telah bagus. Kalau melihat hanya dengan mata setelah dibangun infrastruktur itu sudah tidak kumuh lagi lokasi tersebut namun kembali lagi kepada masyarakat kalau mereka tidak menjaga akhirnya timbul kumuh lagi.” (Wawancara dengan Dedi Cahyadi, SKM., M.Si, Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Jumat, 1 Maret 2019, Pukul 10:24 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya program NUSP-2 di 3 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen sangat bermanfaat sekali karena mampu membantu aktivitas masyarakat. Kemudian dengan adanya program ini juga mengurangi masyarakat berperilaku hidup kotor di lingkungan. Masyarakat yang biasanya beraktivitas di kali saat ini sudah pindah menggunakan MCK kemudian

dengan adanya drainase juga mengurangi banjir yang biasanya terjadi. Banyak manfaat dari adanya program NUSP-2 ini, hanya saja terkadang masyarakat kurang sadar akan merawat dan memelihara prasarana yang ada. Program NUSP-2 ini dibuat salah satu tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dimana masyarakat yang membangun prasarananya agar rasa memiliki akan prasarana tersebut tinggi.

Informasi selanjutnya yaitu berkenaan dengan prasarana yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu. Terkait hal tersebut dipaparkan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah, yang menyatakan:

“Prasarana sudah sesuai kebutuhan Kelurahan Kilasah, kalau satu dua benar namun untuk kebutuhan tidak pernah mencukupi karena kendala dana. Setelah dipenuhi pemerintah tidak mau merawatnya.” (Wawancara dengan Samsudin, Kelurahan Kilasah, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11:07 WIB)

Berikut jawaban dari ketua KPP Kelurahan Margaluyu, yang menyatakan:

“Pembangunan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat seperti ada sarana air bersih itu warga sangat terbantu kemudian MCK juga yang dulu buang sembarangan sekarang di MCK.” (Wawancara dengan Jamhadi, Kelurahan Margaluyu, Senin, 4 Maret 2019, Pukul 15:37 WIB)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Lurah Kelurahan Warung Jaud, yang menyatakan:

“Sesuai karena dulu yang jalannya becek sekarang sudah bagus kemudian saluran air juga yang dulunya tidak bagus sekarang sudah bagus juga, sudah sesuailah.” (Wawancara dengan H.

Saifulloh, S.Ap., M.Si, Kelurahan Warung Jaud, Selasa, 5 Maret 2019, Pukul 11:19 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prasarana program NUSP-2 sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud, bahwa prasarana yang ada telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana. Seperti yang diungkapkan Lurah Kelurahan Warung Jaud yang jalan lingkungan biasanya becek sekarang sudah bagus. Kemudian di Kelurahan Margaluyu juga banyak masyarakat yang tidak memiliki kamar mandi yang biasanya buang air di sembarangan sekarang di mck. Semua prasarana tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 3 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen.

Berdasarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor 663/Kep110-Huk/2018 bahwa luas lokasi permukiman kumuh terdapat di 135 titik seluas 538,75 Ha. Kemudian pada tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor 663 bahwa luas permukiman kumuh sebesar 384,508 Ha. Dimana dengan data tersebut terlihat bahwa luas permukiman mengalami penurunan, dengan begitu masyarakat juga sudah dibantu dalam mencukupi kebutuhan prasarana dasar. Berdasarkan hasil wawancara terkait dimensi ketepatan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari adanya program NUSP-2. Masyarakat diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, masyarakat merasa sangat terbantu saat ini dengan dibangunnya prasarana tersebut. Banyak hal-hal yang dahulunya sulit dilakukan sekarang menjadi mudah. Banyak sekali

manfaat yang diterima masyarakat setelah adanya program ini. Baik dari yang biasanya masyarakat harus menggunakan air kali untuk mencuci dan mandi sekarang telah disediakan kamar mandi, kemudian jalan lingkungan yang biasanya becek sekarang masyarakat bisa menikmati jalan dengan mudah. Dengan adanya sarana air bersih masyarakat juga masyarakat bisa mendapatkan air bersih, kemudian di beberapa kelurahan bisa terjadi banjir karena drainase yang kurang rapih atau bahkan tidak ada sekarang masyarakat sudah tidak kebanjiran lagi. Dengan dimanfaatkannya sebagian prasarana NUSP-2 di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud, maka dapat terlihat bahwa memang program NUSP-2 ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan beberapa informan menyatakan bahwa memang prasarana yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun seperti yang telah dikatakan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa masyarakat selalu ingin kebutuhannya dipenuhi pemerintah namun setelah diberikan masyarakat tidak mau merawatnya. Padahal dalam program NUSP-2 masyarakat diharuskan untuk merawat dan memelihara prasarana yang telah disediakan karena tujuan dari adanya program NUSP-2 ini untuk memberdayakan masyarakat. Pada program NUSP-2 juga masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan perawatan karena pemerintah ingin masyarakat tidak selalu menerima saja namun juga dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Sehingga timbul

rasa memiliki akan prasarana yang telah dibangun atau telah disediakan dalam program NUSP-2.

4.5 Pembahasan

Permukiman yang sehat merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat. Dimana dalam permukiman juga dibutuhkan prasarana pendukung lainnya seperti kamar mandi, air yang bersih, prasarana persampahan yang memadai, kemudian jalan lingkungan yang layak. Namun untuk permukiman kumuh prasarana tersebut sangat sulit ditemui. Maka dibutuhkan suatu usaha dari pemerintah untuk membuat masyarakat merasa tercukupi akan prasarana dasar lingkungan tersebut. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di perdesaan namun keadaan permukiman kumuh yang tidak dilengkapi dengan prasarana yang ada juga terjadi di wilayah perkotaan. Dimana keadaan tersebut juga dipicu salah satunya karena kondisi perekonomian yang rendah sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga timbullah kemiskinan, yang dimana kemiskinan ini merupakan pemicu adanya permukiman kumuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa

sebagai salah satu upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif’.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*. Program NUSP-2 merupakan salah satu program penangan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Pelaksanaan program NUSP-2 ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Dalam program NUSP-2 masyarakat diajak berpartisipasi baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, dalam pelaksanaan, dan juga sampai selesai pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan rasa kepedulian dan rasa memiliki akan program tersebut. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terbiasa untuk ikut berpartisipasi didalam program yang diadakan pemerintah, dan tidak hanya selalu menerima saja program-program pemerintah. Dengan begitu diharapkan mampu menimbulkan kesadaran masyarakat akan menjaga dan memelihara hasil dari adanya suatu program.

Program NUSP-2 ini dirasa sangat membantu Kota Serang dalam menangani permukiman kumuh yang terdapat di Kota Serang. Dimana salah satunya di Kecamatan Kasemen, yang menurut data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kecamatan Kasemen. Luas permukiman kumuh di Kota Serang juga paling tertinggi terdapat di Kecamatan Kasemen. Maka dari itu, Kecamatan Kasemen merupakan

salah satu kecamatan yang mendapatkan program NUSP-2 yang terdapat di Kota Serang.

Dalam hal ini juga peneliti menghubungkan antara temuan di lapangan dengan teori yang sudah ditentukan. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu model teori evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan maka dapat dipaparkan pembahasan per-dimensi dari model teori evaluasi William Dunn sebagai berikut:

4.5.1. Efektivitas

Efektivitas dalam tahapan evaluasi ini berkenaan dengan ketercapaian hasil suatu program sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai tujuan. Tujuan dari adanya program NUSP-2 ini yaitu untuk menangani permukiman kumuh yang terdapat di wilayah perkotaan. Dari hasil temuan lapangan peneliti memperlihatkan bahwa program NUSP-2 ini telah berhasil menangani permukiman kumuh sesuai dengan 7 kriteria yang ada. Dimana pada pedoman umum NUSP-2 telah ditetapkan 7 indikator kriteria permukiman kumuh yaitu jalan setapak, jalan lingkungan, drainase mikro, persampahan, sanitasi, air bersih, dan lampu penerangan jalan. Dalam program NUSP-2 ini menangani permukiman kumuh dengan memberikan prasarana dasar lingkungan untuk membantu masyarakat. Sehingga program NUSP-2 ini dari segi infrastruktur memang telah tertangani permukiman kumuh yang ada. Namun kalau dari segi perilaku yang

terlihat di 3 kelurahan yang mendapatkan program NUSP-2 yaitu Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud masih jauh karena perilaku masyarakat disana yang belum sadar dan peduli akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Perilaku dan pola pikir masyarakat yang belum peduli akan lingkungan ini juga mempengaruhi permukiman kumuh yang telah ditangani oleh infrastruktur tetap terlihat kumuh. Seluruh prasarana yang disediakan seperti mck, sarana air bersih, jalan lingkungan, sarana persampahan dan sebagainya sudah mampu menangani permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Kasemen. Dengan dibangunnya prasarana tersebut juga menurut Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah mampu membuat masyarakatnya mencontoh membuat kamar mandi sendiri dirumahnya masing-masing walaupun masyarakat dalam membuatnya tidak langsung jadi melainkan dicicil dalam membuatnya. Terlihat bahwa program NUSP-2 mampu menyadarkan masyarakat di Kelurahan Kilasah akan pentingnya memiliki prasarana dasar lingkungan salah satunya MCK walaupun tidak semua masyarakat mencontoh hal tersebut.

Kemudian pelaksanaan program NUSP-2 ini juga terdapat pedoman umum untuk melaksanakan segala pelaksanaan terkait program. Seluruh pelaksanaan program NUSP-2 harus sesuai dengan pedoman yang ada karena jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai maka dinas terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak akan menandatangani laporana yang ada. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam

pembangunan prasarana yang tidak sesuai pedoman harus diperbaiki terlebih dahulu. Dana untuk perbaikan tersebut juga berasal dari dana swadaya karena pemerintah tidak mau tahu akan kesalahan tersebut. Pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen yang terdapat di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud telah sesuai dengan pedoman yang ada. Menurut salah satu informan juga di kelurahannya sudah sesuai dengan pedoman yang ada karena jika tidak sesuai akan menimbulkan masalah. Seluru kelurahan tersebut sudah melaksanakan sesuai pedoman yang ada kerana mereka mengikuti seluruh arahan yang diberikan dan mereka juga mengetahui konsekuensi jika mereka melaksanakannya tidak sesuai dengan pedoman. Namun di Kelurahan Kilasah sempat terjadi suatu kejadian, dimana saat pembangunan selesai akan dilakukan pengecekan oleh dinas terkait namun ternyata saat diukur kembali prasarana yang dibangun ternyata panjang pembangunan drainase tidak sesuai dengan yang terdapat di laporan. Kondisi tersebut dikarenakan alat meteran yang digunakan oleh masyarakat saat pembangunan ternyata terdapat kesalahan sehingga saat pengecekan digunakan meteran yang utuh itu mengalami kesalahan. Dimana pembangunan drainase tersebut mengalami kekurangan sepanjang 11 meter, namun permasalahan telah selesai dan sudah diperbaiki.

Berdasarkan pada ketentuan dalam pedoman umum program NUSP-2 pelaksanaan kerja bahwa pelaksanaan pembangunan prasarana dilakukan 90 hari kerja. Namun pelaksanaan melebihi waktu yang ada tidak akan

dikenakan sanksi. Salah satu pendekatan dalam pembangunan program NUSP-2 pendekatan partisipatif untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan jika melebihi kontrak tidak dipermasalahkan dan tidak dikenakan sanksi karena bertujuan untuk meberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud tidak mengalami keterlambatan dalam pembangunan. Sesuai dengan yang telah dipaparkan dari pihak Bappeda bahwa mereka selalu memantau pelaksanaan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan tidak melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian jika keterlambatan tersebut terjadi biasanya hanya diberikan surat teguran saja agar pelaksanaan pembangunan bisa diselesaikan sesegera mungkin.

Dalam pelaksanaan sebuah program adanya hambatan merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Dalam pelaksanaan program NUSP-2 di 3 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen ada yang mengalami hambatan pada pelaksanaannya. Kelurahan yang mengalami hambatan yaitu Kelurahan Margaluyu, hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan yaitu dikarenakan kesulitan dalam mencari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan prasarana. Kendala tersebut juga dialami oleh Kelurahan Kilasah, menurut informan bahwa mencari lahan sangat susah dikarenakan lahan yang digunakan harus lahan hibah sedangkan sedikit apapun tanahnya kalau jika tanah tersebut dijual mampu

menghasilkan uang. Dalam program NUSP-2 setiap pembangunan prasarana dibangun diatas lahan hibah dan tidak mendapat uang ganti dari pemerintah. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab kendala dari 2 kelurahan tersebut. Namun masih terdapat masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya prasarana tersebut sehingga masih terdapat masyarakat yang bersedia menghibahkan lahannya untuk digunakan. Masyarakat tersebut berpikir bahwa mereka juga memerlukan prasarana tersebut sehingga mereka bersedia untuk menghibahkan lahannya untuk dibangun prasarana program NUSP-2 walaupun tidak mendapat uang ganti sama sekali. Namun pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud menurut informan yang telah peneliti wawancarai menyatakan bahwa tidak terdapat kendala atau hambatan di Kelurahan Warung Jaud karena masyarakat sangat mendukung adanya program NUSP-2. Hal tersebut karena masyarakat sangat mendukung adanya program tersebut sehingga masyarakat yang memiliki lahan sangat bersedia lahannya digunakan untuk pembangunan prasarana. Masyarakat berfikir bahwa daripada lahan yang mereka punya tidak digunakan maka sebaiknya digunakan untuk pembangunan prasarana karena mereka juga sangat membutuhkan prasarana tersebut. Dukungan dari masyarakat tersebut akan adanya program NUSP-2 sangat penting mengingat bahwa program NUSP-2 ini salah satunya bertujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat di setiap pelaksanaan program

NUSP-2 sehingga rasa memiliki untuk selalu memelihara terhadap prasarana yang disediakan juga tinggi.

4.5.2. Efisiensi

Efisiensi merupakan dimensi selanjutnya dalam evaluasi yang terdapat pada teori Willian Dunn. Efisiensi ini berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu hal yang berkaitan dengan dimensi ini yaitu mengenai anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan prasarana agar pelaksanaan pembangunan prasarana dapat berjalan lancar. Dalam menangani permukiman kumuh yang dibentuk dalam program NUSP-2, pemerintah meminjam dana dari ADB (*Asian Development Bank*) yang tertuang dalam perjanjian dalam perjanjian nomor 3122-INO tanggal 23 April 2014 mengenai *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2*. Anggaran yang digunakan dalam program NUSP-2 mengandalkan dari 4 sumber dana yaitu, ADB (*Asian Development Bank*), APBN, APBD, dan dana swadaya masyarakat. Dimana keempat dana tersebut sudah memiliki kegunaannya masing-masing. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur program NUSP-2 dana yang digunakan yaitu dana yang bersumber dari pinjaman ADB. Total dana yang diberikan kepada Kota Serang dalam program NUSP-2 sebesar 36 miliar rupiah. Namun dana tersebut tidak semuanya terserap untuk menangani permukiman kumuh, dari total anggaran tersebut yang terserap hanya sebesar 23 miliar rupiah dan sisa dari anggaran tersebut dikembalikan kepada pihak ADB. Kemudian setiap tahunnya juga

pemerintah daerah harus menyediakan *sharing* dana sebesar 10% setiap tahunnya untuk mendukung kegiatan di program NUSP-2. Pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2 ini dilakukan per-siklus, anggaran yang dianggarkan dalam pelaksanaan pembangunan skala lingkungan seperti yang terdapat di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kasemen yaitu sebesar 500 juta rupiah/siklus. Dari informasi informan menyatakan bahwa dana tersebut belum mencukupi karena masih banyak prasarana yang belum dibangun. Bahkan di Kelurahan Warung Jaud karena anggaran yang ada kurang mencukupi sehingga terdapat prasarana yang didukung oleh program lain. Secara keseluruhan dana yang 500 juta tersebut mencukupi dalam satu siklus, namun jika melihat prasarana yang dibangun itu masih kurang karena hanya beberapa titik saja yang mendapatkan program tersebut. Walaupun begitu di Kelurahan Margaluyu merasa tercukupi saja anggaran yang ada karena setidaknya prasarana yang dibangun sudah membantu masyarakat. Terdapatnya sisa dana dari total 32 miliar rupiah dan hanya terserap 23 miliar rupiah, hal tersebut dikarenakan memang masih terdapat sisa wilayah lokasi kumuh yang mendapatkan program NUSP-2 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota pada tahun 2015 yang belum tertangani. Dari total penanganan seluas 92,28 yang telah tertera dalam SK Nomor 400/Kep.223-Huk/2015 tersebut masih terdapat sisa seluas 14 Ha yang belum tertangani.

Usaha yang dilakukan agar hasil atau tujuan yang diinginkan tercapai maka terdapat musyawarah. Musyawarah tersebut berfungsi sebagai

wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasi dan menyampaikan kebutuhan akan prasarana dasar lingkungan apa saja yang dibutuhkan di wilayahnya. Dalam program NUSP-2 ini juga sebelum pembangunan dilakukan pembentukan dokumen NUP (*Neighborhood Upgrading Plan*) yang dimana berisi prasarana apa saja yang akan dibangun di suatu kelurahan berdasarkan pendapat dari masyarakat. Maka dalam musyawarah tersebut dapat dikatakan sangat penting karena bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan dengan pedoman umum NUSP-2 bahwa peserta musyawarah yang hadir minimal diikuti oleh 50 peserta. Namun di Kelurahan Kilasah masyarakat yang hadir tidak banyak terkadang hanya 60% saja. Setiap akan diadakannya musyawarah masyarakat selalu diundang dan diberitahu terlebih dahulu namun tetap saja masyarakat yang ikut berpartisipasi tidak banyak. Masyarakat beralasan mereka tidak datang pada saat musyawarah dikarenakan kesibukannya dan lokasi musyawarah yang jauh. Namun menurut salah satu masyarakat bahwa memang masyarakat disana susah jika diajak untuk musyawarah namun jika diberitahu mendapatkan beras atau amplop sejauh apapun itu juga masyarakat akan datang dan kesibukan yang sedang dilakukan juga akan ditunda. Musyawarah yang terjadi di Kelurahan Margaluyu hanya perwakilan saja yang diundang dalam musyawarah tersebut. Bahkan pihak masyarakat yang diundang hanya sekitar 30% dikarenakan kalau masyarakat diundang semua masyarakat akan tetap sulit untuk datang. Perwakilan warga yang datang juga ikut

berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Namun kalau di Kelurahan Warung Jaud seluruh masyarakat diundang dalam musyawarah dan masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah sangat banyak. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan prasarana yang dibutuhkan diwilayahnya sehingga terjadi interaksi yang lancar dalam musyawarah tersebut. Masyarakat sangat antusias karena wilayahnya akan dibantu dengan dibangun prasarana dasar lingkungan tersebut. Peran masyarakat dalam musyawarah sangat penting dimana salah satunya untuk membuat dokumen NUP tersebut karena masyarakat yang lebih tahu akan kebutuhan didaerahnya. Dengan msuyawarah juga masyarakat ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayahnya sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam program NUSP-2 yaitu memberdayakan masyarakat dan melibatkannya dalam perencanaan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan program.

Usaha yang dilakukan agar prasarana yang telah dibangun dimanfaatkan dan dipelihara yaitu dengan mengadakan iuran. Iuran ini digunakan untuk memelihara prasarana yang ada jika mengalami kerusakan atau sebagainya. Iuran ini juga harus sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan dengan masyarakat. Kemudian iuran yang telah ditetapkan tersebut akan dimasukkan kedalam dokumen RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) yang dimana besaran iuran sesuai dengan kebutuhan kelurahan tersebut dan sesuai dengan kesepakatan warga. Seluruh iuran yang ditetapkan dalam Kelurahan Margaluyu, Kelurahan

Kilasah dan Kelurahan Warung Jaud telah sesuai dengan ketetapan saat musyawarah. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja masih banyak masyarakat yang sulit untuk ditagih iuran tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakat disana secara ekonomi dapat dikatakan kurang karena kebanyakan masyarakat disana bekerja sebagai buruh tani dan serabutan sehingga penghasilannya tidak menentu. Namun ternyata bukan hanya masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu yang sulit membayar, masyarakat dengan kondisi ekonomi mampu juga kurang sadar akan membayar iuran tersebut.

Dalam program NUSP-2 juga terdapat pelatihan untuk BKM dan KPP agar mereka memiliki pengetahuan dalam melaksanakan program NUSP-2. Sesuai dengan alur tahapan kegiatan NUSP bahwa pelatihan tersebut diadakan 2 kali untuk BKM yang terdapat pada setelah musyawarah I dan setelah musyawarah IV dan satu kali untuk KPP dilaksanakan setelah pembangunan yaitu setelah pelaksanaan musyawarah V. Seluruh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) di Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Warung Jaud telah mengikuti pelatihan tersebut. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut berkaitan dengan kondisi permukiman kumuh, cara pembuatan laporan, pembuatan laporan serta cara pemanfaatan prasarana. Saat itu pelaksanaan dilakukan di Hotel Grand Krakatau selama 3 hari. Pelaksanaan ini sangat penting diikuti oleh BKM dan KPP agar mereka dapat mengetahui hal-hal yang harus mereka

lakukan dalam program NUSP-2 sehingga mereka mampu bertanggung jawab akan tugasnya. Dalam pelaksanaan program NUSP-2 usaha yang dilakukan agar pembangunan prasarana sesuai hasil yang diinginkan maka dilakukanlah pemantauan. Pemantauan dilakukan saat pertengahan pelaksanaan pembangunan dan juga saat pembangunan telah selesai. Pada 3 kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud dilakukan monitoring oleh pihak terkait baik saat pelaksanaan pembangunan saat 50% maupun setelah 100% untuk mengecek pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pemantauan ini memang harus dilakukan agar dapat dicek kembali prasarana yang dibangun sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan juga sesuai dengan pedoman yang ada sehingga jika terjadi kesalahan dapat segera dilakukan perbaikan.

4.5.3. Kecukupan

Dimensi kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauhnya pencapaian dari hasil yang diinginkan. Dimana akan dipaparkan mengenai bagaimana pencapaian atau kinerja yang telah dilakukan BKM dan KPP dalam melaksanakan program NUSP-2. Dari hasil penelitian peneliti saat melakukan wawancara menunjukkan bahwa kinerja dari BKM dan KPP secara keseluruhan telah memadai dan bertanggung jawab atas tugasnya. Kinerja BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud sangat bagus karena BKM disana sangat membantu warga dan selalu berkoordinasi baik

dengan warga maupun pihak kelurahan untuk melaksanakan segala hal. Kemudian KPP juga memadai karena prasarana yang ada dirawat bahkan MCK Kelurahan Warung Jaud juga berhasil menang setelah dilombakan diberbagai kegiatan yaitu di tingkat Polres dan tingkat Kecamatan. Kinerja KPP dan BKM di Kelurahan Margaluyu juga telah memadai dimana BKM selalu berkoordinasi dengan semua pihak untuk melaksanakan kegiatan, kemudian KPP juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik saat ada kerusakan prasarana juga KPP dengan segera memperbaikinya walaupun terkadang harus menunggu 1 atau 2 jam jika KPP sedang memiliki kesibukan lainnya. Kinerja BKM di Kelurahan Kilasah juga sudah memadai karena dianggap sudah senior sehingga terbiasa melaksanakan program dan koordinasi yang dijalin juga telah memadai dan bertanggung jawab akan tugasnya. Kemudian Kinerja KPP di Kelurahan Kilasah kurang dikarenakan adanya prasarana persampahan yaitu tempat sampah yang rusak di wilayah Kelurahan Kilasah namun belum juga ditangani. Masyarakat telah melapor bahwa kondisi tempat sampah yang ada telah mengalami kerusakan namun belum ada perbaikan sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan KPP belum dapat menggerakkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kilasah untuk dapat memelihara dan merawat prasarana yang ada dengan membayar iuran untuk merawat prasarana tersebut. Dana untuk melakukan perbaikan prasarana yang rusak berasal dari masyarakat namun masyarakat sangat sulit untuk membayar iuran tersebut walaupun kondisi masyarakat disana secara ekonomi rendah

karena berpenghasilan tidak menentu namun masyarakat yang mampu secara ekonomi juga sangat sulit untuk membayar iuran tersebut. Bahkan BKM telah membantu KPP untuk mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat yang memang tidak mau membayar iuran tidak dipaksakan namun sampah dari rumah mereka tidak diangkut, kalau memang masih bersedia membayar masyarakat mendaftarkan diri kembali. Masyarakat banyak yang mendaftarkan diri kembali dan bersedia untuk membayar iuran, namun pada realisasinya masyarakat sangat sulit membayar iuran. Sehingga sampai saat ini tempat sampah tersebut tidak dapat diperbaiki karena keterbatasan dana.

Berdasarkan pedoman umum program NUSP-2 dimana tugas BKM yang sangat banyak dan dituntut harus sangat bertanggung jawab dengan program dikarenakan tugas BKM yang menentukan program NUSP-2 berjalan lancar atau tidak. Kinerja yang memadai dari KPP dan BKM tersebut tidak terlepas dari penentuan dan pemilihan pengurus yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga sesuai dengan pedoman yang ada. Penentuan dan pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud telah sesuai dengan pedoman dan keinginan masyarakat. Namun memang kalau pemilihan BKM ini telah ada sebelum adanya program NUSP-2, yang telah ada dari program sebelumnya. Pemilihan pengurusnya juga dari tingkat RT, RW kemudian dibawa ke tingkat kelurahan dan dilaksanakan melalui musyawarah sehingga telah mendapatkan pengurus BKM yang dapat bertanggung

jawab akan tugasnya. Kemudian pemilihan KPP di Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Warung Jaud juga dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam pemilihannya. Hanya saja pemilihan KPP di Kelurahan Margaluyu tidak melibatkan masyarakat hanya sebatas tokoh-tokoh masyarakat karena terkendala dengan sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk diajak berpartisipasi dalam musyawarah. Sehingga musyawarah pemilihan KPP Kelurahan Margaluyu hanya melibatkan tokoh masyarakat dan kemudian dipilih yang dapat bertanggung jawab akan tugasnya. BKM dan KPP juga mendapatkan dokumen untuk pelaksanaan program NUSP-2 dan untuk tata cara pemanfaat dan pemeliharaan prasarana, dimana dokumen tersebut dibuat untuk menunjang tugas mereka dalam program NUSP-2 agar dapat lebih terarah.

4.5.4. Pemerataan

Pemerataan merupakan dimensi selanjutnya dalam evaluasi yang terdapat pada teori William Dunn. Pemerataan berkenaan dengan bagaimana suatu manfaat dari sebuah program yang telah dilaksanakan dapat terdistribusikan dengan merata. Dengan begitu peneliti harus melihat terlebih dahulu bahwa program NUSP-2 telah tepat dilaksanakan di 3 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen yaitu Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud. Program NUSP-2 telah tepat dilaksanakan di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kasemen karena lokasi tersebut sudah sesuai dengan surat keputusan yang ada.

Dikarenakan surat keputusan yang ada telah melalui identifikasi terlebih dahulu sebelum adanya penentuan tersebut sehingga lokasi yang tertera dalam surat keputusan tentang lokasi penanganan permukiman kumuh program NUSP-2 memang merupakan lokasi yang membutuhkan penanganan program NUSP-2. Dengan adanya program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah membawa dampak yang sangat positif, yaitu masyarakat dengan sendirinya mencontoh untuk membangun kamar mandi sendiri dirumahnya. Walaupun pembangunan tersebut dilakukan dengan dicicil namun dengan adanya program ini mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya prasarana dasar lingkungan ini dimiliki yaitu kamar mandi. Kemudian di Kelurahan Margaluyu juga sangat tepat adanya program NUSP-2 karena di wilayah tersebut banyak masyarakat yang tidak memiliki MCK dirumahnya. Adanya program NUSP-2 telah mampu membantu masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas seperti mandi dan mencuci di kali lagi. Lalu di Kelurahan Warung Jaud juga pelaksanaan program NUSP-2 sangat tepat karena wilayah tersebut sangat kumuh sekali khususnya di Kampung Sadih. Dimana kondisi di wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang masyarakatnya rata-rata beraktivitas di kali karena tidak memiliki MCK sendiri. Lalu kondisi jalan lingkungan yang sangat becek dan kalau hujan bisa menyebabkan banjir, kondisi tersebut juga diperparah dengan kondisi ternak disana dibiarkan berkeliaran di lingkungan rumah warga sehingga ternak-ternak tersebut buang air sembarangan yang membuat lingkungan tidak bersih. Sehingga program

NUSP-2 sangat tepat dilaksanakan di Kelurahan Kilasah untuk membantu menangani permasalahan tersebut.

Ketepatan tersebut juga sesuai dengan kondisi masyarakat di kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen tersebut. Dimana kondisi masyarakat disana yaitu kurang peduli akan kondisi lingkungannya. Mereka beranggapan bahwa program yang dibangun pemerintah juga harus pemerintah yang memeliharanya, masyarakat hanya bersedia menerima program tanpa berusaha merubah kesadaran masyarakat untuk ikut merawatnya. Maka dari itu, dalam program NUSP-2 masyarakat dilibatkan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program dan dapat merubah pola pikir masyarakat. Dimana yang terjadi di Kelurahan Kilasah masyarakatnya kurang peduli akan lingkungan dan masih saja membuang sampah di kali padahal sudah disediakan prasarana penunjang persampahan. Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh kelurahan yang mendapatkan program NUSP-2 tersebut. Kondisi secara ekonomi di Kelurahan Margaluyu juga dapat dikatakan rendah karena rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani dan serabutan sehingga berpenghasilan tidak menentu. Dimana hal tersebut juga sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa rata-rata mata pencaharian di 3 kelurahan tersebut sebagai petani. Hal tersebut membuat masyarakat untuk melengkapi rumahnya dengan MCK dapat dikatakan sulit. Secara umum kondisi dari 3 kelurahan tersebut memang masyarakat berekonomi rendah

dan diperparah dengan kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran sangat kurang akan menjaga lingkungan.

Manfaat dari adanya program NUSP-2 telah adil dan merata dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menerima program tersebut di wilayahnya. Program ini bermanfaat untuk masyarakat di wilayah yang mendapatkan program karena program NUSP-2 telah sesuai dilaksanakan di 3 kelurahan di Kecamatan Kasemen tersebut dan juga sesuai dengan kondisi yang terdapat disana. Berdasarkan SK Walikota Serang Nomor 400/Ke.223-Huk/2015 tentang Penetapan Lokasi Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 di Kota Serang Tahun 2015-2017 bahwa pelaksanaan NUSP-2 di Kecamatan Kasemen dilaksanakan di 6 titik kampung dengan total penanganan 33,88 Ha. Walaupun titik pembangunan prasarana tidak diseluruh titik yang terdapat dalam surat keputusan namun masyarakat merasa adil dengan prasarana yang telah dibangun atau disediakan. Baik di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud seluruh masyarakat yang menerima manfaat merasa adil dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Walaupun seperti yang terjadi di Kelurahan Kilasah yang sangat membutuhkan prasarana yang dibangun yaitu MCK di RT 4 namun titik pembangunan tidak dilaksanakan di titik tersebut, masyarakat tidak protes karena memang lahan untuk pembangunan prasarana tersebut tidak tersedia di RT 4. Sehingga juga masyarakat tidak ada yang keberatan akan hal tersebut karena pembangunan prasarana juga disesuaikan dengan lahan yang

tersedia di wilayah tersebut, mengingat lahan yang digunakan merupakan lahan hibah jadi tidak semua masyarakat bersedia lahannya digunakan untuk pembangunan prasarana program NUSP-2 tersebut.

4.5.5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan bagaimana hasil dari dilaksanakannya suatu program dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok masyarakat. Tujuan dari dilaksanakan program NUSP-2 untuk menangani permukiman kumuh khususnya di wilayah perkotaan dengan menyediakan prasarana dasar lingkungan. Dengan dibangunnya prasarana dasar lingkungan di wilayah yang telah ditentukan diharapkan mampu memuaskan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan prasarana yang dibangun dan disediakan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Warung Jaud telah memanfaatkan prasarana yang ada seperti mck, sarana air bersih dan jalan lingkungan. Namun untuk prasarana persampahan yang didapat yaitu motor sampah tidak digunakan. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat masih membuang sampah di kebun atau langsung tps. Motor sampah tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, namun kalau masyarakat membutuhkan untuk jika terdapat kegiatan atau acara kemasyarakatan itu baru masyarakat meminjamnya. Bak sampah yang telah disediakan dari program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga tidak digunakan karena tidak ada motor sampah yang

mengangkutnya. Sehingga kondisi tempat sampah dari program lain juga terbengkalai dan aktivitas masyarakat dalam membuang sampah sembarangan baik di kali maupun area perkebunan atau area persawahan juga masih ditemui. Disediaknya prasarana persampahan tersebut untuk mengurangi kegiatan pembakaran sampah dan masyarakat dapat membuangnya di tempat yang telah disediakan namun karena motor sampah tersebut belum digunakan sehingga aktivitas tersebut masih saja dilakukan oleh sebagian masyarakat. Salah satu alasan motor sampah tersebut tidak digunakan karena pemegang motor sampah tidak mengerti mengenai mesin sehingga jika motor sampah digunakan untuk mengangkut sampah dapat merusak mesin karena kondisi sampah yang bermacam-macam sedangkan pemegang tidak dapat menanganinya. Kemudian pemegang motor sampah merupakan seorang tokoh masyarakat yang membuat masyarakat segan untuk meminta kembali motor sampah tersebut. Telah dilakukan usaha dari BKM agar motor sampah dapat digunakan kembali dengan mencari pengganti pemegang motor sampah tersebut, namun terkendala dengan jumlah motor sampah yang hanya terdapat 1 unit karena takut timbul ketidakadilan. Tidak dimanfaatkannya prasarana persampahan juga terdapat di Kelurahan Margaluyu. Adanya tempat sampah, gerobak sampah dan motor sampah tidak digunakan di Kelurahan Margaluyu. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara. Jika persampahan tersebut digunakan mereka tidak tahu kemana sampah tersebut harus dibuang karena tidak

memiliki TPS sendiri. Sehingga mereka selalu mengajukan agar bisa mendapatkan TPS dari program-program lain. Namun terkendala dengan lahan untuk TPS tersebut karena untuk pembuatan TPS biasanya di pinggir jalan namun lahan disana merupakan lahan milik pihak PU. Sehingga masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat seperti di area permukiman atau kali. Kemudian di Kelurahan Kilasah juga seluruh prasarana sudah dimanfaatkan apalagi sarana air bersih karena masyarakat biasanya melakukan aktivitasnya di kali. Namun terdapat tempat sampah yang mengalami kerusakan sehingga perlu ditangani oleh KPP Kelurahan Kilasah. Hal tersebut tidak ditangani karena terkendala oleh dana yang tidak ada. Masyarakat disana sangat sulit untuk ditagih iuran untuk pemanfaatan dan pemeliharaan. Telah dilakukan usaha yaitu masyarakat dikumpulkan dan masyarakat diberi kesempatan bagi masyarakat yang tidak bersedia membayar iuran dipersilahkan dan bagi yang masih bersedia membayar iuran harus mendaftarkan kembali, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang sebelumnya. Namun ternyata dalam pelaksanaan masyarakat tetap sulit untuk membayar iuran sehingga untuk dana perbaikan prasarana yang rusak yaitu tempat sampah mengalami keterbatasan.

Hasil yang dilaksanakan dari program NUSP-2 ini memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Dimana prasarana yang dibangun dalam program NUSP-2 telah memuaskan masyarakat karena prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri. Dalam dokumen *Neighborhood Upgrading Plan* di setiap kelurahan terdapat usul yang

berdasarkan permasalahan yang timbul dalam survey kampung sendiri dan juga usulan yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan prasarana di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud telah sesuai dengan surey kampung sendiri. Dalam pembangunan prasarana selalu berdasarkan dengan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga semua prasarana sesuai dengan survey kampung sendiri. Namun terdapat prasarana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang terdapat di rencana kerja masyarakat, salah satunya terdapat di Kelurahan Kilasah. Dimana terdapat satu prasarana yang tidak dibangun berdasarkan laporan manajemen proyek NUSP-2 tahun 2017. Prasarana yang telah disediakan dalam program NUSP-2 perlu dipelihara dan dirawat agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Maka dari itu jika terdapat prasarana yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Kerusakan prasarana yang terjadi biasanya segera ditangani oleh KPP di Kelurahan masing-masing. Jika terjadi kerusakan prasarana di Kelurahan Margaluyu masyarakat langsung segera lapor kepada KPP dan akan segera ditangani walaupun terkadang harus menunggu 1 atau 2 jam jika KPP memiliki kesibukan lain. Kemudian untuk Kelurahan Margaluyu juga cepat ditangani asal masyarakat lapor kepada KPP walaupun masyarakat juga harus menunggu maksimal 1 hari sudah ditangani. Prasarana yang mengalami rusak di Kelurahan Warung Jaud juga cepat ditangani untuk seperti keran, lampu yang sekiranya sangat segera harus diperbaiki. Namun untuk Kelurahan

Kilasah kerusakan seperti tempat sampah belum juga ditangani karena terkendala dengan iuran dari masyarakat, tetapi untuk kerusakan seperti keran atau lampu masih dapat ditangani. Kerusakan prasarana harus segera ditangani oleh KPP karena hal tersebut dapat menghambat masyarakat dalam menggunakan prasarana tersebut.

4.5.6. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bermanfaat. Dibangunnya prasarana program NUSP-2 bertujuan untuk menangani permukiman kumuh yang ada karena banyak masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki prasarana dasar lingkungan. Maka dari itu dalam dimensi ketepatan akan dibahas mengenai bagaimana manfaat dari adanya program NUSP-2 ini dalam menangani permukiman kumuh di Kecamatan Kasemen. Berdasarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor 663/Kep110-Huk/2018 bahwa luas lokasi permukiman kumuh terdapat di 135 titik seluas 538,75 Ha. Kemudian pada tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor 663 bahwa luas permukiman kumuh sebesar 384,508 Ha. Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa permukiman kumuh yang ada telah berkurang maka menunjukkan bahwa program-program yang diberikan telah mampu menangani permukiman kumuh. Adanya program NUSP-2 sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud karena mampu merubah keadaan lingkungan di wilayah tersebut. Pada Kelurahan Margaluyu juga sangat

bermanfaat walaupun belum 100% karena telah mampu membantu masyarakat dalam beraktivitas seperti mandi dan mencuci yang biasanya dilakukan di kali saat ini terbantu dengan adanya MCK dan sarana air bersih program NUSP-2. Walaupun memang prasarana persampahan yaitu tempat sampah yang disediakan belum mampu mengatasi permasalahan sampah di kelurahan tersebut akibat tidak adanya TPS. Kemudian bagi Kelurahan Kilasah juga telah membantu warga yang biasanya jalan lingkungan becek karena hanya tanah saat ini sudah bagus, kemudian dahulu saat hujan banjir karena tidak adanya drainase saat ini setelah dibangun drainase masalah banjir dapat teratasi. Program NUSP-2 juga banyak bermanfaat bagi Kelurahan Warung Jaud seperti yang terjadi di Kelurahan Kilasah, di Kelurahan Warung Jaud juga jalan lingkungan sudah bagus karena dulu kondisinya jika hujan jalanan tersebut banjir sehingga menghambat aktivitas warga yang bekerja maupun anak-anak yang bersekolah namun saat ini sudah sangat bagus. Adanya program NUSP-2 sangat bermanfaat untuk masyarakat dan mampu juga menangani permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan Kasemen. Hasil dari suatu program bermanfaat ketika program tersebut sesuai dengan kebutuhan penerimannya. Seperti program NUSP-2, prasarana program NUSP-2 bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Kasemen dengan begitu maka program NUSP-2 juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana. Program NUSP-2 yang telah dilaksanakan di Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Warung Jaud

telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan tersebut. Dengan adanya program tersebut masyarakat di 3 kelurahan penerima program NUSP-2 sangat terbantu dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga program NUSP-2 sangat berdampak positif bagi wilayah yang menerima program NUSP-2.

Tabel 4.19
Temuan Lapangan

No	Dimensi	Hasil Penelitian
1	Efektivitas	<p>a. Program NUSP-2 dari segi infrastruktur telah mampu menangani permukiman kumuh yang terdapat di 3 kelurahan di Kecamatan Kasemen, namun dari pola pikir masyarakat sangat kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga pola pikir masyarakat tersebut mempengaruhi permukiman kumuh yang telah ditangani oleh infrastruktur tetap terlihat kumuh.</p> <p>b. Pelaksanaan program NUSP-2 di 3 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kasemen telah melaksanakan program sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya saja pada Kelurahan Kilasah terdapat kesalahan mengenai pembangunan drainase yang mengalami kekurangan 11 meter sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu baru dapat ditanda tangani laporan pembangunan, karena jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maka dinas terkait tidak akan menandatangani laporan pembangunan tersebut.</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan prasarana program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 90 hari kerja.</p> <p>d. Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Kilasah sempat mengalami hambatan saat mencari lahan yang akan digunakan untuk membangun prasarana, karena lahan yang akan digunakan merupakan lahan yang dihibahkan oleh masyarakat lingkungan tersebut tanpa adanya ganti rugi sehingga sempat mengalami kendala lahan. Namun untuk di Kelurahan Warung Jaud tidak mengalami hambatan apalagi mengenai lahan karena masyarakat sangat mendukung pembangunan prasarana yang ada karena kebutuhan masyarakat akan</p>

		program tersebut.
2	Efisiensi	<p>a. Anggaran yang telah disediakan dirasa kurang cukup jika untuk membangun seluruh kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kiasah dan Kelurahan Margaluyu. Namun kalau untuk anggaran program NUSP-2 dalam membangun prasarana dirasa sudah cukup karena sebelumnya telah ada pembuatan rancangan anggaran untuk pembangunan prasarana yang akan dibangun. Anggaran yang diberikan oleh program NUSP-2 untuk Kota Serang juga masih tersisa sebesar 9 M yang belum terealisasi dan masih terdapat seluas 14 Ha lokasi kumuh yang terdapat dalam surat keputusan belum tertangani, dikarenakan tahun program yang sudah selesai.</p> <p>b. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pelaksanaan program NUSP-2 sangat penting dikarenakan bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Partisipasi musyawarah di Kelurahan Kilasah kurang dikarenakan masyarakat yang memiliki kesibukan lain, lokasi musyawarah yang jauh, dan juga poa pikir masyarakat tidak datang karena tidak mendapatkan sesuatu. Musyawarah yang dilaksanakan di Kelurahan Margaluyu hanya mengundang perwakilan saja dikarenakan masyarakat sangat sulit untuk datang musyawarah. Lalu musyawarah yang dilaksanakan di Kelurahan Warung Jaud, banyak masyarakat yang berpartisipasi karena masyarakat sangat antusias wilayahnya akan dibangun.</p> <p>c. Salah satu cara untuk memelihara prasana program NUSP-2 yaitu dengan mengadakan iuran. Seluruh iuran yang ditetapkan di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu telah sesuai dengan kesepakatan masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih banyak saja masyarakat yang sulit membayar iuran tersebut. Tidak hanya masyarakat yang berekonomi kurang mampu yang sulit membayar namun yang berekonomi mampu juga demikian.</p> <p>d. Pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu mengikuti pelatihan yang diadakan dalam program NUSP-2 yang memberikan mereka pengetahuan mengenai tugas yang harus mereka laksanakan.</p> <p>e. Pemantauan program NUSP-2 dilakukan saat 50% pembangunan dan setelah pembangunan selesai untuk mengecek kembali prasarana yang dibangun sesuai</p>

		yang direncanakan.
3	Kecukupan	<p>a. Kinerja BKM dan KPP di Kecamatan Kasemen dapat dikatakan sudah baik. BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud cukup baik dimana BKM juga selalu berkoordinasi dngan warga maupun kelurahan dan KPP juga cukup baik karena prasarana yang ada sangat dirawat bahkan MCK Kelurahan Warung Jaud berhasil menang setelah dilombakan di beberapa kegiatan. Kemudian BKM Kelurahan Margaluyu juga selalu berkoordinasi dengan baik dan KPP juga melaksanakan tugas dengan baik jika ada kerusakan dengan cepat diperbaiki. BKM Kilasah juga demikian selalu menjaga koordinasi dengan warga maupun kelurahan, hanya saja KPP di Kelurahan Kilasah dapat dikatakan kurang karena terdapat prasarana persampahan yang telah disediakan namun rusak dan tidak diperbaiki. Hal tersebut dikarenakan sulitnya masyarakat dalam membayar iuran untuk biaya pemeliharaan prasarana baik masyarakat yang mampu secara ekonomi maupun kurang mampu sehingga membuat KPP kesulitan dalam memperbaiki prasarana persampahan yang rusak tersebut.</p> <p>b. Pemilihan BKM dan KPP juga telah sesuai prosedur yang dimana beberapa BKM telah ada dari program sebelumnya. Kemudian pemilihan KPP di Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Warung Jaud juga dipilih melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, namun untuk pemilihan KPP di Kelurahan Margaluyu tidak melibatkan masyarakat hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat saja. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat sulit untuk diajak ikut berpartisipasi dalam musyawarah.</p>
4	Pemerataan	<p>a. Program NUSP-2 tepat sekali dilaksanakan di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu karena telah sesuai dengan surat keputusan walikota yang ada. Dimana surat keputusan yang ada juga telah melalui proses identifikasi lokasi-lokasi kumuh terlebih dahulu sehingga penetapan lokasi kumuh penerimaan program sangat tepat sasaran. Adanya program NUSP-2 membawa dampak positif di Kelurahan Kilasah, dimana masyarakat telah mencontoh membuat kamar mandi sendiri walaupun pembuatan dengan cara dicicil.</p> <p>b. Program NUSP-2 ini juga sudah tepat untuk 3 kelurahan tersebut dikarenakan kondisi di lingkungan tersebut yang memang membutuhkan prasarana</p>

		<p>pendukung tersebut. Dimana kondisi secara ekonomi masyarakat kurang karena kebanyakan masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. Sehingga jika harus membuat seperti MCK dirumahnya sendiri masih kesulitan.</p> <p>c. Manfaat adanya program NUSP-2 telah adil dan merata dirasakan oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Walaupun terdapat pembangunan prasarana yang tidak sesuai dengan titik lingkungan yang sangat membutuhkan masyarakat dikarenakan lahan yang tidak tersedia namun masyarakat merasa sudah merata. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kilasah, dimana masyarakat RT 04 yang sangat membutuhkan MCK namun MCK tersebut tidak dibangun di lingkungan tersebut dikarenakan tidak adanya lahan, namun tidak ada keluhan dari masyarakat.</p>
5	Responsivitas	<p>a. Masyarakat di Kelurahan Warung Jaud telah memanfaatkan prasarana yang didapat kecuali prasarana persampahan yaitu motor sampah, sehingga membuat masyarakat masih membuang sampah disembarang tempat seperti di sungai dan area persawahan. Hal tersebut juga terjadi di Kelurahan Margaluyu, prasarana persampahan tidak digunakan karena di lingkungan tersebut tidak memiliki TPS sehingga pembuangan sampah ke area permukiman dan sungai masih dilakukan. Kemudian Kelurahan Kilasah juga tidak menggunakan bak sampah yang disediakan karena kondisi bak sampah yang telah mengalami kerusakan dan tidak ada perbaikan karena tidak adanya biaya untuk perbaikan.</p> <p>b. Terdapat prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal, salah satunya di Kelurahan Kilasah terdapat 1 poin yaitu pengusulan tutup saluran drainase yang tidak dilaksanakan.</p> <p>c. Kerusakan prasarana yang terdapat di Kelurahan Margaluyu dan Kelurahan Warung Jaud dengan cepat ditangani oleh KPP asalkan masyarakat lapor kepada KPP. Namun untuk Kelurahan Kilasah untuk kerusakan bak sampah belum juga ditangani dikarenakan terkendala oleh iuran dari masyarakat yang sulit.</p>
6	Ketepatan	<p>a. Manfaat dari adanya program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu, Kelurahan Warung Jaud dan kelurahan Kilasah yaitu dapat mengurangi aktivitas masyarakat yang biasanya beraktivitas di sungai saat ini dapat merasakan MCK umum, jalan lingkungan juga sudah</p>

		<p>bagus, air bersih yang mudah didapatkan sehingga hal tersebut membuat masyarakat mudah dalam beraktivitas.</p> <p>b. Prasarana yang dibangun dalam program NUSP-2 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu sehingga program NUSP-2 ini sangat tepat diberikan pada 3 kelurahan tersebut.</p>
--	--	---

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kecamatan Kasemen belum berjalan dengan optimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori model evaluasi dari William Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Maka dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas, program NUSP-2 telah mampu menangani permukiman kumuh di Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah dan Kelurahan Margaluyu, namun kesadaran masyarakat masih kurang untuk menjaga lingkungan.
2. Efisiensi, pelaksanaan musyawarah di Kelurahan Kilasah masih kurang dikarenakan masyarakat memiliki kesibukan lain dan pola pikir masyarakat yang belum berubah dengan berpikir tidak datang karena tidak mendapatkan sesuatu seperti amplop atau beras.
3. Kecukupan, kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara dalam program NUSP-2 dapat dikatakan kurang karena prasarana

persampahan yang disediakan mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki. Hal tersebut terkendala oleh sulitnya masyarakat yang membayar iuran karena kondisi ekonomi yang kurang.

4. Pemerataan, terdapat pembangunan prasarana yang tidak sesuai dengan titik lingkungan yang sangat membutuhkan masyarakat dikarenakan lahan yang tidak tersedia. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kilasah, dimana masyarakat RT 04 yang sangat membutuhkan MCK namun MCK tersebut tidak dibangun di lingkungan tersebut dikarenakan tidak adanya lahan.
5. Responsivitas, prasarana dalam program NUSP-2 seperti motor sampah yang terdapat di Kelurahan Warung Jaud belum dimanfaatkan sebagaimana harusnya sehingga membuat masyarakat masih melakukan aktivitas pembuangan sampah di area persawahan dan juga sungai. Motor sampah tersebut tidak digunakan karena pemegang motor sampah tidak mengerti mengenai mesin sehingga tidak digunakan dan karena pemegang motor sampah merupakan tokoh masyarakat.
6. Ketepatan, program NUSP-2 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Kilasah, Kelurahan Warung Jaud dan Kelurahan Margaluyu. Adanya program NUSP-2 sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti akan mencoba memberikan saran atau masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya upaya dari dinas terkait untuk memberikan suatu sosialisasi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, seperti dari Dinas Kesehatan untuk memberikan penyuluhan hidup bersih dan sehat, kemudian Dinas Pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dari sedini mungkin dan juga dinas-dinas terkait.
2. Badan keswadayaan masyarakat memiliki strategi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah salah satunya dengan mengadakan sosialisasi setelah pengajian rutin di kelurahan.
3. Dilakukan subsidi silang untuk iuran perawatan prasarana bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu dengan masyarakat yang mampu.
4. Badan keswadayaan masyarakat dan kelompok pemanfaat dan pemelihara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebutuhan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang melakukan pengawasan setelah pembangunan prasarana selesai agar dapat memastikan bahwa prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
6. Program NUSP-2 perlu dipertahankan dan juga diperluas pelaksanaannya untuk lokasi kumuh yang belum mendapatkan program NUSP-2.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri., dkk. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030.

SK Walikota Serang Nomor: 400/Kep.223-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi *Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* di Kota Serang Tahun 2015-2017.

SK Walikota Serang Nomor: 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2017. *Angka Kemiskinan Provinsi Banten 2017*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2018. *Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2018*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2018. *Kota Serang Dalam Angka 2018*.

Laporan Manajemen Proyek NUSP-2 Tahun 2017.

Neighborhood Upgrading Action Plan Kelurahan Kilasah Tahun 2015.

Neighborhood Upgrading Action Plan Kelurahan Margaluyu Tahun 2015.

Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2* Tahun 2013.

Profil Kota Serang Tahun 2017.

Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Margaluyu Tahun 2016.

Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Kilasah Tahun 2016.

Sumber Lain:**Skripsi :**

Nawawi, Muhammad Irfan. 2018. Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sari, Emi Marta. 2016. Implementasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2)* di Kelurahan Kungkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Internet :

DPRD Kota Serang. 2017. Gambaran Umum Daerah Kota Serang. <http://dprd-serangkota.go.id/gambaran-umum-daerah-kota-serang/> diunduh tanggal 23 Oktober 2018.

Kota Serang. 2018. Visi dan Misi Kota Serang. <https://serangkota.go.id/page/2- visi-dan-misi> diunduh tanggal 14 Maret 2019.

Wikipedia. 2017. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Serang. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Serang diunduh tanggal 23 Oktober 2018.

Wikipedia. 2016. Kasemen, Serang. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kasemen,_Serang diunduh tanggal 23 Oktober 2018.



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR: 663/Kep.65-Huk/2015**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

- a. bahwa pesatnya pertumbuhan pertambahan penduduk di Kota Serang yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan, sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2);

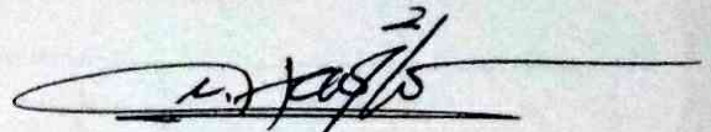
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang.
- KEDUA** : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berdasarkan letak, luas dan koordinat lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan lokasi yang benar - benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.
- KEEMPAT** : Pemerintah Daerah Kota Serang mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan tuntasnya penanganan.

KELIMA

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Maret 2015
WALIKOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tb. Haerul Jaman', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a date '4/3/15' written vertically to the right of the main text.


Tb. HAERUL JAMAN

**LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KOTA SERANG**

No	Nama Kelurahan	KP Kumuh	Luas Kumuh (Ha)	Koordinat	
				Latitude	Longitude
1	Unyur	Kp Kelanggaran & Pamindangan, Kp Unyur & Pabuaran, Kp Cilampang & Cikepuh, Kp Kedaung & Kp Gempol & Lebak	41.79	6° 05' 43.090 9" S	106° 09' 7.1798" E
2	Lopang	Kp Lopang Cilik, Lopang Gede, Domba, Kaliwadas, Kebaharn Al Manar & Al Amin	49.33	6° 06' 20.519 4" S	106° 09' 24.9757" E
3	Sukawana	Kp Kebanyakan Wetan, Kulon, Tegal Kalisalak, Kubang kemiri, Sambli gerowong & Sentul	15.62	6° 06' 24.709 5" S	106° 11' 12.5868" E
4	Terondol	Kp Terondol, Kp Kubang apu & Kp Kesawon	13.59	6° 06' 5.2588" S	106° 10' 45.0559" E
5	Sumur Pecung	Kp Ciwaktu Lor, Cipete & Sumurpecung, Kp Ciwaktu Kidul, Kp Kidang, Muncung, Cipete & Pekojan, Kp Hegar Alam, Ciloang & Kesuren	30.93	6° 07' 8.0192" S	106° 09' 57.9062" E
6	Drangong	Kp Ranca sawah, Ranca Palupuh, Kosambi & Legok Dalam	18.92	6° 06' 32.072 1" S	106° 07' 33.5673" E
7	Taktakan	Kp Cigabus Dalem, Kp Kepandean Got & Cigabus Dalem	10.29	6° 06' 49.772 9" S	106° 06' 31.5326" E
8	Kalanganyar	Kp Perumasan, Kp Cigabus & Kapedilan	12.09	6° 06' 59.960 2" S	106° 07' 3.1195" E
9	Cilaku	Kp Jemaka, Cicae, Boru, Kp Pamupukan, Timbang & Cibunyah	25.08	6° 09' 57.547 7" S	106° 10' 25.1895" E
10	Cipocok Jaya	Kp Tegalduren	8.31	6° 09' 17.303 6" S	106° 11' 24.8468" E
11	Cimuncang	Kp. Warakas Secang	21.61	6° 06' 38.973 1" S	106° 10' 25.2150" E
12	Cipare	Kp. Cijawamesjld	20.72	6° 07' 7.0074" S	106° 10' 2.0142" E
13	Warungjaud	Kp. Warung Pasar	5.57	6° 05' 14.994 2" S	106° 11' 31.1438" E
		Kp. Kijaud	4.12	6° 04' 56.809 5" S	106° 11' 5.6096" E

8	Kalanganyar	Kp Perumasan, Kp Cigabus & Kabedilan	12.09	6° 06' 59.9602" S	106° 07' 3.1195" E
9	Cilaku	Kp Jemaka, Cicae, Boru, Kp Pamupukan, Timbang & Cibunyah.	25.08	6° 09' 57.5477" S	106° 10' 25.1895" E
10	Cipocok Jaya	Kp Tegalduren	8.31	6° 09' 17.3036" S	106° 11' 24.8468" E
11	Cimuncang	Kp. Warakas Secang	21.61	6° 06' 38.9731" S	106° 10' 25.2150" E
12	Cipare	Kp. Cijawamesjid	20.72	6° 07' 7.0074" S	106° 10' 2.0142" E
13	Warungjaud	Kp. Warung Pasar	5.57	6° 05' 14.9942" S	106° 11' 31.1438" E
		Kp. Kijaud	4.12	6° 04' 56.8095" S	106° 11' 5.6096" E
		Kp. Sadiyah Satu, Kp. Sadiyah Dua & Kesaud	14.04	6° 04' 49.2326" S	106° 10' 28.1795" E
14	Magaluyu	Kp. Padek	4.82	6° 02' 17.6456" S	106° 10' 34.0402" E
		Kp. Margaluyu	10.11	6° 03' 56.6589" S	106° 10' 8.9722" E
15	Banten	Kp. Pekapura	5.20	6° 02' 19.4793" S	106° 10' 11.2593" E
		Kp. Kesatria	18.36	6° 02' 19.4793" S	106° 10' 11.2593" E
16	Kilasa	Kp. Tegal Dawe	3.16	6° 04' 1.8295" S	106° 11' 7.2599" E
		Kp. Kilasa	4.66	6° 04' 1.8295" S	106° 11' 7.2599" E
17	Masjid Priyayi	Kp. Masigit Barat, Kp. Priyaidukuh, Kp. Priyaitegal	29.54	6° 05' 11.4887" S	106° 11' 59.9493" E
18	Penancangan	Kp. Lebak Gempol	4.92	6° 06' 41.9082" S	106° 11' 41.2874" E
		Kp. Baru	5.58	6° 06' 41.9082" S	106° 11' 21.1572" E
		Kp. Susukan	3.35	6° 06' 50.2362" S	106° 11' 41.2874" E
		Luas Kawasan Kumuh	381.71		

WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR: 400/Kep.223-Huk/2015**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH
PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING and SHELTER
PROJECT-2 DI KOTA SERANG TAHUN 2015-2017**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Serang yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan, sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 (NUSP-2) di Kota Serang Tahun 2015-2017;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh *Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 (NUSP-2)* di Kota Serang Tahun 2015-2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** merupakan lokasi yang benar - benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.
- KETIGA** : Dalam hal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh *Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 (NUSP-2)*, dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran Keputusan Walikota Serang
 Nomor : 400/Kep.223-Huk/2015
 Tanggal : 18 Juni 2015

**LOKASI KAWASAN KUMUH PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING
 AND SHELTER PROJECT-2 (NUSP-2) DI KOTA SERANG**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG	LUAS KUMUH (Ha)	KOORDINAT	
					LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4	5	6	7
1	Serang	Terondol	1. Kp. Kubang Apu	13.59	6° 06' 16.5287" S	106° 12' 6.0036" E
			2. Kp. Kesawon	2.12	6° 06' 14.7671" S	106° 11' 19.8915" E
2	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya	1. Kp Sumur Putat	5.80	6° 08' 4.0889" S	106° 11' 8.5708" E
			2. Kp. Kaong	5.47	6° 08' 29.4246" S	106° 10' 46.8100" E
		Penancangan	1. Lebak Gempol	4.92	6° 06' 1.8402" S	106° 10' 27.2253" E
			2. Kp. Susukan	3.35	6° 06' 48.2372" S	106° 12' 13.0758" E
			3. Kp. Turus	5.58	6° 06' 50.2636" S	106° 12' 6.1216" E
3	Kasemen	Margaluyu	1. Kp Ambon	3.61	6° 02' 33.0094" S	106° 10' 23.4556" E
			2. Kp. Padek	4.82	6° 02' 18.9168" S	106° 10' 33.8869" E
		Kilrasah	1. Kp Kilrasah 3	4.66	6° 04' 24.1603" S	106° 11' 18.3480" E
			2. Kp. Kali Pampang	6.75	6° 04' 8.3218" S	106° 11' 23.9860" E
		Warung Jaud	1. Sa'diah 1	14.04	6° 04' 50.7219" S	106° 10' 44.1168" E
			2. Sa'diah 2			
4	Curug	Cilaku	1. Kp. Jemaka	7.50	6° 10' 4.1831" S	106° 10' 34.4842" E
			2. Kp. Timbang	10.07	6° 08' 49.5979" S	106° 11' 11.1493" E
			3. Kp Cibunyah			
			Luas Kumuh	92.28		

WALIKOTA SERANG,



TB. HAERUL JAMAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lia Amalia, ST
Jabatan : Kasir. Pemb. Prasarana Dasar & Lingk. Kaw. Permukiman
Usia : 41 thn

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.



Serang 25 Februari 2019

Lia Amalia

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dedi Cahyadi, SKM., M. Si
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan
Permukiman Bappeda Kota Serang
Usia :

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 1 Maret 2019





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

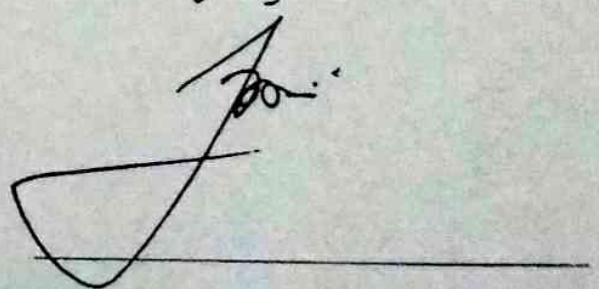
Nama : *Jumaroh*
Jabatan : *Masyarakat*
Usia : *42*

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang 21-02-2019



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Saad.
Jabatan : koord. nator BKM.
Usia : ur. paut.
43 th.

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sering, 7 Maret 2019



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : SAMSLIDIN
Jabatan : KASI KESOS KEL KILUAH
Usia : 47 TH

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

SERANG 28-02-2019



SAMSLIDIN

SURAT PERNYATAAN

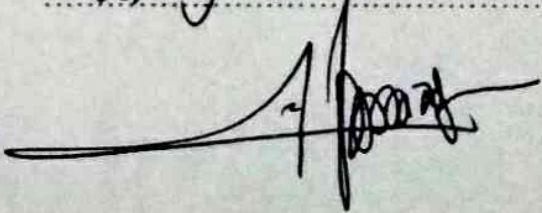
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sammun.
Jabatan : ket. kpp kelurahan.
Usia : 43.

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang 01-Mar-2019.


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama HADI RAH SIDIN
Jabatan ANGGOTA BKPM. KILASAH.
Usia 48 TH.

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 26 - 2 - 2019


HADI RAH SIDIN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JAMHADI
Jabatan : KETUA KPP MARGALUYU
Usia : 43 THN

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut.

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

SERANG 04-03-2019



JAMHADI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

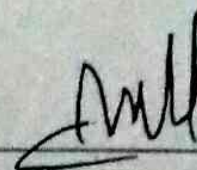
Nama : Mamruhan
Jabatan : masyarakat kel. Warung Jauq
Usia : 27

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 28 Februari 2019



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Marsaid
Jabatan : Ketua KPP Wawung Jaud
Usia : 35 tahun

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 5 Maret 2019



MARSAID

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

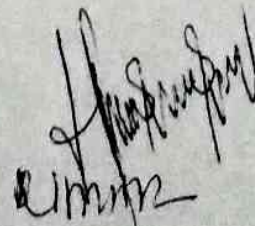
Nama : Umm.
Jabatan : KOORDINATOR BKM.
Usia : 47 - TH.

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 28 Februari 2019


Umm.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NYU WISNA
Jabatan : Anggota Staf Kalurahan
Usia : 39 thn

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

MGI. 28 - 02 - 2019 .

NYU WISNA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Saifulloh, S. AP, M. Si
Jabatan : Lurah Warung Jaud
Usia : 51 Thn

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut

Nama : Anna Novita Sari
NIM : 6661150002
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

 03-2019
H. SAIFULLOH, S. AP, M. Si
NIP. 19670105 200701 1029

Member Check

Nama Informan : Lia Amalia, S.T
Jabatan : Kasi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang
Waktu wawancara : 25 Februari 2019
Tempat wawancara : Ruang Dinas Perkim Kota Serang

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kecamatan Kasemen sesuai tujuan?

Hasil yang diharapkan yaitu penuntasan kawasan kumuh yang sesuai dengan sk permukiman kumuh program nusp-2 ini, dimana terdapat 7 kriteria. Kita berharap dengan adanya program ini wilayah yang mendapatkan program dapat menuntaskan kekumuhan di wilayahnya baik dari infrastruktur maupun bangunan. Dimana infrastruktur dapat berupa jalan lingkungan, sanitasi, air bersih, drainase. Untuk kecamatan kasemen sendiri jika melihat dari kriteria selesai namun kalau dilihat dari tingkat kebiasaan atau perilaku itu masih jauh, kalau dilihat dari program untuk menangani permukiman kumuh selesai tapi untuk kumuhnya belum ada perubahan karena perilaku manusia yang masih sulit diubah.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen sesuai dengan pedoman umum?

Kalau pelaksanaan itu kan memang harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya karena jika tidak memperhatikan hal tersebut tidak dapat juga dilakukan pencairan dana. Kemudian saat pemeriksaan akhir juga jika ada yang tidak sesuai kita tidak mau tanda tangan sebelum diperbaiki terlebih dahulu baru kita memantau lagi kalau sudah sesuai baru kita tanda tangani

3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?

Kalau melihat kontraknya itu 3 bulan, tapi yang namanya pembangunan oleh masyarakatnya walaupun kontraknya 3 bulan namun pelaksanaan pembangunan lebih itu tidak masalah dan tidak ada sanksi karena kita kan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi tidak masalah jika pelaksanaan pembangunan melebihi kontrak asal tidak melebihi tahun anggaran. sebenarnya melebihi tahun anggaran juga tidak apa-apa kalau hanya untuk finishingnya saja.

4. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Kalau untuk anggaran yang diberikan untuk permukiman kumuh sebenarnya tidak pernah puas karena item-item yang diberikan hanya itu saja yang lainnya tidak jadi kalau mengikuti anggaran juga kurang saja. Dilihat dari anggaran APBD yang minim

jadi kita berusaha untuk mendapat anggaran dari pusat untuk permukiman kumuh karena kalau mengikuti anggaran pasti kurang.

5. Bagaimana peran masyarakat dalam musyawarah di dalam program NUSP-2?

Peran masyarakat sangat penting karena mereka yang akan mengusulkan prasarana yang akan dibangun karena mereka yang mengetahui kebutuhan di wilayahnya sendiri. Fungsinya masyarakat diundang karena masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan memelihara nantinya maka dari itu masyarakat harus selalu dilibatkan agar rasa memiliki masyarakat tinggi terhadap prasarana yang dibangun.

6. Apakah terdapat pelatihan pengurus BKM dan KPP dan materi apa saja yang disampaikan?

Untuk pelatihan ada dari pusat, materi yang terdapat dalam pelatihan kalau KPP itu tatacara pemanfaatan, tata cara pembukuan dan pemeliharaan, kalau BKM materinya biasanya seperti pengadaan barang jasa, tata cara manajemen keuangannya, manajemen sosialisasi seperti itu. Kalau bkm juga pada saat pelatihan dijelaskan tata cara pelaksanaan pembangunannya.

7. Apakah terdapat tindakan monitoring atau pemantauan dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Pemantauan dilakukan setiap termin, dan juga jika ada kegiatan lain di lokasi pelaksanaan program NUSP-2 kita juga pasti sekalian memantau pelaksanaannya.

8. Apakah BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Kalau BKM dalam melaksanakan tugasnya sudah bisa tapi terkadang apa yang diterangkan dalam pelatihan namun dalam pelaksanaannya bagaimana mereka dan tidak menyesuaikan dengan pelaksanaan yang telah dijelaskan dalam pelatihan. Kalau untuk pelaksanaan mereka melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis terkait penggunaan anggaran, namun ya dalam pelaksanaan pembangunan juga bagaimana pekerja mereka mengerjakan yang biasanya mereka kerjakan dan terkadang tidak patuh dengan spesifikasi teknik yang terdapat diaturan kalau kita sudah tegur dan tidak mau tanda tangan baru mereka merubah lagi. Untuk pelaporan juga biasanya harus dipaksa dulu kadang baru mereka membuat pelaporan.

9. Apakah syarat untuk menjadi BKM dan KPP?

Kalau bkm itu biasanya sudah dibentuk dari program-program sebelumnya kemudian kalau KPP itu harus berdomisili di tempat pelaksanaan NUSP-2 tersebut karena mereka yang lebih tahu mengenai wilayahnya sehingga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap prasarana yang dibangun.

10. Apakah pemilihan pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu sesuai dengan pedoman umum?

Pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan pedoman karena sudah melalui musyawarah dengan masyarakat. Kita tidak bisa mengintervensi masyarakat karena masyarakat yang dapat menentukan siapa ketua siapa anggotanya.

11. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu?

Sangat tepat karena memang masyarakat disana sangat membutuhkan prasarana dari program NUSP-2 karena rata-rata mereka tidak memiliki MCK biasanya kalau mandi atau mencuci harus ke sungai.

12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu?

Kondisi masyarakat disana pertama kurang peduli akan kondisi lingkungan, kurang peduli akan wilayah sekitarnya mereka beranggapan bahwa program yang dibangun itu pemerintah juga yang harus memeliharanya, mereka menerima saja diberi program namun untuk merubah kesadaran masyarakat itu sangat sulit karena kurang peduli akan lingkungannya. Tugas beratnya yaitu merubah kebiasaan dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan itu sulit karena melibatkan dari dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan, dinas pendidikan karena sedini mungkin anak-anak itu harus diberikan pengetahuan mengenai lingkungan.

13. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu telah menjalankan tugasnya dengan baik?

Belum sepenuhnya menjalankan karena walaupun kita menagajarkan teknisnya seperti ini kalau mereka maunya seperti itu yasudah karena mereka beranggapan mereka telah terbiasa melakukan seperti itu.

14. Apa manfaat dengan adanya program NUSP-2?

Manfaatnya sangat banyak dimana yang tadinya pada mandi di kali sekarang udah pada ke MCK, kemudian jalan yang dulunya jelek kalau ujan juga becek sekarang udah bagus. Dengan program NUSP-2 ini masyarakat lama-lama mencontohlah untuk membuat kamar mandi sendiri dirumah karena enggak mungkin terus-terusan di kamar mandi umum.

15. Apakah program NUSP-2 merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu?

Sesuai kebutuhan karena masyarakat disana memang kondisinya kurang sekali, banyak yang tidak punya MCK lalu jalan juga biasanya jalannya jelek terus banyak kotoran kerbaunya setelah ada program NUSP-2 aktivitas pada ke MCK sama sarana air bersih dipake, dan jalan-jalan lingkungan udah baguslah.

Member Check

Nama Informan : Dedi Cahyadi, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman
Bappeda Kota Serang
Waktu wawancara : 1 Maret 2019
Tempat wawancara : Ruang Bappeda Kota Serang

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kecamatan Kasemen sesuai tujuan?

Tujuan utama nusp-2 untuk menangani permukiman kumuh, kalau penanganan permukiman kumuh dari segi infrastrukturnya sendiri sudah jelas berkurang, katakanlah jalan, jalan yang tadinya berlobang dan bercampur lumpur sekarang sudah tidak ada, kemudian air genangan yang tadinya menggenang kemudian diarahkan untuk membuat drainase sehingga tidak lagi. Memang upaya itu terlihat namun hanya sebatas penangan infrastruktur aja, tidak ada penanganan lain contohnya PHBS dari dinkes harus turun, lalu kebersihan lingkungannya juga harus dilakukan himbauan seperti jangan membuang sampah sembarangan, kemudian drainase juga biasanya banyak berisi sampah plastik, untuk limbah rumah tangga kita buat ipal komunal, untuk daerah yang tidak memiliki air yang biasa mandi di sungai dibuatkan SAB dan MCK. Miskin dan kumuh itu hampir sama bagaikan kertas putih, karena masyarakat miskin lebih kearah kumuh dimana mau mandi tidak ada kamar mandi makanya dibuatkan wc umum. Namun setelah infrastruktur terbangun mereka tidak mau memelihara. Padahal setelah infrastruktur terbangun kita kan punya KPP, iuran untuk pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur namun iuran tersebut juga masih sangat sulit karena alasan ekonomi biasanya. Dalam permukiman ada masyarakat yang mampu dan tidak mampu seharusnya masyarakat mampu bisa subsidi silang dengan masyarakat yang tidak mampu.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kecamatan Kasemen sesuai dengan pedoman umum?

Iya sudah sesuai karena telah menyesuaikan dengan 7 indikator tersebut, namun itu hanya dari infrastruktur saja seharusnya ditunjang dengan bagian lain juga. Terkait sinergitas Karena perencanaan dari Bappeda maka kita ingin tidak hanya dari infrastruktur saja yang digarap namun juga dari berbagai aspek, seperti dari Dinas Perhubungan menangani pju, kemudian PU menangani jalan seperti jalan-jalan utama karena itu merupakan tugas PU, kemudian RTLH ditangani dingsos. Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemda namun belum sinergi karena upaya yang mereka lakukan lokusnya kurang tepat yang dimana harusna lokasi lokasi miskin atau kumuh itu.

- 3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**

Pelaksanaan pembangunan 3 bulan dan selama ini pas 3 bulan karna selalu dipantau pekerjaannya dari Dinas Perkim dan Bappeda.
- 4. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2?**

Total 36 M, namun hanya 23 M yang terserap. Sisa itu dibalikan ke ADB. Dari 92 Ha masih terdapat sisa yang belum tertangani 14 Ha yang belum tertangani karena tahun anggaran yang sudah habis.
- 5. Bagaimana peran masyarakat dalam musyawarah di dalam program NUSP-2?**

Masyarakat pasti senang karena permukiman mereka akan dibangun dan diperbaiki. Peran dalam proses perencanaan mereka ikut merencanakan proses NUAP karena pekerjaan itu kan yang mengerjakan masyarakat sehingga apapun yang dikerjakan itu oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
- 6. Apakah terdapat pelatihan pengurus BKM dan KPP dan materi apa saja yang disampaikan?**

Ada pelatihan dari program nuspnya, materi yang disampaikan kalo BKM dari Bappeda hanya sebatas mensosialisasikan ditempat yang akan dilaksanakan.
- 7. Apakah terdapat tindakan monitoring atau pemantauan dalam pelaksanaan program NUSP-2?**

Ada 2 kali yaitu pada pelaksanaan pembangunan prasarana 60% dan 100%.
- 8. Apakah BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program NUSP-2?**

Sudah memiliki kompetensinya masing-masing karena pemilihannya juga melalui musyawarah dan masyarakat yang memilih karena masyarakat yang mengetahui sehingga sudah memadai kompetensinya.
- 9. Apakah syarat untuk menjadi BKM dan KPP?**

Tidak ada syarat khusus yang penting mereka bertanggung jawab dengan tugasnya. Memang orang yang menjadi BKM dan KPP juga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut karena mereka yang mengerti wilayah mereka.
- 10. Apakah pemilihan pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu sesuai dengan pedoman umum?**

Sesuai dengan prosedur yang ada sesuai petunjuk pelaksanaan, tidak ada syarat khusus untuk menjadi BKM karena ini dipilih dari musyawarah yang dipilih dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan. Karena BKM juga memiliki Sk dari kesbangpol, jika tidak tercatat di sk kesbangpol maka tidak bisa disebut BKM.
- 11. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu?**

Kalau untuk ketepatan sudah karena kan sudah sesuai dengan sk, kita kan juga menyesuaikan dengan sk yang telah ada, karena sk itu hanya bukan sebatas kemauan namun juga indentifikasi terlebih dahulu.
- 12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu?**

Masyarakat disana pemikirannya masih lebih kepedesaan, susah untuk berkembang untuk ke kota walaupun kita sudah memberikan kesadaran untuk meningkatkan

perilaku dan telah meningkatkan infrastruktur tapi tetap saja begitu. Kasemen itu merupakan daerah yang diagungkan karena terdapat Banten Lama jadi berimbas kepada seluruh kecamatan Kasemen sehingga dapat dibantu juga oleh provinsi agar Kasemen bisa lebih baik, seperti sekarang sudah bagus jalan untuk mencapai Kasemen dari segala arah tetapi lagi-lagi masyarakatnya sendiri yang belum sadar. Usaha untuk menyadarkan masyarakat ada namun untuk menyadarkan masyarakat itu tidak dapat secepat itu karena perilaku masyarakat disana sangat sulit diubah.

13. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu telah menjalankan tugasnya dengan baik?

Sudah menjalani dengan baik, kalau KPP itu kan masih terkendala dengan iuran yang suka telat karena kita juga tidak dapat memaksakan masyarakat untuk membayar.

14. Apa manfaat dengan adanya program NUSP-2?

Sangat banyak, peningkatan infrastruktur permukiman sangat terlihat bagaimana infrastruktur tersebut terbangun dimana yang tadinya jelek sekarang telah bagus. Kalau melihat hanya dengan mata setelah dibangun infrastruktur itu sudah tidak kumuh lagi lokasi tersebut namun kembali lagi kepada masyarakat kalau mereka tidak menjaga akhirnya timbul kumuh lagi.

15. Apakah program NUSP-2 merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu?

Sesuai kebutuhan namun menurut masyarakat masih kurang karena mereka menganggap hanya satu wilayah tersebut saja yang diberi bantuan namun wilayah lain tidak, padahal pemberian bantuan itu kan sudah sesuai dengan SK walaupun di suatu wilayah menurut kita kumuh namun jika suatu wilayah tidak mencukupi dari 7 indikator yang ada maka tidak dapat dikatakan kumuh karena 7 indikator tersebut harus terpenuhi.

Member Check

Nama Informan : Hadirahsidin
Jabatan : Ketua BKM Kelurahan Kilasah
Waktu wawancara : 26 Februari 2019
Tempat wawancara : Kediaman Bapak Hadirahsidin

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Kilasah sesuai tujuan?

Tujuan dr adanya program untuk menuntaskan permukiman kumuh, dari pernyataan orang NUSP-2 sendiri menyatakan untuk 2 RW ini dari program NUSP-2 dianggap sudah tidak kumuh. Namun jika masih dianggap kumuh maka bantuan tersebut masih terus diberikan karena dianggap sudah tidak kumuh maka program dihentikan.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah sesuai dengan pedoman umum?

Sudah sesuai dengan petunjuk karena kita mengikuti saran dan arahan yang diberikan.

3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?

Pelaksanaan pembangunan 90 hari kerja. Namun kilasah tidak pernah terlambat sesuai ketentuan. Kalau terlambat biasanya karena kondisinya musim hujan.

4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?

Hambatannya yaitu situasi dan kondisi apalagi saat musim hujan.

5. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?

Anggaran tersebut untuk satu kelurahan ini masih kurang karena masih banyak rw lain yang belum tertangani. Namun kalau untuk 2 rw sesuai dengan sk itu cukuplah.

6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Kilasah?

Musyawarahnya ada yang datang ada yang tidak, hanya 60% saja yang datang padahal peran mereka sangat penting. Alasan masyarakat yang tidak datang alasannya sibuk. Masyarakat juga selalu diberi kesempatan untuk berpendapat dalam musyawarah.

7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?

Iuran sesuai dengan kemampuan masyarakat karena melalui musyawarah kalau disini 10 ribu satu rumah. Terkadang masih sulit ditagih uang iuran karena kondisi masyarakat disini rata-rata kurang mampu sehingga pendapatannya tidak menentu karena disini kebanyakan buruh tani.

8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?

Terdapat pelatihan di Kota Serang yang dikumpulkan di Hotel Grand Krakatau yang diadakan oleh pusat, materi yang disampaikan terkait cara pelaksanaan, tata cara pemeliharaan untuk KPP. BKM dan KPP biasanya mendapatkan buku pedoman untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?

Terdapat pemantauan dari keluarahan biasanya keluarahan setiap hari mantau, dari Bappeda dan Dinas Perkim sering memantau saat pelaksanaan. Kalau setelah selesai pelaksanaan tidak ada pemantauan.

10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah telah sesuai pedoman?

Iya sesuai prosedur yang ada karena dilakukan dengan musyawarah. Dimana pada tingkat RW mengutus 2 orang dibawa kekelurahan kemudian dimusyawarahkan siapa yang akan terpilih menjadi BKM.

11. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?

KPP mungkin punya dokumen tatacara pemanfaatan dan pemeliharaan karena mereka kan dilatih juga. Kalau BKM memiliki dokumen untuk tata cara pelaksanaan dimana terdapat NUAP.

12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah?

Sekarang yang dibutuhkan oleh kami yaitu penghasilan yang memadai. Bagaimana caranya penduduk kami memiliki penghasilan umr. Karna kami yang hanya bekerja serabutan itu sulit untuk memnuhi segala iuran-iuran. Kemudian disini SDM nya yang kurang rata-rata dari usia saya keatas tidak memiliki ijazah.

13. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Kilasah?

Pelaksanaan sudah tepat dikelurahan kilasah, karena dianggap sama pihak sana kalau disini itu kumuh.

14. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Misalnya MCK yang menggunakan RT 17 namun masyarakat RT 3 jarang menggunakan MCK karena rata-rata disini pada memiliki kamar mandi. Ya memang merasa adil atau tidak adilnya kita tidak ada lahannya karena yang ada lahan hanya di RT 17 saja.

15. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Masyarakat sudah memanfaatkan prasarana terutama sarana air bersih karena biasanya masyarakat sini kalau mencuci kan di kali kalau kali tersebut tidak air dan dalam masa perbaikan baru sarana air bersih itu sangat digunakan. Tapi ya memang tempat sampahnya juga pada rusak ya itu belum dibenerin tapi masih bisa dipake aja gitu sama warga karena itumah kendala uang sih soalnya kan sulit masyarakat ditagihnya

16. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Prasarana yang dibangun udah sesuai survey kampung sendiri.

17. Bagaimana kinerja KPP Kelurahan Kilasah?

Sudah bagus walaupun memang belum mampu mengerakkan kesadaran masyarakat buat bayar iuran.

18. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Kilasah?

Manfaat nya sangat cukup untuk prasarana, karena yang belum cukup itu masalah ekonomi saja. Terdapat bantuan PKH itu kan tidak semua masyarakat, karena hanya untuk warga miskin saja sementara yang kelas menengah tidak mendapatkan bantuan.

Untuk permasalahan prasarana sudah cukup karena mengurangi BAB dikali dan buang sampah disawah.

19. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Kilasah?

Program NUSP-2 ini telah sesuai kebutuhan yang terdapat di bidang kebersihan dan air. Kalau kebutuhan lain itu belum.

Member Check

Nama Informan : Samnun
Jabatan : Ketua KPP Kelurahan Kilasah
Waktu wawancara : 1 Maret 2019
Tempat wawancara : Kediaman Bapak Samnun

- 1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Kilasah sesuai tujuan?**
Tujuannya untuk mengurangi permukiman kumuh, sudah mengurangi tapi belum merata.
- 2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah sesuai dengan pedoman umum?**
Udah sesuai karena kita selalu ngikutin arahan yang dikasih.
- 3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Kalo enggak salah 90 hari kerja.
- 4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Kalau hambatan tidak ada, kalau masalah lahan juga kan susah cari lahan dan kebetulan saya ada jadi yasudah dipakai saja gitu saya juga butuh.
- 5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Kilasah?**
Musyawarah banyak yang enggak datang bilanginya pada sibuk gitu.
- 6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?**
Kalau anggaran kurang tau saya, BKM yang tahu.
- 7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Udah sesuai karenakan dimusyawarahin dulu masyarakat pada sanggupnya berapa, tapi saat ditagih pada susah buat bayar.
- 8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?**
Iya ngikutin waktu itu 3 hari sama BKM juga.
- 9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?**
Ada pemantauan waktu itu, saat selesai juga dipantau.
- 10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah telah sesuai pedoman?**
Udah sesuai soalnya dipilihnya melalui musyawarah jadi berdasarkan pemilihan warga.
- 11. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?**
Ada pedomannya gitu cuma saya enggak dikasih ya jadi ya enggak ada.
- 12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah?**
Masyarakat disini pada kurang peduli sama lingkungan, masih ada aja yang ke kali kalo buat buang sampah gitu padahal sudah disediakan.

13. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Kilasah?

Sangat tepat karena memang masyarakat disini butuh sekali kaya MCK sama SAB soalnya biasanya kalau mandi sama nyuci itu pada ke kali.

14. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Adil aja enggak ada yang protes soalnya kalau kaya MCK sama SAB butuh lahan, jadi dibangun yang ada lahannya aja.

15. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Kalo disini semuanya dimanfaatkan apalagi motor sampah juga dipakai karena kita enggak punya TPS jadi sampah kita dibuangnya di Kaligandu sana.

16. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Sudah sesuai survey kampung sendiri.

17. Bagaimana kinerja BKM Kelurahan Kilasah?

Bagus karena kalau ada apa-apa selalu koordinasi.

18. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Kilasah?

Manfaatnya banyak jalan sekarang udah jadi bagus, warga juga enggak usah ke kali lagi kalau mau buang air, banyaklah pokoknya.

19. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Kilasah?

Udah sesuai kebutuhan kaya MCK, SAB, jalan udah sesuai semualah sama kebutuhan warga karena emang itu yang dibutuhin banget.

Member Check

Nama Informan : Samsudin
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kilasah
Waktu wawancara : 28 Februari 2019
Tempat wawancara : Kelurahan Kilasah

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Kilasah sesuai tujuan?

Tujuannya untuk mengurangi permukiman kumuh, kalau mengurangi dengan sendirinya otomatis mengurangi, dengan adanya program tersebut masyarakat dengan sendirinya mencontoh yang sudah ada seperti membuat MCK walaupun mencicil membuatnya. Sekitar 70% sudah mengurangi permukiman kumuh.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah sesuai dengan pedoman umum?

Kalau Kelurahan Kilasah sudah memenuhi syarat pedoman umum, namun kemarin sempat ada kendala masalah drainase, saat drainasenya diukur terdapat komplain dari pihak kota jadi saat itu kami dipanggil namun sudah selesai karena saat itu panjang drainase kurang 11 meter namun ternyata kesalahannya bukan dikita ataupun di pihak kota namun terdapat di meterannya, ternyata meteran yang digunakan salah namun saat ini sudah selesai.

3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?

Pekerjaannya terkadang kurang dari 100 hari kerja karena disini kendalanya lahan karena masyarakat kalau misalnya membuat drainase kalau kena tanahnya sedikit aja itu komplain.

4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Kendalanya waktu itu lahan karena lahanya hibah, karena kan namanya juga tanah dijual juga laku dan terkadang terkendala kondisi seperti hujan.

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Kilasah?

Masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah sangat banyak bahkan kehadiran masyarakat itu melebihi kuota. Perannya sangat bagus karena sudah mulai sadar butuh pembangunan di wilayahnya. Peran masyarakat dalam musyawarah itu nomor satu sangat penting. Masyarakat selalu mengusulkan kebutuhannya bahkan melebihi prasarna yang harus dibangun.

6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?

Kurang tahu soal dana, paling kita hanya memantau pekerjaannya saja.

7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?

Iuran sesuai musyawarah karena sebelumnya masyarakat dikumpulkan. Mereka suka telat bayar karena kondisi ekonomi bahkan kadang yang ekonominya tinggi juga terkadang suka pelit.

8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?

BKM dan KPP mengikuti pelatihan bahkan kalau kurang satu dibatalkan karena itukan untuk pelaksanaan teknis dilapangan karena pelatihan itukan sangat penting.

9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?

Kalau monitoring itu baru 50% saja sudah dipantau sebelum selesai itu selalu dipantau dan akhir pembangunan juga dipantau. Pemantauan bisanya yang ikut dari dinas terkait dan juga keluarahan.

10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah telah sesuai pedoman?

Pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan prosedurnya juga kok. Caranya itu dulu masyarakat dikumpulin dan diadakan musyawarah.

11. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah?

Kondisi di kelurahan kilasah masyarakatnya kurang karena disini masyarakatnya menjadi buruh tani tetapi yang memiliki sawah itu orang lain.

12. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Kilasah?

Kelurahan kilasah sangat tepat menerima program NUSP-2 karena dengan adanya pembangunan prasarana seakan masyarakat diberi contoh untuk membangun juga salah satunya MCK. Sekarang masyarakat banyak yang gali bikin sepiteng dulu tapi kamar mandinya belum, dengan sendirinya masyarakat mengikuti walaupun dicicil.

13. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Tidak ada protes karena mewan lahannya tidak ada disana, yang siap lahannya dihibahkan hanya pak RW sedangkan lingkungan yang membutuhkan prasarana lahannya tidak ada jadi yasudah karena dulu juga kan sudah melalui proses musyawarah.

14. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Masyarakat sangat memanfaatkan prasarana yang ada.

15. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Disini mah prasarana yang dibangun sudah sesuai dengan survey kampung sendiri.

16. Bagaimana kinerja BKM dan KPP Kelurahan Kilasah?

Kalau BKM sudah memadai karena sudah senior dan kalau ada apa-apa koordinasi, kalau untuk KPP kurang tau.

17. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Kilasah?

Dengan adanya program ini masyarakat sudah disediakan tapi tidak dijalankan. Kalau awal saat 1 bulan atau 2 bulan awal itu dijalankan dipelihara setelah itu yasudah, kendalanya perawatannya yang susah. Kalau MCK masih digunakan hanya saja paling tong sampah tidak digunakan karena mau benerin tong sampah juga butuh dana sedangkan iuran aja masyarakat sulit.

18. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Kilasah?

Sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena prasarana yang dibangun dimanfaatkan sama masyarakat.

Member Check

Nama Informan : Saad
Jabatan : Ketua BKM Kelurahan Warung Jaud
Waktu wawancara : 7 Maret 2019
Tempat wawancara : Kediaman Bapak Saad

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Warung Jaud sesuai tujuan?

Tujuan dari program NUSP-2 untuk mengurangi permukiman kumuh, kalau berkurang iya tetapi tidak menuntaskan karena yang perlu dibangun SDMnya karena pembangunan fisik juga harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusianya karena sikap dan perilaku hidup itu yang langsung menciptakan kumuh.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud sesuai dengan pedoman umum?

Pelaksanaan sudah sesuai dengan teknis dan prosedur karena kalau tidak mengikuti akan menimbulkan masalah yang lain.

3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?

Total 90 hari kerja tapi disini tidak pernah lebih dari 90 hari.

4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Kalau hambatan tidak ada paling hanya kendala lahan aja karena kan itu lahan hibah ya gitu kecil kecil aja karena semua berjalan sesuai rencana, karena sebelumnya yang punya tanah itu kan kita panggilin dulu karena kan ini tanah masyarakat kalau memang ada tanah masyarakat yang kena kan kita panggilin yang punya tanah dan kita adakan musyawarah.

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Warung Jaud?

Peran masyarakat sangat penting karena kita kan enggak tau apa yang dibutuhkan kalau mereka tidak hadir dalam musyawarah. Kita undang semua masyarakat disitu terjadi dialog jadi disitu masyarakat menyampaikan kebutuhannya apa saja.

6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?

Anggaran di total semua persiklus ada yang 500 juta ada yang 300 juta. Anggaran segitu kurang cukup sehingga digabung dengan program dari perkim.

7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?

Iuran perbulan berjalan 5 ribu karena kalau tidak berjalan bagaimana buat bayar listriknya karena kalau diputus listriknya kita juga kan yang repot.

8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?

Waktu itu saya ikut pelatihannya di Hotel Grand Krakatau 3 hari, materinya kaya peran BKM, peran KPP sama peran masyarakat.

9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?

Ya ada pemantauannya langsung sama perkim setiap minggu itu pemantauan kalau timnya tiap hari ngeliatin kita pada kerja jadi bener bener diawasin. Kita juga kalau tidak ada tim yang nongkrongin takut ada yang salah kalau ada tim yang nongkrongin meminimalisir adanya kesalahan.

10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud telah sesuai pedoman?

Sebelum ada program NUSP-2 sudah ada bkm, awalnya dari tingkat RT RW lalu dibawa ke kelurahan. Kalau KPP itu dibentuk di musyawarah kelurahan dibentuk KPP sebagai perawat dari bangunan itu, dan tetap melibatkan masyarakat siapa saja kandidatnya kemudian dipilihlah saat musyawarah. Pemilihan sesuai dengan petunjuk teknis karena kita langsung melihat dari petunjuk teknis itu.

11. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?

Kita juga ada dokumen karena kita kan nanti ada laporannya.

12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Warung Jaud?

Dari segi ekonomi itu mereka buruh tani lahannya punya orang 95% buruh tani paling 5 % pembantu ibu rumah tangga paling yang lainnya nganggur dan paling dagang kecil-kecil gitu sambil jadi buruh tani. Pendapatan juga jadi buruh tani 3 bulan sekali 1200 meter hanya 700ribu/4bulan.

13. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Warung Jaud?

Sangat tepat sekali karena jika tidak dihantam dengan program NUSP-2 khususnya wilayah Sadiah sangat kumuh sekali tapi dari program NUSP-2 juga kurang makanya itu kolaborasi dengan kotakau dan perkim.

14. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Iya adil-adil aja, tidak ada protes karena yang penting semuanya menjaga bersama.

15. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Kalau yang udah maksimal itu jalan mck sab itu sudah maksimal, yang sampah sudah dimanfaatkan tetapi karena memang kurang keterampilan mengenai mesin yang memegang motor jadi kalau rusak bingung karna tidak punya pemahaman tentang mesin karena kan kalau bekas sampah kena air yang asin gitu gitu jadi suka mengalami kerusakan.

16. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Prasarana yang dibangun sesuai survey kampung sendiri, dari SKS melihat apakah kampung kita ini perlu dibangun, nantikan muncul permasalahan apa saja yang muncul kemudian dipelajari apa saja yang harus dibangun setelah survey itu.

17. Bagaimana kinerja KPP Kelurahan Warung Jaud?

Melihat dari perawatan bagus karena kalau tidak dirawat kan berarti KPP tidak bekerja namun ini prasarananya dirawat. Ini kan MCK sudah dijadikan pameran di tingkat polres menang kemudian mck kita dijadikan lomba ditingkat kecamatan menang juga.

18. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Warung Jaud?

Banyak manfaatnya kaya yang kalau hujan bingung jalannya jelek skrg udah bagus, secara sosial dulumah pada ribut tentang pembuangan air itu sekarang mah ketika udah dibuat drainase skrg udah pada rukun, anak sekolah dulu suka jatuh termasuk saya nganter anak sekolah pernah jatuh karena licin dan banjir saya ukur 25 cm bahkan anak-anak main dijalan itu. Maka dari itu pas banjir itu kita foto kita sampaikan ke pemerintah

19. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Warung Jaud?

Sesuai dengan kebutuhan seperti MCK, SAB, jalan itu semua sesuai kebutuhan disini.

Member Check

Nama Informan : Marsaid
Jabatan : Ketua KPP Kelurahan Warung Jaud
Waktu wawancara : 5 Maret 2019
Tempat wawancara : Kediaman Bapak Marsaid

- 1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Warung Jaud sesuai tujuan?**
Sudah kayaknya soalnya sudah menangani permukiman kumuh dengan dibangun prasarana.
- 2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud sesuai dengan pedoman umum?**
Pelaksanaan yang ada udah sesuai sama pedomannya.
- 3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Waktu itu dikasih waktu 90 hari sih.
- 4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Alhamdulillah enggak ada hambatan sama sekali.
- 5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Warung Jaud?**
Masyarakat banyak yang datang di musyawarah, diundang sama BKM dan sama saya kumpul di aula masjid.
- 6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?**
Kalau anggaran sepertinya cukup cukup saja.
- 7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Sesuai dama musyawarah, iuran itu 15 ribu satu rumah dulu banyak yang banyak tetapi sekarang kurang.
- 8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?**
Saya ikut pelatihan, waktu itu ada materi yang dikasih itu seperti tata cara pemanfaatan.
- 9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?**
Iya ada pemantauan waktu itu dari dinas, sering dipantau saat selesai juga dicek lagi.
- 10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud telah sesuai pedoman?**
Kalau BKM itu udah dari program sebelumnya, kalau KPP dulu itu dimusyawarah. Jadi udah sesuai pedoman.

11. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?

Iya kita ada dokumennya.

12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Warung Jaud?

Kalo dari segi ekonomi disini kurang .

13. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Warung Jaud?

Tepat programnya ada disini saya malah makasih sudah dikasih MCK, jalan bagus.

14. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Tidak ada karena memang lahannya ada disini.

15. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Masyarakat manfaatin kaya mck sama sarana air bersih, tapi kalau sampah malah terus terang itu motor diberikan ke mantan RW jadi enggak dipakai buat mengangkut sampah paling kalau ada kegiatan masyarakat saya minjem tapi setelah itu digunakan pribadi. Kalau untuk sampah jadi sekarang sendiri-sendiri, itu saja ada bak sampah enggak dipakai karena tidak ada yang ngambilin.

16. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Udah sesuai survey kampung sendiri.

17. Bagaimana kinerja BKM Kelurahan Warung Jaud?

Bagus kinerjanya karena selalu musyawarah kalo ada apa-apa.

18. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Warung Jaud?

Sangat bermanfaat saya juga menikmati, yang biasanya bab di kali jadi disini hanya namanya juga orang kampung kalau bab disini bayar sedangkan kalau tidak bayar saya juga rugi. Tapi kalau ada kerusakan juga tetap saja kalau kurang pakai uang saya.

19. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Warung Jaud?

Prasarana udah sesuai kebutuhan tapi prasarana yang dibangun masih kurang. Saya juga sudah mengajukan di musrembang.

Member Check

Nama Informan : H. Saifulloh, S.Ap, M.Si
Jabatan : Lurah Kelurahan Warung Jaud
Waktu wawancara : 5 Maret 2019
Tempat wawancara : Kelurahan Warung Jaud

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Warung Jaud sesuai tujuan?

Tujuannya untuk mengatasi permukiman kumuh jadi sudah teratasi karena kan sudah dibangun jalan sudah dibangun jadi sudah mengurangi.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud sesuai dengan pedoman umum?

Sudah sesuai pedoman pelaksanaannya mah kalau enggak pasti timbul masalah.

3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?

Untuk waktu pengerjaan kurang tau karena ngontrol aja udah.

4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Kalau hambatan tidak ada karena masyarakat sangat mendukung.

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Warung Jaud?

Masyarakat *alhamdulillah* pada dateng, masyarakat juga dikasih kesempatan untuk mengajukan sebelumnya juga udah dikasih arahan sampaikan saja apa aja yang mau dibangun cuma kan masyarakat sini iya iya aja. Masyarakat juga tapi ngusulin diluar pogram NUSP-2 kaya rumah tidak layak huni.

6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?

Kurang tau soal anggaran. karena tidak tahu jadi kurang tahu cukup atau enggaknya.

7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?

Kalau untuk iuran saya kurang tahu ya cuma pastinya udah sesuai.

8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?

Ada pelatihan dan ikut, Materi yang disampaikan mengenai sanitasi, pembuangan air limbah gitu.

9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?

Dari kelurahan ikut mantau tapi tidak sering-sering saat perencanaan saat pengerjaan sudah selesai juga mantau. Dari dinas kemungkinan mantau.

10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Warung Jaud telah sesuai pedoman?

Dilanjutkan BKM nya dari program sebelumnya jadi saya kurang tahu bagaimana pemilihannya, kalau KPP pemilihannya belum tau.

11. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Warung Jaud?

Ya kalau disini masyarakat kesadarannya kurang, pemerintah kan membangunnya infrastruktur harusnya sdm nya dulu ya, karena kesadarannya belum nampak. Kalau ekonomi kalau dilihat dari permintaan dari sktm sih banyak.

12. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Warung Jaud?

Prasarana yang dibangun sudah tepat karena memang prasarana yang dibangun itu yang dibutuhkan masyarakat.

13. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Enggak ada yang protes sih lagian cari lahankan juga susah jadi ya pada terima karena kan udah di musyawarahin.

14. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Prasarana itu kan dikasih motor sampah yang saya lihat belum dimanfaatkan sih ya tadinya mau saya ambil tapi takut tersinggung, yang memegang tokoh masyarakat.

15. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Iya sudah sesuai suvey kampung sendiri sesuaiilah sama permasalahan disini.

16. Bagaimana kinerja BKM dan KPP Kelurahan Warung Jaud?

Bagus, kalau BKM kerjasama baik kalau ada apa-apa informasi kalau mau ada apa-apa, selalu koordinasi.

17. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Warung Jaud?

Banyak salah satunya kebersihan yang dulunya kotor sudah bersih kemudian dari jalan sudah bagus, dari penerangan kemudian air yang biasanya menggenang sekarang ada salurannya. Kalau untuk sampah numpuk belum ada yang membuang karena kita juga koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup harus ada iuran masyarakat untuk membayar yang ngangkutin sampah.

18. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Warung Jaud?

Sesuai karena dulu yang jalannya becek sekarang sudah bagus kemudian saluran air juga yang dulunya tidak bagus sekarang sudah bagus juga, sudah sesuaiilah.

Member Check

Nama Informan : Umar
Jabatan : Ketua BKM Kelurahan Margaluyu
Waktu wawancara : 28 Februari 2019
Tempat wawancara : Kelurahan Margaluyu

- 1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Margaluyu sesuai tujuan?**
Sudah menangani karena sudah membantu masyarakat banget cuma belum seluruhnya tertangani.
- 2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu sesuai dengan pedoman umum?**
Iya udah sesuai karena kita kalau menlakssanakan apa-apa memperhatikan pedoman.
- 3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Pelaksanaan 90 hari kerja tapi disnimah tidak pernah telat paling kalau ada yang telat itu karena kendala cuaca.
- 4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Kalau hambatan enggak ada sih, kalau buat lahan juga enggak ada masalah.
- 5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Margaluyu?**
Lumayan banyak sih yang ikut, karena kita kan ngundangnyanya enggak semua hanya perwakilan soalnya kalau semua diundang susah.
- 6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?**
Kalau menurut saya cukup karena kan prasarana yang dibangun udah membantu warga gitu terus juga udah mengurangi permukiman kumuhlah.
- 7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Iuran sudah sesuai sama kemauan warga soalnya kan di musyawarahin dulu.
- 8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?**
Saya ikut pelatihannya waktu itu, materinya biasanya kaya pembukuan, pembuatan LPJ, dan cara buat proposal.
- 9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?**
Ada pemantauan dari dinas terkait sama kelurahan, waktu itu pemantauan pas 50% pelaksanaan sama pas selesai pembangunan juga ada.
- 10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu telah sesuai pedoman?**

Dulu pemilihannya melalui musyawarah jadi dari pendapat warga gitu, jadi dipilih dari tingkat RT dibawa ke RW baru ke kelurahan musyawarah, udah sesuai sama pedoman.

11. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?

Iya ada buat kita pegangan untuk melaksanakan program NUSP-2 ini.

12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Margaluyu?

Kondisi masyarakat disini kebanyakan kerjanya pada buruh tani, jadi secara ekonomi agak kurang.

13. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Margaluyu?

Sangat tepat sekali karena membantu masyarakat disini dengan adanya program ini.

14. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Adil saja soalnya memang prasarana yang dibangun di daerah yang membutuhkan prasarana itu kaya MCK sama SAB gitu.

15. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Masyarakat manfaatin semua prasarananya kaya MCK sam SAB soalnya masyarakat biasanya pada ke kali, tapi emang kaya tempat sampah gitu belum dipake.

16. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Pembangunan prasarana sesuai dengan survey kampung sendiri karena dilihat juga sama apa yang diajukan.

17. Bagaimana kinerja KPP Kelurahan Margaluyu?

Bagus, soalnya tanggung jawab sama tugasnya.

18. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Margaluyu?

Manfaatnya banyak banget, kaya biasanya masyarakat mandi nyuci di kali sekarang pada kesitu sama sarana air bersih juga dipake banget sekarang kalau nyuci pada kesitu, terus drainase juga udah ada sekarang sama jalan-jalan juga udah bagus sekarang mah.

19. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Margaluyu?

Sesuai banget karena yang dibangun udah sesuai kebutuhan masyarakat.

Member Check

Nama Informan : Jamhadi
Jabatan : Ketua KPP Kelurahan Margaluyu
Waktu wawancara : 4 Maret 2019
Tempat wawancara : Kediaman Bapak Jamhadi

1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Margaluyu sesuai tujuan?

Belum sesuai tujuan karena pola pikir masyarakat belum berubah karena masyarakat tong sampah sudah dibikin tapi buang sampah masih sembarangan, kemudian disini kendala dalam masalah pengangkutan sampah.

2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu sesuai dengan pedoman umum?

Pelaksanaan sesuai dengan pedoman karena dari awal ada musyawarah.

3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?

Pelaksanaan 90 hari kerja, berbeda beda setiap pelaksanaan pembangunannya.

4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?

Paling masalah lahan aja kalau hambatan karena lahan kan hibah. Cuma kalau untuk SAB itu lahannya bekas sumur jadi enggak ada masalah.

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Margaluyu?

BKM mengundang musyawarah hanya 30% yang diundang karena kalau untuk semua hadir itu susah padahal kan partisipasi masyarakat dalam musyawarah itu kan sangat penting. Tapi warga ikut berpendapat di musyawarah tersebut karena sebelumnya saya sudah menyampaikan ke warga yang butuh apa apa disampaikan aja.

6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?

Anggaran kurang tahu karena kalau masih ada papan informasi paling kita lihat dari sana saja.

7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?

Iuran disini 5 ribu satu rumah dan udah sesuai dengan kesepakatan masyarakat karena sebelumnya dimusyawarahkan dulu. Sebenarnya 5 ribu itu kurang makanya kalau ada yang mau nyalur kerumah saya bedakan iurannya utuk menutupi kekuarangan yang tadi. Iurannya pada jalan semua kalau sedikit sedikit nombok sudah biasa karena kalau warga kalau lagi enggak ada uang juga kita enggak bisa memaksa, paling kalau bulan ini lagi enggak ada uang mereka di dobel sama bulan depan.

8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?

Ikut pelatihan saya waktu itu pelatihannya 3 hari di Hotel Grand Krakatau. Materi yang disampaikan terutama tentang kekumuhan, kemudian masalah sanitasi.

9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?

Pemantau dari dinas dan kelurahan, pemantauan dari 50% pelaksanaan pembangunan kemudian setelah selesai juga ada untuk pemeriksaan.

10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu telah sesuai pedoman?

Pemilihan BKM sama KPP sesuai petunjuk pelaksanaan karena diadakan di musyawarah juga.

11. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?

Dapat dokumen tatacara pemanfaatan saat pelatihan.

12. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Margaluyu?

Secara ekonomi masyarakat disini buruh tani dan buruh lepas. Saya pikir bantuan pemerintah ini setelah masyarakat dibantu masyarakat selalu mengharapkan terus.

13. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Margaluyu?

Program nusp-2 sangat tepat di kilasah karena dari awal kan dilihat dari kondisi kekumuhan dan disini memang masuk.

14. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Sempat ada kecemburuan sosial karena dulu masyarakatnya kurang respon dan jarang dateng jadi ya gimana mau dibangun. Tetapi inikan udah sesuai aturan karena disini yang dianggap masih kumuh.

15. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Kalau untuk MCK sama sarana air bersih digunakan sama masyarakat karena kebanyakan pada belum punya kamar mandi kan, tapi gerobak sama motor sampah belum digunakan karena memang tidak ada TPS nya, harapannya memang adanya TPS itu namun kendalanya TPS nya tidak ada. Setiap ada program suka mengajukan cuma lahnnya tidak ada usaha ada dari KPP agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau menasehati masyarakatkan tidak bisa keras-keras harus baik-baik.

16. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Pembangunan prasarana sesuai dengan SKS karena dilihat juga apa yang diajukan.

17. Bagaimana kinerja BKM Kelurahan Margaluyu?

Bkm melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan karena selalu dimusyawahkan apapun yang akan dilakukan.

18. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Margaluyu?

Alhamdulillah untuk secara manfaat masyarakat tercukupi yang awalnya tidak air bersih sekarang ada dan dulu yang di sumur ngatri sekarang mah kan bisa disalurkan kerumah jadi tidak ngantri seperti dulu. Ada mck juga alhamdulillah yang dulunya buang sembarangan sekarang udah ada pola pikirnya sudah lumayan berubah walaupun belum 100% tertangani ya tapi sudah 60% tertanganlah.

19. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Margaluyu?

Pembangunan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat seperti ada sab itu warga sangat terbantu kemudian mck juga yang dulu buang sembarangan sekarang di MCK.

Member Check

Nama Informan : Yuyu Sutisna
Jabatan : Staf Kelurahan Margaluyu
Waktu wawancara : 28 Februari 2019
Tempat wawancara : Kelurahan Margaluyu

- 1. Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Margaluyu sesuai tujuan?**
Tujuannya kan buat mengurangi permukiman kumuh, iya mengurani tapi Belum 100% tertangani permasalahan kumuh.
- 2. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu sesuai dengan pedoman umum?**
Pelaksanaan sudah sesuai pedoman yang ada karena sudah diaudit.
- 3. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Pembangunan prasarana kalau tidak salah 40 hari kerja di papan informasi juga ada.
- 4. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Hambatannya susah mencarin lahan yang dihibahkan.
- 5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Margaluyu?**
Banyak yang berpartisipasi banyak yang datang dan masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat. Namun masih banyak yang belum dapat program jadi masih banyak masyarakat yang menanyakan.
- 6. Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?**
Anggaran segitu tidak cukup karena masih banyak yang belum dibangun cuma *alhamdulillah* mengurangi permukiman kumuhlah.
- 7. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Iuran sesuai kesepakatan masyarakat saat musyawarah dan sesuai kemampuan karena tidak ada yang protes lancar-lancar saja.
- 8. Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?**
Iya ada pelatihan, materinya kaya pembukuan, pembuatan LPJ, cara buat proposal.
- 9. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?**
Terdapat pemantauan saat awal, tengah dan akhir. Kalau akhir biasanya pengecekan kembali disesuaikan dengan pengajuan misalnya mengajukan 100 meter diukur lagi apakah benar 100 meter gitu.
- 10. Apakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu telah sesuai pedoman?**
Sudah sesuai karena kalau BKM sudah lama dari program sebelumnya, kalau KPP pemilihannya juga musyawarah dari tingkat rt kemudian rw lalu dibawa ke kelurahan.
- 11. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Margaluyu?**

Kalau dari ekonomi masih banyak yang dibawah rata-rata soalnya disini. Karena disini masyarakatnya kebanyakan hanya bekerja serabutan aja bukan pegawai tetap.

12. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Margaluyu?

Program NUSP-2 sangat tepat di Kelurahan Margaluyu malah kalau bisa ada lagi.

13. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?

Biasanya pada iri masyarakat kenapa yang dibangun di RW itu saja, tapi memang itu sudah sesuai dengan surat keputusan nya ya. Tapi tidak ada kecemburuan sosial karena ditaro di RT disana prasarananya.

14. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Prasarana yang ada dipakai semua oleh masyarakat.

15. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Prasarana sesuai dengan survey kampung sendiri dan pengajuan.

16. Bagaimana kinerja BKM dan KPP Kelurahan Margaluyu?

Kinerjanya bagus karena koordinasinya bagus dengan KPP nya. Bkm dan kpp melaksanakan tugas sesuai pedoman.

17. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Margaluyu?

Banyak manfaatnya, bisanya warga yang buang air sembarangan di kali udah tidak ada lagi, kalau untuk persampahan masih ada satu dua yang buang sembarangan karena tidak semua masyarakat tidak bisa diubah semua.

18. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Margaluyu?

Program NUSP-2 sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

Member Check

Nama Informan : Janim
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Margaluyu
Waktu wawancara : 4 Maret 2019
Tempat wawancara : Kediaman Bapak Janim

- 1. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Kalo enggak salah 100 hari kerja tapi sebelum 100 hari sudah selesai.
- 2. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Tidak ada kendala lancar aja, *Alhamdulillah* lahan juga tidak ada kendala.
- 3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Margaluyu?**
Musyawarah hanya perwakilan saja yang diundang untuk pengajuan. Pernah juga sih tapi diundang. Karena biasanya musyawarah dari bawah dulu maunya dibangun apa baru dibawa ke tingkat kelurahan musyawarah sama BKM. Masyarakat saat musyawarah lumayan yang datang karena pada sibuk jadi ya udah yang hadir saja untuk mewakili.
- 4. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Iuran itu 5 ribu perbulan, sebelumnya musyawarah dulu dan sudah sesuai dengan kesepakatan.
- 5. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Margaluyu?**
Ada dari dinas dilihat saat berapa persen gitu kesini kemudian pas selesai juga ada pemantauan lagi.
- 6. Bagaimanakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu?**
Waktu itu kurang tau, BKM itu katanya tahun 2012. Kalau KPP waktu itu cuma yang dikumpulin tokoh masyarakat karena disini susah untuk ngumpulin masyarakat tuh jadi langsung aja ya musyawarah yang ada disetujui misal si A yang mampu bertanggung jawab gitulah.
- 7. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya?**
Sangat memadai karena BKM dan KPP bertanggung jawab sama tugasnya.
- 8. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Margaluyu?**
Kondisi disini masyarakatnya kebanyakan kerjanya enggak tetap kan. Disini juga yang punya MCK belum ada 50% nya.
- 9. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Margaluyu?**
Program nusp 2 sangat tepat karena banyak yang tidak punya mck juga.
- 10. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?**

Merasa adil saja dan enggak ada protes dari warga lain juga, soalnya kan udah pas disitu karena kalau MCK yang banyak enggak punya di wilayah situ kalau bak sampah mah setiap rumah dapet sih.

11. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?

Masyarakat manfaatin prasarana yang dibangun karena dulu sebelum ada bantuan masyarakat kerepotan. Sementara ini karena tempat pembuangan sampah sementara enggak ada jadi masih ada kendala jadi biasanya masyarakat buang sampah sembarangan dan kadang juga buang dikali. Jadi tempat sampahnya itu kurang digunakan.

12. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Iya udah sesuai sama survey kampung sendiri.

13. Bagaimana kinerja BKM dan KPP Kelurahan Margaluyu?

Bkm selalu turun ke lapangan untuk mengecek, BKM tidak mau mendengar laporan saja jadi maunya turun langsung. KPP juga sangat bagus karena kalau ada yang rusak cepat ditanganin.

14. Bagaimana penanganan pada prasarana yang mengalami kerusakan?

Kalau ada prasarana yang rusak biasanya langsung lapor aja nanti akan ditanganin KPP, cuma kan KPP punya kesibukan lain jadi paling nunggu 1 atau 2 jam aja.

15. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Margaluyu?

Sangat besar manfaat walaupun belum 100% biasanya yang mandinya pada di kali sekarang di mck tetapi kalau masalah sampah belum bisa mengatasi sih.

16. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Margaluyu?

Prasarana yang dibangun sesuai kebutuhan.

Member Check

Nama Informan : Jumaroh
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Kilasah
Waktu wawancara : 21 Februari 2019
Tempat wawancara : Kediaman Ibu Jumaroh

- 1. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Dulu tuh sekitar 3 bulanan gitu
- 2. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Enggak ada kendala mah.
- 3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Kilasah?**
Kalau rapat dikasih tau dan dikasi undangan gitu tapi banyak yg enggak dateng karena jauh juga kalau musyawarah di balai desa. Tetapi kalau disuruh ngambil beras gitu ke balai desa jauh juga pasti pada dateng, tapi kalau buat rapat mah susah ya ga dapat amplop geh kalau dapat mah lagi sibuk juga pasti pada ditunda.
- 4. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Saat musyawarah menyepakati iuran untuk pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana. Itu sudah sesuai kemampuan masyarakat karena kan lewat musayarah.
- 5. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Kilasah?**
Terdapat kontrol, saat pembangunan ada saat awal dan akhi saja adanya.
- 6. Bagaimanakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu di Kelurahan Kilasah?**
Pemilihannya di balai desa tetapi masyarakat tidak diberi tahu pemilihannya.
- 7. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya?**
Ya bagus kalau ada apa-apa BKM selalu musyawarah, kalau KPP juga ada yang rusak langsung dibenerin ya walapun itu bak sampah enggak dibenerin karena banyak yang susah bayar iuran.
- 8. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kilasah?**
Kondisi masyarakat disini kerjanya macem-macem ada yang ngojek dan serabutan.
- 9. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Kilasah?**
Sangat tepat sekali karena yang dibangun sesuai kebutuhan warga.
- 10. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?**
Sebenarnya yang banyak pake RT 4 namun diletakkan disitu MCKnya, tidak ada protes dari warga karena memang lahannya adanya disitu, sebenarnya kadang suka ngeluh tapi gimana lagi ada lahannya disini.
- 11. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?**

Semua prasarana yang ada dimanfaatkan kaya MCK, sarana air bersih, gerobak sampah sama motor sampah gitu dipakai.

12. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Iya sesuai survey kampung sendiri.

13. Bagaimana kinerja BKM dan KPP Kelurahan Kilasah?

Puas dengan kinerja BKM dan KPP, tapi kan ada kerusakan tempat sampah itu udah lapor tapi biasanya lama dibenerinnya. Disinimah perawatannya saat awal awal saja setelah itu yaudah dibiarin karena masyarakatnya susah

14. Bagaimana penanganan ada prasarana yang mengalami kerusakan?

Kalau ada kerusakan biasanya cepat ditangani, tapi kalau tempat sampah ini emang udah lama sih cuma kan katanya inimah karena enggak ada uang soalnya banyak yang susah ditagih iuran jadi itu juga rusak masih bisa dipake yaudah dipake aja gitu.

15. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Kilasah?

Manfaat untuk warga sini enak jalannya juga sudah tidak becek dulumah becek karena tanah, selokan-selokan juga sudah bagus karena dulu disini banjir sekarang sudah tidak.

16. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Kilasah?

Prasarana yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.

Member Check

Nama Informan : Mamruhah
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Warung Jaud
Waktu wawancara : 28 Februari 2019
Tempat wawancara : Kediaman Ibu Mamruhah

- 1. Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?**
Kalo tidak salah MCK 1 minggu, kalau semua 3 bulan juga sampe karna bertahap.
- 2. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2?**
Kendala enggak ada dikarenakan kalau lahan yasudah inikan punya ibu dari pada enggak kepakai yaudah dipakai saja lagian juga emang kita perlu MCK gitu.
- 3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Kelurahan Warung Jaud?**
Warga dikasih tau mau ada pembangunan. Pas musyawarah warga dikumpulin di aula masjid. Masyarakat diundang untuk musyawarah, Namanya juga mau dibantu ya kita seneng saja makanya dateng saja. Masyarakat yang dateng juga banyaklah.
- 4. Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?**
Pas musyawarah ditentukan bareng sama warga sebulan 15 ribu. Itu sudah sesuai kemampuan masyarakat juga kan udah lewat musyawarah.
- 5. Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di Kelurahan Warung Jaud?**
Ada yang mantau saat dibangun pertengahan sama saat selesai, gatau darimananya tapi ada yang mantau aja pokoknya.
- 6. Bagaimanakah pemilihan BKM dan KPP di Kelurahan Margaluyu di Kelurahan Warung Jaud?**
Masyarakat mah gatau, tapi emang masyarakat mah setuju aja sama pak saad karena pak saad mah benar benar membela kita agar dapat bantuan.
- 7. Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya?**
Sangat tepat karena sangat membantu dalam program.
- 8. Bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Warung Jaud?**
Disinimah kebanyakan kerjaaannya buruh lepas.
- 9. Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di Kelurahan Warung Jaud?**
Program NUSP-2 sudah tepat.
- 10. Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?**
Merasa adil saja dan enggak ada yang protes karena sekarang kebanyakan sudah punya wc ya yang enggak punya pada kesini gitu saja enggak ada yang masalah.
- 11. Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?**

Masyarakat memanfaatkan prasarana yang ada, tetapi motor sampah enggak dipakai. Jadi kita kalau buang sampah ya di kali kalau engga ke kebun kalau enggak langsung buang ke tps sendiri aja.

12. Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?

Sudah sesuai soalnya yang dibangun yang dibutuhkan warga.

13. Bagaimana kinerja BKM dan KPP Kelurahan Warung Jaud?

Sangat bagus karena selalu ngasih tau warga kalau mau ada apa-apa selalu bantu, kalo kerusakan juga cepet dibenerinnya.

14. Bagaimana penanganan pada prasarana yang mengalami kerusakan?

Kalo ada kerusakan disini cepet dibenerin kalau lapor mah kaya MCK suka rusak lapor saja misal lapor pagi kadang besoknya juga udah bisa dipakai lagi.

15. Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi Kelurahan Warung Jaud?

Sangat bermanfaat warga biasanya bab di sawah sekarang di MCK kalau sampah ke TPS cuma masih ada juga yang ke kali.

16. Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan Kelurahan Warung Jaud?

Prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat sini butuh MCK jalan yang bagus dan air bersih.

Matriks Hasil Wawancara

Q₁	Apakah hasil yang diinginkan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah) sesuai tujuan?
I ₁₋₁	Tujuan dari program NUSP-2 untuk mengurangi permukiman kumuh, kalau berkurang iya tetapi tidak menuntaskan karena yang perlu dibangun SDMnya karena pembangunan fisik juga harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusianya karena sikap dan perilaku hidup itu yang langsung menciptakan kumuh.
I ₁₋₂	Sudah sepertinya karena sudah menangani permukiman kumuh dengan dibangun prasarana.
I ₁₋₃	Sudah menangani karena sudah membantu masyarakat banget hanya belum seluruhnya tertangani.
I ₁₋₄	Belum sesuai tujuan karena pola pikir masyarakat belum berubah karena masyarakat tong sampah sudah dibikin tapi buang sampah masih sembarangan, kemudian disini kendala dalam masalah pengangkutan sampah.
I ₁₋₅	Tujuan dari adanya program untuk menuntaskan permukiman kumuh, dari pernyataan orang NUSP-2 sendiri menyatakan untuk 2 RW ini dari program NUSP-2 dianggap sudah tidak kumuh. Namun jika masih dianggap kumuh maka bantuan tersebut masih terus diberikan karena dianggap sudah tidak kumuh maka program dihentikan.
I ₁₋₆	Tujuannya untuk mengurang permukiman kumuh, sudah mengurangi tapi belum merata.
I ₂₋₁	Tujuannya untuk mengatasi permukiman kumuh jadi sudah teratasi karena sudah dibangun jalan sudah dibangun jadi sudah mengurangi.
I ₂₋₂	Tujuannya untuk mengurangi permukiman kumuh, iya mengurani tapi Belum 100% tertangani permasalahan kumuh.
I ₂₋₃	Tujuannya untuk mengurangi permukiman kumuh, kalau mengurangi dengan sendirinya otomatis mengurangi, dengan adanya program tersebut masyarakat dengan sendirinya mencontoh yang sudah ada seperti membuat mck walaupun mencicil membuatnya. Sekitar 70% sudah mengurangi permukiman kumuh.
I ₂₋₄	Hasil yang diharapkan yaitu penuntasan kawasan kumuh yang sesuai dengan sk permukiman kumuh program nusp-2 ini, dimana terdapat 7 kriteria. Kita berharap dengan adanya program ini wilayah yang mendapatkan program dapat menuntaskan kekumuhan di wilayahnya baik dari infrastruktur maupun bangunan. Dimana infrastruktur dapat berupa jalan lingkungan, sanitasi, air bersih, drainase. Untuk kecamatan kasemen sendiri jika melihat dari kriteria selesai namun kalau dilihat dari tingkat kebiasaan atau perilaku itu masih jauh, kalau dilihat dari program untuk menangani permukiman kumuh selesai tapi untuk kumuhnya belum ada perubahan karena perilaku manusia yang masih sulit diubah.
I ₂₋₅	Tujuan utama nusp-2 untuk menangani permukiman kumuh, kalau penanganan permukiman kumuh dari segi infrastrukturnya sendiri sudah jelas berkurang, katakanlah jalan, jalan yang tadinya berlobang dan bercampur lumpur sekarang sudah tidak ada, kemudian air genangan yang tadinya menggenang kemudian diarahkan untuk membuat drainase sehingga tidak lagi. Memang upaya itu terlihat namun hanya sebatas penanganan infrastruktur aja, tidak ada penanganan lain contohnya PHBS dari dinkes harus turun, lalu kebersihan lingkungannya juga harus dilakukan himbauan seperti jangan membuang sampah sembarangan, kemudian

	<p>drainase juga biasanya banyak berisi sampah plastik, untuk limbah rumah tangga kita buat ipal komunal, untuk daerah yang tidak memiliki air yang biasa mandi di sungai dibuatkan SAB dan MCK. Miskin dan kumuh itu hampir sama bagaikan kertas putih, karena masyarakat miskin lebih kearah kumuh dimana mau mandi tidak ada kamar mandi makanya dibuatkan wc umum. Namun setelah infrastruktur terbangun mereka tidak mau memelihara. Padahal setelah infrastruktur terbangun kita kan punya KPP, iuran untuk pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur namun iuran tersebut juga masih sangat sulit karena alasan ekonomi biasanya. Dalam permukiman ada masyarakat yang mampu dan tidak mampu seharusnya masyarakat mampu bisa subsidi silang dengan masyarakat yang tidak mampu.</p>
Q2	Apakah pelaksanaan program NUSP-2 di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah) sesuai dengan pedoman umum?
I1-1	Pelaksanaan sudah sesuai dengan teknis dan prosedur karena kalau tidak mengikuti akan menimbulkan masalah yang lain.
I1-2	Pelaksanaan yang ada sudah sesuai sama pedomannya.
I1-3	Iya sudah sesuai karena kita kalau ingin melaksanakan apa-apa memperhatikan pedoman.
I1-4	Pelaksanaan sesuai dengan pedoman karena dari awal ada musyawarah.
I1-5	Sudah sesuai dengan petunjuk karena kita mengikuti saran dan arahan yang diberikan.
I1-6	Udah sesuai karena kita mah selalu ngikutin arahan yang dikasih.
I2-1	Sudah sesuai pedoman pelaksanaannya mah kalau enggak pasti timbul masalah.
I2-2	Pelaksanaan sudah sesuai pedoman yang ada karena sudah diaudit.
I2-3	Kalau Kelurahan Kilasah sudah memenuhi syarat pedoman umum, namun kemarin sempat ada kendala masalah drainase, saat drainasenya diukur terdapat complain dari pihak kota jadi saat itu kami dipanggil namun sudah selesai karena saat itu panjang drainase kurang 11 meter namun ternyata kesalahannya bukan dikita ataupun di pihak kota namun terdapat di meterannya, ternyata meteran yang digunakan salah namun saat ini sudah selesai.
I2-4	Kalau pelaksanaan itu memang harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya karena jika tidak memperhatikan hal tersebut tidak dapat juga dilakukan pencairan dana. Kemudian saat pemeriksaan akhir juga jika ada yang tidak sesuai kita tidak mau tanda tangan sebelum diperbaiki terlebih dahulu baru kita memantau lagi kalau sudah sesuai baru kita tanda tangani
I2-5	Iya sudah sesuai karena telah menyesuaikan dengan 7 indikator tersebut, namun itu hanya dari infrastruktur saja seharusnya ditunjang dengan bagian lain juga. Terkait sinergitas Karena perencanaan dari Bappeda maka kita ingin tidak hanya dari infrastruktur saja yang digarap namun juga dari berbagai aspek, seperti dari Dinas Perhubungan menangani pju, kemudian PU menangani jalan seperti jalan-jalan utama karena itu merupakan tugas PU, kemudian RTLH ditangani dinsos. Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemda namun belum sinergi karena upaya yang mereka lakukan lokusnya kurang tepat yang dimana harusna lokasi lokasi miskin atau kumuh itu.
Q3	Berapa lama waktu untuk pelaksanaan pembangunan prasarana NUSP-2?
I1-1	Total 90 hari kerja tapi disini tidak pernah lebih dari 90 hari.
I1-2	Waktu itu dikasih waktu 90 hari sih.
I1-3	Pelaksanaan 90 hari kerja tapi disinimah tidak pernah telat paling kalau ada yang telat itu karena kendala cuaca.
I1-4	Pelaksanaan 90 hari kerja, berbeda beda setiap pelaksanaan pembangunannya.

I ₁₋₅	Pelaksanaan pembangunan 90 hari kerja. Namun kilasah tidak pernah terlambat sesuai ketentuan. Kalau terlambat biasanya karena kondisinya musim hujan.
I ₁₋₆	Kalo enggak salah 90 hari kerja.
I ₂₋₁	Untuk waktu pengerjaan kurang tau karena mengontrol saja udah.
I ₂₋₂	Pembangunan prasarana kalo gasalah 40 hari kerja di papan informasi juga ada.
I ₂₋₃	Pekerjaannya terkadang kurang dari 100 hari kerja karena disini kendalanya lahan karena masyarakat kalau misalnya membuat drainase kalau kena tanahnya sedikit aja itu komplain.
I ₂₋₄	Kalau melihat kontraknya itu 3 bulan, tapi yang namanya pembangunan oleh masyarakatnya walaupun kontraknya 3 bulan namun pelaksanaan pembangunan lebih itu tidak masalah dan tidak ada sanksi karena kita kan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi tidak masalah jika pelaksanaan pembangunan melebihi kontrak asal tidak melebihi tahun anggaran. sebenarnya melebihi tahun anggaran juga tidak apa-apa kalau hanya untuk finishingnya saja.
I ₂₋₅	Pelaksanaan pembangunan 3 bulan dan selama ini tepat 3 bulan karna selalu dipantau pekerjaannya dari Dinas Perkim dan Bappeda.
I ₂₋₆	Kalo tidak salah MCK 1 minggu, kalau semua 3 bulan juga sampe karna kan bertahap.
I ₂₋₇	Kalo tidak salah 100 hari kerja tapi sebelum 100 hari sudah selesai.
I ₂₋₈	Dulu sekitar 3 bulanan gitulah.
Q₄	Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan program NUSP-2 di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Kalau hambatan tidak ada paling hanya kendala lahan saja karena kan itu lahan hibah seperti itu kecil-kecil saja karena semua berjalan sesuai rencana, karena sebelumnya yang punya tanah itu kita panggilin dulu karena ini tanah masyarakat kalau memang ada tanah masyarakat yang kena kita panggilin yang punya tanah dan kita adakan musyawarah.
I ₁₋₂	Tidak ada hambatan sama sekali.
I ₁₋₃	Kalau hambatan tidak ada sih, kalau buat lahan juga tidak ada masalah.
I ₁₋₄	Paling masalah lahan saja kalau hambatan karena lahan hibah. hanya kalau untuk SAB itu lahannya bekas sumur jadi tidak ada masalah.
I ₁₋₅	Hambatannya yaitu situasi dan kondisi apalagi saat musim hujan.
I ₁₋₆	Kalau hambatan tidak ada, kalau masalah lahan juga susah cari lahan dan kebetulan saya ada jadi yaudah dipake saja gitu saya juga butuh.
I ₂₋₁	Kalau hambatan tidak ada karena masyarakat sangat mendukung.
I ₂₋₂	Hambatannya susah mencarin lahan yang dihibahkan.
I ₂₋₃	Kendalanya waktu itu lahan karena lahanya hibah, karena namanya juga tanah dijual juga laku dan terkadang terkendala kondisi seperti hujan.
I ₂₋₆	Kendala tidak ada karenakan kalau lahan yasudah ini punya ibu dari pada tidak dipakai yasudah dipakai saja karena juga memang kita perlu MCK gitu.
I ₂₋₇	Tidak ada kendala lancar saja, <i>Alhamdulillah</i> lahan juga tidak ada kendala.
I ₂₋₈	Tidak ada kendala.
Q₅	Bagaimanakah peran masyarakat dalam musyawarah di dalam program NUSP-2?
I ₂₋₄	Peran masyarakat sangat penting karena mereka yang akan mengusulkan prasarana yang akan dibangun karena mereka yang mengetahui kebutuhan di wilayahnya sendiri. Fungsinya masyarakat diundang karena masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan memelihara nantinya maka dari itu masyarakat

	harus selalu dilibatkan agar rasa memiliki masyarakat tinggi terhadap prasarana yang dibangun.
I ₂₋₅	Masyarakat pasti senang karena permukiman mereka akan dibangun dan diperbaiki. Peran dalam proses perencanaan mereka ikut merencanakan proses NUAP karena pekerjaan itukan yang mengerjakan masyarakat sehingga apapun yang dikerjakan itu oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Q₆	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Peran masyarakat sangat penting karena kitakan tidak tahu apa yang dibutuhkan kalau mereka tidak hadir dalam musyawarah. Kita undang semua masyarakat disitu terjadi dialog jadi disitu masyarakat menyampaikan kebutuhannya apa saja.
I ₁₋₂	Masyarakat banyak yang datang di musyawarah, diundang sama BKM dan sama saya kumpul di aula masjid.
I ₁₋₃	Lumayan banyak sih yang ikut, karena kita kan ngundangnya enggak semua hanya perwakilan soalnya kalau semua diundang susah.
I ₁₋₄	BKM mengundang musyawarah hanya 30% yang diundang karena kalau untuk semua hadir itu susah padahal kan partisipasi masyarakat dalam musyawarah itukan sangat penting. Tapi warga ikut berpendapat di musyawarah tersebut karena sebelumnya saya sudah menyampaikan ke warga yang butuh apa apa disampaikan saja.
I ₁₋₅	Musyawarahnya ada yang datang ada yang tidak, hanya 60% saja yang datang padahal peran mereka sangat penting. Alasan masyarakat yang tidak datang alasannya sibuk. Masyarakat juga selalu diberi kesempatan untuk berpendapat dalam musyawarah.
I ₁₋₆	Musyawarah banyak yang enggak datang bilanganya pada sibuk.
I ₂₋₁	Masyarakat <i>alhamdulillah</i> pada dateng, masyarakat juga dikasih kesempatan untuk mengajukan sebelumnya juga sudah dikasih arahan sampaikan saja apa aja yang mau dibangun cuma kan masyarakat sini iya iya aja. Masyarakat juga tapi mengusulkan diluar pogram NUSP-2 kaya rumah tidak layak huni.
I ₂₋₂	Banyak yang berpartisipasi banyak yang datang dan masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat. Namun masih banyak yang belum dapat program jadi masih banyak masyarakat yang menanyakan.
I ₂₋₃	Masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah sangat banyak bahkan kehadiran masyarakat itu melebihi kuota. Perannya sangat bagus karena sudah mulai sadar butuh pembangunan di wilayahnya. Peran masyarakat dalam musyawarah itu nomer satu sangat penting. Masyarakat selalu megusulkan kebutuhannya bahkan melebihi prasarna yang harus dibangun.
I ₂₋₆	Warga dikasih tau mau ada pembangunan. Pas musyawarah warga dikumpulin di aula masjid. Masyarakat diundang untuk musyawarah, Namanya juga mau dibantu ya kita mah seneng aja makanya dateng aja. Masyarakat yang dateng juga banyaklah.
I ₂₋₇	Musyawarah hanya perwakilan saja yang diundang untuk pengajuan. Pernah juga sih tapi diundang. Karena biasanya musyawarah dari bawah dulu maunya dibangun apa baru dibawa ke tingkat kelurahan musyawarah sama BKM. Masyarakat saat musyawarah lumayan yang datang karena pada sibuk jadi ya udah yang hadir aja untuk mewakili.
I ₂₋₈	Kalau rapat dikasih tahu dan dikasi undangan tapi banyak yang enggak dateng karena jauh juga kalau musywarah di balai desa. Tetapi kalau disuruh ngambil beras ke balai desa jauh juga pasti pada dateng, tapi kalau buat rapat susah tidak dapat

	amplop kalau dapat lagi sibuk juga pasti pada ditunda.
Q7	Apakah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program NUSP-2 di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Anggaran di total semua persiklus ada yang 500 juta ada yang 300 juta. Anggaran segitu kurang cukup sehingga digabung dengan program dari perkim.
I ₁₋₂	Kalau anggaran sepertinya cukup cukup aja.
I ₁₋₃	Kalau menurut saya cukup karena prasarana yang dibangun udah membantu warga lalu juga sudah mengurangi permukiman kumuh.
I ₁₋₄	Anggaran kurang tahu karena kalau masih ada papan informasi paling kita lihat dari sana aja.
I ₁₋₅	Anggaran tersebut untuk satu kelurahan ini masih kurang karena masih banyak RW lain yang belum tertangani. Namun kalau untuk 2 RW sesuai dengan sk itu cukuplah.
I ₁₋₆	Kalau anggaran kurang tahu saya, BKM yang tahu.
I ₂₋₁	Kurang tahu soal anggaran. karena tidak tahu jadi kurang tahu cukup atau enggaknya.
I ₂₋₂	Anggaran segitu tidak cukup karena masih banyak yang belum dibangun cuma <i>Alhamdulillah</i> mengurangi permukiman kumuhlah.
I ₂₋₃	Kurang tau soal dana, paling kita hanya memantau pekerjaannya saja.
I ₂₋₄	Kalau untuk anggaran yang diberikan untuk permukiman kumuh sebenarnya tidak pernah puas karena item-item yang diberikan hanya itu saja yang lainnya tidak jadi kalau mengikuti anggaran juga kurang saja. Dilihat dari anggaran APBD yang minim jadi kita berusaha untuk mendapat anggaran dari pusat untuk permukiman kumuh karena kalau mengikuti anggaran pasti kurang.
I ₂₋₅	Total 36 M, namun hanya 23 M yang terserap. Sisa itu dibalikan ke ADB. Dari 92 Ha masih terdapat sisa yang belum tertangani 14 Ha yang belum tertangani karena tahun anggaran yang sudah habis.
Q8	Apakah iuran masyarakat sesuai kesepakatan saat musyawarah?
I ₁₋₁	Iuran perbulan berjalan 5 ribu karena kalau tidak berjalan bagaimana buat bayar listriknya karena kalau diputus listriknya kita juga yang repot.
I ₁₋₂	Sesuai dama musyawarah, iuran itu 15 ribu satu rumah dulu banyak yang banyak tetapi sekarang kurang.
I ₁₋₃	Iuran sudah sesuai sama kemauan warga soalnya di musyawarahin dulu.
I ₁₋₄	Iuran disini 5 ribu satu rumah dan sudah sesuai dengan kesepakatan masyarakat karena sebelumnya dimusyawarahkan dulu. Sebenarnya 5 ribu itu kurang makanya kalau ada yang ingin menyalur kerumah saya bedakan iuranya utuk menutupi kekuarangan yang tadi. Iurannya pada jalan semua kalau sedikit sedikit nombok sudah biasa karena kalau warga kalau lagi enggak ada uang juga kita enggak bisa memaksa, paling kalau bulan ini lagi enggak ada uang mereka di dobel sama bulan depan.
I ₁₋₅	Iuran sesuai dengan kemampuan masyarakat karena melalui musyawarah kalau disini 10 ribu satu ruma. Terkadang masih sulit ditagih uang iuran karena kondisi masyarakat disini rata-rata kurang mampu sehingga pendapatannya tidak menentu karena disini kebanyakan buruh tani.
I ₁₋₆	Sudah sesuai karena dimusyawarah dulu masyarakat pada sanggupnya berapa, tapi saat ditagih pada susah buat bayar.
I ₂₋₁	Kalau untuk iuran saya kurang tahu hanya pastinya udah sesuai.
I ₂₋₂	Iuran sesuai kesepakatan masyarakat saat musyawarah dan sesuai kemampuan karena tidak ada yang protes lancar-lancar saja.

I ₂₋₃	Iuran sesuai musyawarah karena sebelumnya masyarakat dikumpulkan. Mereka suka telat bayar karena kondisi ekonomi bahkan kadang yang ekonominya tinggi juga terkadang suka pelit.
I ₂₋₆	Pas musyawarah ditentukan bareng sama warga sebulan 15 ribu. Itu sudah sesuai kemampuan masyarakat juga kan udah lewat musyawarah.
I ₂₋₇	Iuran itu 5 ribu perbulan, sebelumnya musyawarah dulu dan sudah sesuai dengan kesepakatan.
I ₂₋₈	Saat musyawarah menyepakati iuran untuk pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana. Itu sudah sesuai kemampuan masyarakat karena kan lewat musayarah.
Q₉	Apakah terdapat pelatihan pengurus BKM dan KPP dan materi apa saja yang disampaikan?
I ₂₋₄	Untuk pelatihan ada dari pusat, materi yang terdapat dalam pelatihan kalau KPP itu tatacara pemanfaatan, tata cara pembukuan dan pemeliharaan, kalau BKM materinya biasanya seperti pengadaan barang jasa, tata cara manajemen keuanganya, manajemen sosialisasi seperti itu. Kalau bkm juga pada saat pelatihan dijelaskan tata cara pelaksanaan pembangunannya.
I ₂₋₅	Ada pelatihan dari progran nuspnya, materi yang disampaikan kalo BKM dari Bappeda hanya sebatas mensosialisasikan ditempat yang akan dilaksanakan.
Q₁₀	Apakah pengurus BKM dan KPP di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah) mengikuti pelatihan dan materi apa saja yang diberikan?
I ₁₋₁	Waktu itu saya ikut pelatihannya di Hotel Grand Krakatau 3 hari, materinya kaya peran BKM, peran KPP sama peran masyarakat.
I ₁₋₂	Saya ikut pelatihan, waktu itu ada materi yang dikasih itu seperti tata cara pemanfaatan gitu.
I ₁₋₃	Saya ikut pelatihannya waktu itu, materinya biasanya kaya pembukuan, pembuatan LPJ, dan cara buat proposal.
I ₁₋₄	Ikut pelatihan saya waktu itu pelatihannya 3 hari di Hotel Grand Krakatau. Materi yang disampaikan terutama tentang kekumuhan, kemudian masalah sanitasi.
I ₁₋₅	Terdapat pelatihan di Kota Serang yang dikumpulkan di Hotel Grand Krakatau yang diadakan oleh pusat, materi yang disampaikan terkait cara pelaksanaan, tata cara pemeliharaan untuk KPP. BKM dan KPP biasanya mendapatkan buku pedoman untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
I ₁₋₆	Iya mengikuti waktu itu 3 hari sama BKM juga.
I ₂₋₁	Ada pelatihan pada ikut, Materi yang disampaikan mengenai sanitasi, pembuangan air limbahh gitu.
I ₂₋₂	Iya ada pelatihan, materinya kaya pembukuan, pembuatan LPJ, cara buat proposal.
I ₂₋₃	BKM dan KPP mengikuti pelatihan bahkan kalau kurang satu dibatalkan karena itukan untuk pelaksanaan teknis dilapangan karena pelatihan itukan sangat penting.
Q₁₁	Apakah terdapat monitoring atau pemantauan dalam pelaksana program NUSP-2 di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Ya ada pemantauannya langsung sama perkim setiap minggu itu pemantauan kalau timnya tiap hari ngeliatin kita pada kerja jadi bener bener diawasin. Kita juga kalau tidak ada tim yang nongkrongin takut ada yang salah kalau ada tim yang nongkrongin kan meminimalisir adanya kesalahan.
I ₁₋₂	Iya ada pemantauan waktu itusih dari dinas, sering dipantau saat selesai juga dicek lagi.
I ₁₋₃	Ada pemantauan dari dinas terkait sama kelurahan, waktu itu pemantauan pas 50% pelaksanaan dan saat selesai pembangunan juga ada.
I ₁₋₄	Pemantau dari dinas dan kelurahan, pemantauan dari 50% pelaksanaan

	pembangunan kemudian setelah selesai juga ada untuk pemeriksaan.
I ₁₋₅	Terdapat pemantauan dari kelurahan biasanya kelurahan setiap hari mantau, dari Bappeda dan Dinas Perkim sering memantau saat pelaksanaan. Kalau setelah selesai pelaksanaan tidak ada pemantauan.
I ₁₋₆	Ada pemantauan waktu itu, saat selesai juga dipantau.
I ₂₋₁	Dari kelurahan ikut mantau tapi tidak sering-sering saat perencanaan saat pengerjaan sudah selesai juga mantau. Dari dinas kemungkinan mantau.
I ₂₋₂	Terdapat pemantauan saat awal, tengah dan akhir. Kalau akhir biasanya pengecekan kembali disesuaikan dengan pengajuan misalnya mengajukan 100 meter diukur lagi apakah benar 100 meter gitu.
I ₂₋₃	Kalau monitoring itu baru 50% saja sudah dipantau sebelum selesai itu selalu dipantau dan akhir pembangunan juga dipantau. Pemantauan biasanya yang ikut dari dinas terkait dan juga kelurahan.
I ₂₋₄	Pemantauan dilakukan setiap termin, dan juga jika ada kegiatan lain di lokasi pelaksanaan program NUSP-2 kita juga pasti sekalian memantau pelaksanaannya.
I ₂₋₅	Ada 2 kali yaitu pada pelaksanaan pembangunan prasarana 60% dan 100%.
I ₂₋₆	Ada yang mantau pas dibangun pertengahan sama pas selesai, gatau darimananya tapi ada yang mantau aja pokoknya.
I ₂₋₇	Ada dari dinas dilihat saat berapa persen gitu kesini kemudian saat selesai juga ada pemantauan lagi.
I ₂₋₈	Terdapat kontrol, saat pembangunan ada saat awal dan akhir saja adanya.
Q₁₂	Apakah BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program NUSP-2?
I ₂₋₄	Kalau BKM dalam melaksanakan tugasnya sudah bisa tapi terkadang apa yang diterangkan dalam pelatihan namun dalam pelaksanaannya bagaimana mereka dan tidak menyesuaikan dengan pelaksanaan yang telah dijelaskan dalam pelatihan. Kalau untuk pelaksanaan mereka melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis terkait penggunaan anggaran, namun ya dalam pelaksanaan pembangunan juga bagaimana pekerja mereka mengerjakan yang biasanya mereka kerjakan dan terkadang tidak patuh dengan spesifikasi teknik yang terdapat di aturan kalau kita sudah tegur dan tidak mau tanda tangan baru mereka merubah lagi. Untuk pelaporan juga biasanya harus dipaksa dulu kadang baru mereka membuat pelaporan.
I ₂₋₅	Sudah memiliki kompetensinya masing-masing karena pemilihannya juga melalui musyawarah dan masyarakat yang memilih karena masyarakat yang mengetahui sehingga sudah memadai kompetensinya.
Q₁₃	Apakah syarat untuk menjadi BKM dan KPP?
I ₂₋₄	Kalau bkm itu biasanya sudah dibentuk dari program-program sebelumnya kemudian kalau KPP itu harus berdomisili di tempat pelaksanaan NUSP-2 tersebut karena mereka yang lebih tahu mengenai wilayahnya sehingga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap prasarana yang dibangun.
I ₂₋₅	Tidak ada syarat khusus yang penting mereka bertanggung jawab dengan tugasnya. Memang orang yang menjadi BKM dan KPP juga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut karena mereka yang mengerti wilayah mereka.
Q₁₄	Apakah pemilihan BKM dan KPP di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah) telah sesuai pedoman?
I ₁₋₁	Sebelum ada program NUSP-2 sudah ada bkm, awalnya dari tingkat rt rw lalu dibawa ke kelurahan. Kalau KPP itu dibentuk di musyawarah kelurahan dibentuk KPP sebagai perawat dari bangunan itu, dan tetap melibatkan masyarakat siapa saja kandidatnya kemudian dipilihlah saat musyawarah. Pemilihan sesuai dengan

	petunjuk teknis karena kita langsung melihat dari petunjuk teknis itu.
I ₁₋₂	Kalau BKM itu udah dari program sebelumnya, kalau KPP dulu itu dimusyawarhin. Jadi udah sesuai pedomanlah.
I ₁₋₃	Dulu pemilihannya melalui musyawarah jadi dari pendapat warga gitu, jadi dipilih dari tingkat RT dibawa ke RW baru ke kelurahan musyawarah, udah sesuai sama pedoman.
I ₁₋₄	Pemilihan BKM sama KPP sesuai petunjuk pelaksanaan karena diadakan di musyawarah juga.
I ₁₋₅	Iya sesuai prosedur yang ada karena dilakukan dengan musyawarah. Dimana pada tingkat RW mengutus 2 orang dibawa ke kelurahan kemudian dimusyawarahkan siapa yang akan terpilih menjadi BKM.
I ₁₋₆	Udah sesuai soalnya dipilihnya melalui musyawarah jadi berdasarkan pemilihan warga.
I ₂₋₁	Dilanjutkan BKM nya dari program sebelumnya jadi saya kurang tahu bagaimana pemilihannya, kalau KPP pemilihannya belum tahu.
I ₂₋₂	Sudah sesuai karena kalau BKM sudah lama dari program sebelumnya, kalau KPP pemilihannya juga musyawarah dari tingkat rt kemudian rw lalu dibawa ke kelurahan.
I ₂₋₃	Pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan prosedurnya juga. Caranya itu dulu masyarakat dikumpulin dan diadakan musyawarah.
I ₂₋₄	Pemilihan BKM dan KPP sudah sesuai dengan pedoman karena sudah melalui musyawarah dengan masyarakat. Kita tidak bisa mengintervensi masyarakat karena masyarakat yang dapat menentukan siapa ketua siapa anggotanya.
I ₂₋₅	Sesuai dengan prosedur yang ada sesuai petunjuk pelaksanaan, tidak ada syarat khusus untuk menjadi BKM karena ini dipilih dari musyawarah yang dipilih dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan. Karena BKM juga memiliki SK dari kesbangpol, jika tidak tercatat di SK kesbangpol maka tidak bisa disebut BKM.
Q₁₅	Bagaimanakah pemilihan BKM dan KPP di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₂₋₆	Masyarakat tidak tahu, tapi memang masyarakat setuju saja sama pak Saad karena pak saad benar benar membela kita agar dapat bantuan.
I ₂₋₇	Waktu itu kurang tau, BKM itu katanya tahun 2012. Kalau KPP waktu itu cuma yang dikumpulin tokoh masyarakat karena disini susah untuk mengumpulkan masyarakat jadi langsung saja musyawarah yang ada disetujui misal si A yang mampu bertanggung jawab.
I ₂₋₈	Pemilihannya di balai desa tetapi masyarakat tidak diberi tahu pemilihannya.
Q₁₆	Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki dokumen untuk melaksanakan program NUSP-2?
I ₁₋₁	Kita juga ada dokumen karena kita kan nanti ada laporannya.
I ₁₋₂	Iya kita ada dokumennya ko.
I ₁₋₃	Iya ada buat kita pegangan untuk melaksanakan program NUSP-2 ini.
I ₁₋₄	Dapat dokumen tatacara pemanfaatan saat pelatihan.
I ₁₋₅	KPP mungkin punya dokumen tatacara pemanfaatan dan pemeliharaan karena meraka kan dilatih juga. Kalau BKM memiliki dokumen untuk tata cara pelaksanaan dimana terdapat NUAP.
I ₁₋₆	Ada pedomannya gitu cuma saya enggak dikasih ya jadi ya engga ada.
Q₁₇	Apakah pengurus BKM dan KPP di Kelurahan Kilasah, Warung Jaud dan Margaluyu telah menjalankan tugasnya dengan baik?
I ₂₋₄	Belum sepenuhnya menjalankan karena walaupun kita menagajarkan teknisnya

	seperti ini kalau mereka maunya seperti itu yasudah karena mereka beranggapan mereka telah terbiasa melakukan seperti itu.
I ₂₋₅	Sudah menjalani dengan baik, kalau KPP itu masih terkendala dengan iuran yang suka telat karena kita juga tidak dapat memaksakan masyarakat untuk membayar.
Q₁₈	Apakah pengurus BKM dan KPP memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya?
I ₂₋₆	Sangat tepat karena sangat membantu dalam program.
I ₂₋₇	Sangat memadai karena BKM dan KPP bertanggung jawab sama tugasnya.
I ₂₋₈	Ya bagus kalau ada apa-apa BKM selalu musyawarah, kalau KPP juga ada yang rusak langsung diperbaiki walaupun itu bak sampah tidak diperbaiki karena banyak yang susah bayar iuran.
Q₁₉	Bagaimana kondisi masyarakat di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Dari segi ekonomi itu mereka buruh tani lahannya punya orang 95% buruh tani paling 5 % pembantu ibu rumah tangga paling yang lainnya nganggur dan paling dagang kecil-kecil gitu sambil jadi buruh tani. Pendapatan juga jadi buruh tani 3 bulan sekali 1200 meter hanya 700ribu/4bulan.
I ₁₋₂	Kalau dari segi ekonomi disini kurang.
I ₁₋₃	Kondisi masyarakat disini kebanyakan kerjanya pada buruh tani, jadi secara ekonomi kurang.
I ₁₋₄	Secara ekonomi masyarakat disini buruh tani dan buruh lepas. Saya pikir bantuan pemerintah ini setelah masyarakat dibantu masyarakat selalu mengharapkan terus.
I ₁₋₅	Sekarang yang dibutuhkan oleh kami yaitu penghasilan yang memadai. Bagaimana caranya penduduk kami memiliki penghasilan umr. Karna kami yang hanya bekerja serabutan itu sulit untuk memnuhi segala iuran-iuran. Kemudian disini SDM nya yang kurang rata-rata dari usia saya keatas tidak memiliki ijazah.
I ₁₋₆	Masyarakat disini pada kurang peduli sama lingkungan sih, masih ada aja yang ke kali kalo buat buang sampah gitu padahal kan udah disediakan.
I ₂₋₁	Ya kalau disini masyarakat kesadarannya kurang, pemerintah kan membangunnya infrastruktur harusnya sdm nya dulu ya, karena kesadarannya belum nampak. Kalau ekonomi kalau dilihat dari permintaan dari sktm sih banyak.
I ₂₋₂	Kalau dari ekonomi masih banyak yang dibawah rata-rata soalnya disini. Karena disini masyarakatnya kebanyakan hanya bekerja serabutan aja bukan pegawai tetap.
I ₂₋₃	Kondisi di kelurahan kilasah masyarakatnya kurang karena disini masyarakatnya menjadi buruh tani tetapi yang memiliki sawah itu orang lain.
I ₂₋₄	Kondisi masyarakat disana pertama kurang peduli akan kondisi lingkungan, kurang peduli akan wilayah sekitarnya mereka beranggapan bahwa program yang dibangun itu pemerintah juga yang harus memeliharanya, mereka menerima saja diberi program namun untuk merubah kesadaran masyarakat itu sangat sulit karena kurang peduli akan lingkungannya. Tugas beratnya yaitu merubah kebiasaan dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan itu sulit karena melibatkan dari dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan, dinas pendidikan karena sedini mungkin anak-anak itu harus diberikan pengetahuan mengenai lingkungan.
I ₂₋₅	Masyarakat disana pemikirannya masih lebih kepedesaan, susah untuk berkembang seperti orang kota walaupun kita sudah memberikan kesadaran untuk meningkatkan perilaku dan telah meningkatkan infrastruktur tapi tetap saja begitu. Kasemen itu merupakan daerah yang diagungkan karena terdapat Banten Lama jadi berimbas kepada seluruh Kecamatan Kasemen sehingga dapat dibantu juga oleh provinsi agar kasemen bisa lebih baik, seperti sekarang sudah bagus nya jalan untuk mencapai

	kasemen dari segala arah tetapi lagi-lagi masyarakatnya sendiri yang belum sadar. Usaha untuk menyadarkan masyarakat ada namun untuk menyadarkan masyarakat itu kan tidak dapat secepat itu karena perilaku masyarakat disana sangat sulit diubah.
I ₂₋₆	Disini kebanyakan kerjaaaannya buruh lepas.
I ₂₋₇	Kondisi disini gitu masyarakatnya kebanyakan kerjanya tidak tetap. Disini juga yang punya MCK belum ada 50% nya.
I ₂₋₈	Kondisi masyarakat disini kerjanya macam-macam ada yang ngojek dan serabutan.
Q₂₀	Apakah pelaksanaan program NUSP-2 tepat di (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Sangat tepat sekali karena jika tidak dihantam dengan program NUSP-2 khususnya wilayah Sadiah sangat kumuh sekali tapi dari program NUSP-2 juga kurang makanya itu kolaborasi dengan kotaku dan perkim.
I ₁₋₂	Tepat programnya ada disini tuh saya malah makasih udah dikasih mck, jalan bagus.
I ₁₋₃	Sangat tepat sekali karena membantu masyarakat disini dengan adanya program ini.
I ₁₋₄	Program nusp-2 sangat tepat di kilasah karena dari awal kan dilihat dari kondisi kekumuhan dan disini memang masuk.
I ₁₋₅	Pelaksanaan sudah tepat dikelurahan kilasah, karena dianggap sama pihak sana kalau disini itu kumuh.
I ₁₋₆	Sangat tepat karena kan memang masyarakat disini butuh sekali kaya MCK sama SAB soalnya biasanya kalau mandi sama nyuci itu pada ke kali.
I ₂₋₁	Prasarana yang dibangun sudah tepat karena memang prasarana yang dibangun itu yang dibutuhkan masyarakat.
I ₂₋₂	Program NUSP-2 sangat tepat di Kelurahan Margaluyu malah kalau bisa ada lagi.
I ₂₋₃	Kelurahan kilasah sangat tepat menerima program NUSP-2 karena dengan adanya pembangunan prasarana seakan akan masyarakat diberi contoh untuk membangun juga salah satunya MCK. Sekarang masyarakat banyak yang gali bikin sepiteng dulu tapi kamar mandinya belum, dengan sendirinya masyarakat mengikuti walaupun dicicil.
I ₂₋₄	Sangat tepat karena memang masyarakat disana sangat membutuhkan prasarana dari program NUSP-2 karena rata-rata mereka tidak memiliki MCK biasanya kalau mandi atau mencuci harus ke sungai.
I ₂₋₅	Kalau untuk ketepatan sudah karena kan sudah sesuai dengan SK, kita juga menyesuaikan dengan SK yang telah ada, karena SK itu hanya bukan sebatas kemauan namun juga indentifikasi terlebih dahulu.
I ₂₋₆	Program NUSP-2 sudah tepat.
I ₂₋₇	Program nusp 2 sangat tepat karena banyak yang tidak punya MCK juga.
I ₂₋₈	Sangat tepat sekali karena yang dibangun sesuai kebutuhan warga.
Q₂₁	Apakah masyarakat merasakan keadilan dengan prasarana yang telah dibangun?
I ₁₋₁	Iya adil-adil saja, tidak ada protes karena yang penting semuanya menjaga bersama.
I ₁₋₂	Tidak ada karena memang lahannya ada disini.
I ₁₋₃	Adil saja karena memang prasarana yang dibangun di daerah yang membutuhkan prasarana itu kaya MCK sama SAB gitu.
I ₁₋₄	Sempat ada kecemburuan sosial karena dulu masyarakatnya kurang respon dan jarang dateng jadi gimana mau dibangun. Tetapi ini sudah sesuai aturan karena disini yang dianggap masih kumuh.
I ₁₋₅	Misalnya MCK yang menggunakan RT 17 namun masyarakat RT 3 jarang menggunakan mck karena rata-rata disini pada memiliki kamar mandi. Ya memang

	merasa adil atau tidak adilnya kita tidak ada lahannya karena yang ada lahan hanya di rt 17 saja.
I ₁₋₆	Adil aja enggak ada yang protes soalnya kan kalau kaya MCK sama SAB butuh lahan, jadi dibangun yang ada lahannya aja.
I ₂₋₁	Enggak ada yang protes sih lagian cari lahannya juga susah jadi ya pada nerima karena kan udah di musyawarahin.
I ₂₋₂	Biasanya pada iri gitu masyarakat kenapa yang dibangun di RW itu saja, tapi kan memang itu sudah sesuai dengan surat keputusannya ya. Tapi tidak ada kecemburuan sosial karena ditaro di RT situ sih prasarannya.
I ₂₋₃	Tidak ada protes karena memang lahannya tidak ada disana, yang siap lahannya dihibahkan hanya pak RW sedangkan lingkungan yang membutuhkan prasarana lahannya tidak ada jadi yasudah karena dulu juga kan sudah melalui proses musyawarah.
I ₂₋₆	Merasa adil saja sih dan enggak ada yang protes karena sekarang kebanyakan sudah punya wc yang enggak punya pada kesini gitu saja enggak ada yang masalah.
I ₂₋₇	Merasa adil saja dan tidak ada protes dari warga lain juga, soalnya sudah tepat disitu karena kalau MCK yang banyak enggak punya di wilayah situ kalau bak sampah mah setiap rumah dapet sih.
I ₂₋₈	Sebenarnya yang banyak pake RT 4 namun diletakkan disitu mcknya, tidak ada protes dari warga karena memang lahannya adanya disitu, sebenarnya kadang suka ngeluh tapi gimana lagi ada lahannya disini.
Q₂₂	Apakah masyarakat memanfaatkan seluruh prasarana program NUSP-2?
I ₁₋₁	Kalau yang sudah maksimal itu jalan mck sab itu sudah maksimal, yang sampah sudah dimanfaatkan tetapi karena memang kurang keterampilan mengenai mesin yang memegang motor jadi kalau rusak bingung karna gapunya pemahaman tentang mesin karena kan kalau bekas sampah kena air yang asin gitu gitu jadi suka mengalami kerusakan.
I ₁₋₂	Masyarakat manfaatin kaya mck sama sarana air bersih, tapi kalau sampah malah terus terang itu motor diberikan ke mantan RW jadi tidak dipakai untuk mengangkut sampah paling kalau ada kegiatan masyarakat saya minjem tapi setelah itu ya digunakan pribadi. Kalau untuk sampah jadi sekarang sendiri-sendiri, itu saja ada bak sampah enggak dipake karena tidak ada yang ngambilin.
I ₁₋₃	Masyarakat memanfaatkan semua prasarannya kaya MCK sama SAB soalnya masyarakat biasanya pada ke kali, tapi memang kaya tempat sampah gitu belum dipakai.
I ₁₋₄	Kalau untuk MCK sama sarana air bersih digunakan sama masyarakat karena kebanyakan pada belum punya kamar mandi, tapi gerobak sama motor sampah belum digunakan karena memang tidak ada TPS nya, harapannya memang adanya TPS itu namun kendalanya TPS nya tidak ada. Setiap ada program suka mengajukan hanya lahannya tidak ada usaha ada dari KPP agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau menasehati masyarakatkan tidak bisa keras-keras harus baik-baik.
I ₁₋₅	Masyarakat sudah memanfaatkan prasarana terutama sarana air bersih karena biasanya masyarakat sini kalau mencuci kan di kali kalau kali tersebut tidak air dan dalam masa perbaikan baru sarana air bersih itu sangat digunakan. Tapi ya memang tempat sampahnya juga pada rusak ya itu belum dibenerin tapi masih bisa dipake aja gitu sama warga karena itumah kendala uang sih soalnya kan sulit masyarakat ditagihnya
I ₁₋₆	Kalo disini semuanya dimanfaatin sih apalagi kan motor sampah juga dipake tuh

	karena kita kan enggak punya TPS jadi sampah kita dibuangnya di Kaligandu sana.
I ₂₋₁	Prasarana itu kan dikasih motor sampah yang saya lihat belum dimanfaatkan sih ya tadinya mau saya ambil tapi takut tersinggung, yang megang tokoh masyarakat.
I ₂₋₂	Prasarana yang ada dipakai semua oleh masyarakat.
I ₂₋₃	Masyarakat sangat memanfaatkan prasarana yang ada.
I ₂₋₆	Masyarakat memanfaatkan prasarana yang ada, tetapi motor sampah enggak dipakai. Jadi kita kalau buang sampah ya di kali kalau engga ke kebun kalau tidak langsung buang ke tps sendiri aja.
I ₂₋₇	Masyarakat manfaatin prasarana yang dibangun karena dulu sebelum ada bantuan masyarakat kerepotan. Sementara ini karena tempat pembuangan sampah sementara enggak ada jadi masih ada kendala jadi biasanya masyarakat buang sampah sembarangan dan kadang juga buang dikali. Jadi tempat sampahnya itu kurang digunainlah.
I ₂₋₈	Semua prasarana yang ada dimanfaatkan kaya MCK, sarana air bersih, gerobak sampah sama motor sampah gitu dipakai.
Q₂₃	Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan survey kampung sendiri?
I ₁₋₁	Prasarana yang dibangun sesuai survey kampung sendiri, dari SKS melihat apakah kampung kita ini perlu dibangun, nantikan muncul permasalahan apa saja yang muncul kemudian dipelajari apa saja yang harus dibangun setelah survey itu.
I ₁₋₂	Udah sesuai survey kampung sendiri.
I ₁₋₃	Pembangunan prasarana sesuai dengan survey kampung sendiri karena dilihat juga sama apa yang diajukan.
I ₁₋₄	Pembangunan prasarana sesuai dengan SKS karena dilihat juga apa yang diajukan.
I ₁₋₅	Prasarana yang dibangun sudah sesuai survey kampung sendiri.
I ₁₋₆	Sudah sesuai survey kampung sendiri.
I ₂₋₁	Iya sudah sesuai suvey kampung sendiri sesuaiilah sama permasalahan disini
I ₂₋₂	Prasarana sesuai dengan survey kampung sendiri dan pengajuan.
I ₂₋₃	Disini mah prasarana yang dibangun sudah sesuai dengan survey kampung sendiri.
I ₂₋₆	Sudah sesuai soalnya yang dibangun yang dibutuhin warga.
I ₂₋₇	Iya udah sesuai sama survey kampung sendiri.
I ₂₋₈	Iya sesuai survey kampung sendiri.
Q₂₄	Bagaimana kinerja BKM dan KPP (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Melihat dari perawatan bagus karena kalau tidak dirawat kan berarti KPP tidak bekerja namun ini prasarannya dirawat. Ini kan MCK sudah dijadikan pameran di tingkat polres menang kemudian mck kita dijadikan lomba ditingkat kecamatan menang juga.
I ₁₋₂	Bagus kinerjanya karena selalu musyawarah kalo ada apa-apa.
I ₁₋₃	Bagus, soalnya tanggung jawab sama tugasnya.
I ₁₋₄	Bkm melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan karena selalu dimusyawahkan apapun yang akan dilakukan.
I ₁₋₅	Sudah bagus walaupun memang belum mampu mengerakkan kesadaran masyarakat buat bayar iuran.
I ₁₋₆	Bagus sih karena kalau ada apa-apa selalu koordinasi.
I ₂₋₁	Bagus, kalau BKM kerjasama baik kalau ada apa-apa informasi kalau mau ada apa-apa, selalu koordinasi.
I ₂₋₂	Kinerjanya bagus karena koordinasinya bagus dengan KPP nya. BKM dan KPP melaksanakan tugas sesuai pedoman.
I ₂₋₃	Kalau BKM sudah memadai karena sudah senior dan kalau ada apa-apa koordinasi,

	kalau untuk KPP kurang tahu.
I ₂₋₆	Sangat bagus karena selalu ngasih tau warga kalo mau ada apa-apa selalu bantu, kalo kerusakan juga cepet dibenerinnya.
I ₂₋₇	BKM selalu turun ke lapangan untuk mengecek, BKM tidak mau mendengar laporan saja jadi maunya turun langsung. KPP juga sangat bagus karena kalau ada yang rusak cepet ditanganin.
I ₂₋₈	Puas dengan kinerja BKM dan KPP, tapi kan ada kerusakan tempat sampah itu udah lapor tapi biasanya lama dibenerinnya. Disinimah perawatannya pas awal awal saja setelah itu yaudah dibiarin karena masyarakatnya susah.
Q₂₅	Bagaimana penanganan pada prasarana yang mengalami kerusakan?
I ₂₋₆	Kalau ada kerusakan disini cepet diperbaik kalau lapor seperti MCKnya suka rusak lapor saja misal lapor pagi kadang besoknya juga udah bisa dipakai lagi.
I ₂₋₇	Kalau ada prasarana yang rusak biasanya langsung lapor aja nanti akan ditanganin KPP, cuma kan KPP punya kesibukan lain jadi paling nunggu 1 atau 2 jam aja.
I ₂₋₈	Kalau ada kerusakan biasanya cepet ditanganin nya,, tapi ya kalau tempat sampah ini emang sudah lama hanya katanya ini karena enggak ada uang soalnya banyak yang susah ditagih iuran jadi itu juga rusak masih bisa dipakai yaudah dipakai saja gitu.
Q₂₆	Apakah manfaat adanya program NUSP-2 bagi (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Banyak manfaatnya seperti yang kalau hujan bingung jalannya jelek sekarang sudah bagus, secara sosial dulumah pada ribut tentang pembuangan air itu sekarang mah ketika udah dibuat drainase skrg udah pada rukun, anak sekolah dulu suka jatuh termasuk saya nganter anak sekolah pernah jatuh karena licin dan banjir saya ukur 25 cm bahkan anak-anak main dijalan itu. Maka dari itu pas banjir itu kita foto kita sampaikan ke pemerintah
I ₁₋₂	Sangat bermanfaat saya juga menikmati, yang biasanya buang air di kali jadi disini hanya namanya juga orang kampung kalau buang air disini bayar sedangkan kalau gabayar sayanya juga rugi. Tapi ya kalau ada kerusakan juga tetap saja kalau kurang pakai uang saya.
I ₁₋₃	Manfaatnya banyak banget, kaya biasanya masyarakat mandi nyuci di kali sekarang pada kesitu sama sarana air bersih juga dipakai banget sekarang kalau nyuci pada kesitu, terus drainase juga udah ada sekarang sama jalan-jalan juga udah bagus sekarang mah.
I ₁₋₄	Alhamdulillah untuk secara manfaat masyarakat tercukupi yang awalnya tidak air bersih sekarang ada dan dulu yang di sumur ngatri sekarang mah kan bisa disalurkan kerumah jadi tidak ngantri seperti dulu. Ada mck juga alhamdulillah yang dulunya buang sembarangan sekarang udah ada pola pikirnya sudah lumayan berubah walaupun belum 100% tertangani ya tapi sudah 60% tertanganlah.
I ₁₋₅	Manfaatnya sangat cukup untuk prasarana, karena yang belum cukup itu masalah ekonomi saja. Terdapat bantuan PKH itu tidak semua masyarakat, karena hanya untuk warga miskin saja sementara yang kelas menengah tidak mendapatkan bantuan. Untuk permasalahan prasarana sudah cukup karena mengurangi BAB dikali dan buang sampah disawah.
I ₁₋₆	Manfaatnya banyak jalan sekarang udah jadi bagus, warga juga enggak usah ke kali lagi kalau mau buang air, banyaklah pokoknya.
I ₂₋₁	Banyak salah satunya kebersihan yang dulunya kotor sudah bersih kemudian dari jalan sudah bagus, dari penerangan kemudian air yang biasanya menggenang sekarang ada salurannya. Kalau untuk sampah numpuk belum ada yang membuang karena kita juga koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup harus ada iuran

	masyarakat untuk membayar yang ngangkutin sampah.
I ₂₋₂	Banyak manfaatnya, biasanya warga yang buang air sembarangan di kali udah gak ada lagi, kalau untuk persampahan masih ada satu dua yang buang sembarangan karena tidak semua masyarakat tidak bisa diubah semua.
I ₂₋₃	Dengan adanya program ini masyarakat sudah disediakan tapi tidak dijalankan. Kalau awal saat 1 bulan atau 2 bulan awal itu dijalankan dipelihara setelah itu yasudah, kendalanya perawatannya yang susah. Kalau MCK masih digunakan hanya saja paling tong sampah tidak digunakan karena mau benerin tong sampah juga butuh dana sedangkan iuran aja masyarakat sulit.
I ₂₋₄	Manfaatnya sangat banyak dimana yang tadinya pada mandi di kali sekarang udah pada ke MCK, kemudian jalan yang dulunya jelek kalau ujan juga becek sekarang udah bagus. Dengan program NUSP-2 ini masyarakat lama-lama mencontohlah untuk membuat kamar mandi sendiri dirumah karena etidak mungkin terus-terusan di kamar mandi umum.
I ₂₋₅	Sangat banyak, peningkatan infrastruktur permukiman sangat terlihat bagaimana infrastuktur tersebut terbangun dimana yang tadinya jelek sekarang telah bagus. Kalau melihat hanya dengan mata setelah dibangun infrastruktur itu sudah tidak kumuh lagi lokasi tersebut namun kembali lagi kepada masyarakat kalau mereka tidak menjaga akhirnya timbul kumuh lagi.
I ₂₋₆	Sangat bermanfaat warga biasanya bab di sawah sekarang di MCK kalau sampah ke TPS cuma masih ada juga yang ke kali sih.
I ₂₋₇	Sangat besar manfaat walaupun belum 100% biasanya yang mandinya pada di kali sekarang di mck tetapi kalau masalah sampah belum bisa mengatasi.
I ₂₋₈	Manfaat untuk warga sini enak jalannya juga sudah tidak becek dulumah becek karena tanah, selokan-selokan juga udah bagus karena dulu kan disini banjir sekarang sudah tidak.
Q₂₇	Apakah program NUSP-2 sesuai kebutuhan (Kelurahan Warung Jaud, Margaluyu, dan Kilasah)?
I ₁₋₁	Sesuai dengan kebutuhan seperti MCK, SAB, jalan itu semua sesuai kebutuhan disini.
I ₁₋₂	Prasarana udah sesuai kebutuhan tapi prasarana yang dibangun masih kurang. Saya juga sudah mengajukan di musrembang.
I ₁₋₃	Sesuai banget karena yang dibangun udah sesuai kebutuhan masyarakat.
I ₁₋₄	Pembangunan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat seperti ada SAB itu warga sangat terbantu kemudian MCK juga yang dulu buang sembarangan sekarang di mck.
I ₁₋₅	Program NUSP-2 ini telah sesuai kebutuhan yang terdapat di bidang kebersihan dan air. Kalau kebutuhan lain itu belum.
I ₁₋₆	Udah sesuai kebutuhan kaya MCK, SAB, jalan udah sesuai semualah sama kebutuhan warga karena emang itu yang dibutuhin banget.
I ₂₋₁	Sesuai karena dulu yang jalannya becek sekarang sudah bagus kemudian saluran air juga yang dulunya tidak bagus sekarang sudah bagus juga, sudah sesuaiilah.
I ₂₋₂	Program NUSP-2 udah sesuai kebutuhan masyarakat.
I ₂₋₃	Sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena prasarana yang dibangun dimanfaatin sama masyarakat.
I ₂₋₄	Sesuai kebutuhan karena masyarakat disana emang kondisinya kurang sekali, banyak yang tidak punya MCK lalu jalan juga biasanya jalannya jelek terus banyak kotoran kerbaunya setelah ada program NUSP-2 aktivitas pada le MCK sama sarana air bersih dipakai, dan jalan-jalan lingkungan udah baguslah.

I ₂₋₅	Sesuai kebutuhan namun menurut masyarakat masih kurang karena mereka menganggap hanya satu wilayah tersebut saja yang diberi bantuan namun wilayah lain tidak, padahal pemberian bantuan itu sudah sesuai dengan sk walaupun di suatu wilayah menurut kita kumuh namun jika suatu wilayah tidak mencukupi dari 7 indikator yang ada maka tidak dapat dikatakan kumuh karena 7 indikator tersebut harus terpenuhi.
I ₂₋₆	Prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat sini butuh MCK jalan yang bagus dan air bersih.
I ₂₋₇	Prasarana yang dibangun sesuai kebutuhan.
I ₂₋₈	Prasarana yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.

Dokumentasi



Wawancara dengan Kasi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman



Wawancara dengan Lurah Warung Jaud



Wawancara dengan BKM Kelurahan Kilasah



Kondisi TPS Kelurahan Warung Jaud



Kondisi jalan lingkungan di Kelurahan Warung Jaud



Kondisi MCK di Kelurahan Kilasah



Area pembuangan sampah di Kelurahan Margaluyu



Proses pembangunan MCK di Kelurahan Margaluyu



Hasil pembangunan MCK di Kelurahan Margaluyu

CATATAN BIMBINGAN

Pembimbing I : Titi Stiawati, M.Si
 Pembimbing II : Drs. Hasuri, M.Si

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	11/10/2018	perbaiki dan lengkapi Bab I - Bab III sesuai Catatan Pd Berkin	[Signature]
	22/10/2018	perbaiki dan lengkapi Bab I dan bab II di dir kerjakan ferfikir di lengkapi Bab III lengkapi jadwal penulisan Daftar pustaka ditambah dan di lengkapi bab berikutnya.	[Signature]
	17/11/2018	1. Penambahan dasar hukum penulisan 20 hal prole 2. Juri's Kebaruan 67 3. Uraian lengkap Nesp	[Signature]

Catatan: Jumlah setiap mata mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali setiap mata).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
		4. Jelaskan teori app dan teori budaya 5. Judul peneliti 6. Lokasi area kelas 7. Lembar kerja 8. Lembar kerja 9. Lembar kerja	[Signature]
	26/11/2018	lihat s. laper untuk uji tempo	[Signature]
	3/12/2018	see tempo	[Signature]
	17/12/2018	judul lebih fokus dan LBM lebih baik	[Signature]
	2/2019	lengkap Bab I Bab II diperbaiki Cara pje film dan lengkap Bab III diperbaiki	[Signature]

Catatan: Jumlah setiap mata mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali setiap mata).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	9/2019	- Cey kaper bab I - Bab III Inform analisisnya bag peleas	TS
	10/2019	ACC SEMINAR PROPOSAL	TS
	11/2/19	Ace Laporan	TS
	13/2/19	ACE Laporan	TS
	13/2/19	ACC Capaian	TS
	8/2019	- ACC Bab V di se bua lru dy per masalahnya - buat temen Laporan pd Bab IV Cey kaper Capaian	TS

Catatan: Amalsh tetap maka mahasiswa dapat maling-maling pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing) sebanyak 14 kali tetap maka.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	16/2019	- Abstrak dip baik - Bab V sinkron kan - Buat member Check nya - seket inform.	TS
	22/2019	- Bab V ketimpula dan Soran disinkron kan	TS
	23/2019	ACC SIDANG	TS
	24/2019	- Lingsha keali - what mellyan - dalam perny - dily, husein - malya d. malya - Liday Catung.	TS

Catatan: Amalsh tetap maka mahasiswa dapat maling-maling pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing) sebanyak 14 kali tetap maka.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TARAF DOSEN
	26/10/19	Ane Ling	2

Catatan harus diisi oleh mahasiswa dengan mengisi setiap minggu pembimbing minimal 7 kali (tujuh) dengan 2 pembimbing maksimal 14 kali setiap minggu.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TARAF DOSEN

Catatan harus diisi oleh mahasiswa dengan mengisi setiap minggu pembimbing minimal 7 kali (tujuh) dengan 2 pembimbing maksimal 14 kali setiap minggu.

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama Lengkap : Anna Novita Sari
Tempat Tanggal Lahir : Semarang. 12 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Muray Raya, Kavling Perkebunan RT 003/RW 013,
Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota
Tangerang, Banten
Nomor Telepon : 087774087412
Email : novitasarianna@gmail.com

Pendidikan Formal

2002 – 2003 : TK Almahbubiyah
2003 – 2009 : SD Negeri Perumnas 9 Kota Tangerang
2009 – 2012 : SMP Negeri 20 Kota Tangerang
2012 – 2015 : SMA Negeri 5 Kota Tangerang
2015 – 2019 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi

Anggota Ekstrakurikuler LIMIT SMAN 5 Kota Tangerang
Sekretaris Ekstrakurikuler LIMIT SMAN 5 Kota Tangerang
Anggota Divisi Media Informasi HIMANE FISIP UNTIRTA
Sekretaris Kabinet HIMANE FISIP UNTIRTA
Relawan Pengajar Istana Belajar Anak Banten

Keahlian Tambahan

Dapat mengoperasikan Microsoft Word, Power Point, Excel